# TRANSFORMASI KONSEP WILAYAT AL-FAQIH DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA: STUDI MUSLIM SYIAH INDONESIA IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) DAN AHLUL BAIT INDONESIA (ABI)

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Rikal Dikri**

**NIM. 1113111000033**

Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

**TRANSFORMASI KONSEP WILAYAT AL-FAQIH DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA: STUDI MUSLIM SYIAH INDONESIA IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) DAN AHLUL BAIT INDONESIA (ABI)**

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhu salahsatu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 29 April 2019




Rikal Dikri

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rikal Dikri

NIM : 1113111000033

Program Studi : Sosiologi

Telah menyelesaikan skripsi dengan judul:

TRANSFORMASI KONSEP WILAYAT AL-FAQIH DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA: STUDI MUSLIM SYIAH INDONESIA IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) DAN AHLUL BAIT INDONESIA (ABI)

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 29 April 2019

| | |
|---|---|
| Mengetahui, | Menyetujui, |
| Kepala Program Studi, | Pembimbing, |
| Dr. Cucu Nurhayati, M.Si | Prof. Zulkifli, MA |
| NIP. 197609182003122003 | NIP.19660813991031004 |

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

SKRIPSI

**TRANSFORMASI KONSEP WILAYAT AL-FAQIH DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA: STUDI MUSLIM SYIAH INDONESIA IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA (IJABI) DAN AHLUL BAIT INDONESIA (ABI)**

Oleh

Rikal Dikri

1113111000033

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11 Juni 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi.

| | |
|---|---|
| Ketua, | Sekretaris, |
| Dr. Cucu Nurhayati, M.Si | Dr. Joharotul Jamilah, M.Si |
| NIP. 197609182003122033 | NIP. 196808161997032002 |
| Penguji I, | Penguji II, |
| Dr. Ida Rosyidah, MA | Saifuddin Asrori, M.Si |
| NIP. 196306161990032002 | NIP. 197701192009121001 |

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 11 Juni 2019.

Ketua Program Studi Sosiologi

FISIP UIN JAKARTA

Dr. Cucu Nurhayati, M.Si

NIP. 197609182003122033

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis sebuah tema permasalahan klasik antara hubungan Islam dan Pancasila namun dalam spektrum yang berbeda, konteksnya pergolakan diskursus doktrin *Wilayat Al-Faqih* Syi'ah dan Pancasila di Indonesia khususnya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI). Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat proses konstruksi diskursus yang terjadi dalam organisasi Islam Syi'ah IJABI dan ABI di Indonesia ketika menerima Pancasila sebagai dasar negara yang secara doktrin bersimpangan dengan doktrin *Imamah* dalam konsep *Wilayat Al-Faqih*, ialah proses pergeseran epistemik *(epistemic shift)* Wilayat Al-Faqih menuju Pancasila, dan pengaruh elit IJABI dan ABI dalam membentuk sebuah konsep *Wilayat Al-Faqih* yang pancasilais atau menolak Wilayat Al-Faqih karena konsistensi terhadap konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pemahaman mendalam *(deep-understanding)*, deengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang keseluruhannya diambil berdasarkan pernyataan-pernyataan *(statement)* yang muncul. Kemudian, data yang terkumpul diolah dan dianalisis melalui kerangka teori diskursus yang dikembangkan oleh Michel Foucault (pembentukan disisplin penegetahuan dan praktik pendisiplinan) yang menyangkut pembentukan obyek-obyek, modalitas penyampaian, pembentukan konsep, dan strategi-strategi yang terbatas pada konteks historis tertentu dan mengalami transformasi, diskontinuitas diskursus, penghilangan, pembaharuan, pembatasan, dan pendisiplinan subyek. Pembentukan disiplin pengetahuan dan praktik pendisiplinan ini tentunya melibatkan relasi kekuasaan dan pengetahuan yang bersifat menyebar *(dispersion)*.

Hasilnya, bisa kita lihat perkembangan dari komunitas Syiah itu sendiri, diskursus Pancasila dan Islam sudah sejak lama diperdebatkan, pada komunitas Syiah Indonesia sendiri sejak tahun 2000 pasca reformasi hingga 2005 internal Syiah masih bersatu dalam organisasi yang sama yaitu IJABI, namun setelah ada konflik internal pergeseran epistemik semakin menajam dan sebagian membentuk kelompok baru yaitu ABI yang didominasi oleh keturunan Arab. Ada beberapa faktor yang membuat IJABI dan ABI melakukan transformasi Wilayat Al-Faqih, (1) faktor politik (2) faktor stigmatisasi dari eksternal Syiah (3) faktor minimnya peran ulama Syiah dalam menentukan sebuah keputusan keagamaan dalam institusi negara dan institusi umat Islam (4) faktor pembeda antara Wilayat Al-Faqih IJABI dan ABI.



**Kata Kunci:** Transformasi, Diskursus, Syi'ah. Wilayat Al-Faqih, Imamah, IJABI, ABI, Islam Politik, Iran.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Allah Swt, shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada *Sayyidil Mursalin* penghulu para Nabi, filsuf radikal, yakni Muhammad Saw, beserta keluarganya yang senantiasa terjaga, dan kepada param imam yang ma'shum. Berkat rahmat hidayat Allah Swt dan atas izin-Nya peneliti telah merampungkan tugas penelitian ini, semoga hasil dari jerih payah ini bermanfaat untuk para pembaca yang budiman.

Proses penulisan skripsi tentunya melibatkan berbagai pihak yang telah membantu saya, baik bantuan moriil atau materil. Atas segala bantuannya peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkifli., MA, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarata, dan sebagai dosen pembimbing penulis, yang selalu sabar dan tabah dalam membimbing penulis yang cukup merepotkan, namun al-Hamdulillah atas kegigihannya skripsi ini bisa dirampungkan oleh penulis, dan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan.
2. Dr. Ali Munhanif, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Cucu Nurhayati, M.Si., selaku Ketua Prodi Sosiologi yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini, dan telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa, beliau adalah Ibu dari kita semua.
4. Dr. Joharotul Jamilah, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Sosiologi yang juga adalah Ibu bagi mahasiswanya yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
5. Kepada seluruh dosen Sosiologi yang penulis hormati terimakasih telah memberikan ilmunya kepada penulis, Pak Saifuddin Asrori yang terkadang menemani ngopi, Pak Hasan Ansori yang cukup memberikan semangatselama kuliah, Bu Ida Rosyidah yang membangun nalar kritis Mahasiswa, Pak Guntur Alting yang beberapa kali ketemu

saya di Kafe sekitaran Kuningan, Pak Ismail yang mengajarkan banyak toleransi, Pak Nur Kafid yang kini menjadi dosen di Surakarta yang senantiasa memberikan kabar lewat WhatsApp dan beliau adalah mentor penulis di segala bidang, dan yang terakhir Pak Agus Nugraha selaku Wakil Dekan III yang selalu menegor saya dan membimbing penulis ketika di Himpunan Mahasiswa Jurusan, beliau juga tetangga kampung saya di Tasikmalaya, kedekatan penulis dengan beliau sangat dekat layaknya anak dan orang tua. Terimakasih kepada semuanya civitas akademika FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis adalah seorang budak dari orang yang mengajar meski hanya satu huruf saja.

6. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., selaku guru saya selama di Jakarta, beliau adalah Sang Pencerah di kala yang lain gelap gulita, beliau telah membimbing dan mensupport penulis selama proses berjalannya penelitian, dan juga penulis berterimakasih kepada keluarga besar beliau, Ustadz Miftah Rakhmat dan Teh Enovita yang selama ini menemani penulis dan membantu penulis mencari referensi.
7. Ustadz Syamsuddin Baharuddin selaku ketua Tanfidziyah Ikatan Jama'ah Ahlul Bayt Indonesia (IJABI) yang senantiasa membantu penulis mengenal lebih jauh IJABI.
8. Dr. Muhsin Labib, selaku tokoh Ahlul Bayt Indonesia (ABI) yang telah membantu saya sebagai narasumber di penelitian ini, dan juga membantu memberikan banyak referensi yang penulis baca.
9. Dr. Haidar Bagir yang sering teraktir saya di Moco Cafee Cireundeu, beliau juga salah satu guru penulis, dan banyak membantu rekomendasi berbagai hal, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan.
10. Ustadz Musa Kadzim, Habib Husain Muhdhor, Habib Mahdi, yang membantu mencarikan referensi kitab-kitab Ahlul Bayt sekaligus narasumber di penelitian ini.

11. Dr. Dina Sulaeman, selaku Narasumber dan pengamat politik Timur Tengah yang telah memberikan sedikit banyaknya wawasan politik dan konflik yang terjadi di Syiria, Irak, Palestina, dan Yaman.
12. KH. As'ad Sa'id Ali, selaku orang tua dan mentor penulis dalam wacana intelektual, beliau juga mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara yang turut membantu penulis memberikan data-data objek yang penulis teliti.
13. Dr. Usep Abdul Matin, selaku narasumber penting bagi penulis, beliau seorang intelektual yang juga banyak mengajari penulis berbagai ilmu.
14. Mas Zuhairi Misrawi selaku narasumber yang cukup akrab dan dekat dengan golongan Ahlul Bayt, bukan hanya itu, beliau juga adalah senior dan mentor saya dalam bidang tulis-menulis, terutama artikel-artikel ringan di media.
15. Prof. A.M. Hendropriyono, selaku mantan kepala Badan Intelijen Negara yang senantiasa mensupport aktivitas penulis, beliau telah membantu moril dan materil kepada penulis selama berjalannya proses penelitian, bagi penulis beliau Ayahanda yang baik dan mengayomi semua orang.
16. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., yang selama bulan puasa menemani penulis berdiskusi di rumah pribadinya di Cireundeu, beliau juga mentor penulis, yang mengenalkan penulis dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah.
17. KH. Ma'ruf Amin, selaku Kiai dan Guru dari penulis, yang senantiasa mensupport penulis dan generasi milenial agar berkarya sekreatif mungkin, beliau mengajarkan kegigihan, semangat, dan ketulusan.
18. KH. Syarbani Haira, Bang Surya Fermana, Bang Berry Nahdliyan Furqoun, Bang Syaipul Adhar, Ustadz Khairi Fuady, dan tim Pusat Syiar dan Dakwah al-Mahabbah yang senantiasa mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studinya.

19. Habib Novel bib Jindan dan Habib Ahmad bin Jindan yang senantiasa mengarahkan penulis supaya lebih objektif, dan adil serta mendoakan lahir batin penulis.
20. Kepada Senior dan Sahabat seperjuangan Mas Hery Haryanto Azumi, Pak Agus Nilmada Azmi, Mas Simon, Muhammad Faruqi, Adriansyah, Khalid Syaifullah, Adam Ronald, Rizki Mulyarahman, Syamsul Anwar, Dinno Brasco, M. Sutisna, M. Sulton, Abdul Hakim Syafii, Oktanta, Ahsanu Amala, Malik Abdillah, Didin Hasanuddin, Badroni Tamim, Randi Hamdani, Fitra Aditya Irsyam, dan semuanya yang tak bisa disebut satu persatu.
21. Kepada Islamic Cultural Center (ICC), IJABI, ABI, Lakpesdam PBNU, Ma'arif Institute, Setara Institute, Wahid Foundation, Pojok Gus Dur, KUPAS, Muslim Moderat Society (MMS), yang senantiasa membantu penulis selama proses pengumpulan data.
22. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Encu Samsul Hidayat dan Ibu Imas Herawati, yang selalu sabar mendukung, menasihati, dan membantu penulis baik secara lahir atau pun batin, skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis.
23. Adik tercinta Ai Nur Lita, yang senantiasa memotivasi dan menghibur penulis selama proses penilitian hingga rampung dan selesai.

Demikianlah ucapan terimakasih penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya menuai keberkahan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk civitas akademika, dan siapa saja yang membacanya di hari ini, dan yang akan datang.

Menteng, 29 April 2019

Rikal Dikri

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** .....v

**KATA PENGANTAR**..... **vi**

**DAFTAR ISI**.....**x**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Pernyataan Penelitian……1
B. Pertanyaan Penelitian……8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……..8
C.1. Tujuan……8
C.2. Manfaat……...9
D. Tinjauan Pustaka……9
E. Kerangka Teoritis……13
E.1. Diskursus……14
E.1.1. Asumsi Filosofis……..14
E.1.2. Arkeologi dan Genealogi……20
E.1.3. Regime of Truth……...22
E.1.4. Pembentukan Diskursus……...25
E.1.5. Diskontinuitas Diskursus……28
E.2. Kerangka Konseptual……..……29
E.2.1. Syiah dan Imamah……..……..29
E.2.2. Wilayat Al-Faqih……..……30
E.2.3. Muslim Syiah Indonesia IJABI dan ABI……...31
E.2.4. Demokrasi Pancasila……...……32
F. Metode Penelitian……34
F.1. Pendekatan Penelitian……...……34
F.2. Sumber Data……..36
F.3. Teknik Pengumpulan Data……37
F.3.1. Wawancara……..……37
F.3.2. Observasi……..……38

F.3.3. Dokumentasi……39
F.3.4. Pemilihan Informan……..39
F.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data……...……..41
G. Hambatan dan Kemudahan……..……42
H. Sistematika Penulisan……...……43

**BAB II DISKURSUS SYIAH DI INDONESIA**

A. Diskursus Sunni dan Syiah di Indonesia……..……45
B. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesi (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI) dalam Diskursus Syi'ah dan Wilayatul Faqih di Indonesi……54
C. Diskursus Islamisme Wilayatul Faqih dan Demokrasi Pancasila di Indonesia……..…….64

**BAB III REBUTAN SYIAH DAN KLAIM PANCASILAIS IJABI VERSUS ABI**

A. Bingkai Diskursus dan Transformasi Wilayat Al-Faqih IJABI……78
B. Bingkai Diskursus dan Transformasi Wilayat Al-Faqih ABI……99

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan……..114
B. Saran……117

**DAFTAR PUSTAKA…….119**

**DAFTAR LAMPIRAN……..132**

# BAB I

# Pendahuluan

## A. Pernyataan Penelitian

Penelitian ini membahas transformasi konsep *Wilayat al-Faqih* di Indonesia menggunakan analisis diskursus Michel Foucault. Fokus skripsi ini adalah proses transformasi antara konsep *Wilayat al-Faqih* Syi'ah dalam konteks Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara. Proses transformasi ini diambil berdasarkan penerimaan dan pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara yang diakui oleh Muslim Syiah di Indonesia.

Muslim Syi'ah di Indonesia sudah sejak lama berdampingan dengan muslim mayoritas Sunni dengan berbagai sumber penelitian dan fakta historis masyarakat Syiah di Nusantara meskipun ada beberapa perbedaan pandangan politik yang muncul pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979. Senada dengan yang dikatakan Sahidin (2015:31) "Perbedaaan yang paling esensial antara Sunni dan Syiah adalah konsepsi politik. Selanjutnya berkembang pada kalam (teologi), hadis, fiqih, dan lainnya beserta perbedaan penafsiran yang melahirkan mazhab-mazhab dalam Islam". Perbedaan pandangan politik ini dipahami oleh sebagian orang sebagai gerakan kontra pruduktif bagi perkembangan demokrasi di negara-negara yang mayoritas muslim. Menurut Anis ada banyak pandangan pesimis dalam memahami konsep *Wilyah al-Faqih* di antaranya Bernard Lewis, Fareed Zakaria, Ali Gheissari dan Vali Nasr. Lewis menyatakan bahwa Konsep Wilayah al-Faqih yang menyatukan agama dan negara sama dengan lembaga kepausan, yang telah menjadi penyakit Kristen di masa lalu. Fareed Zakaria juga tidak

segan-segan menyebut Iran sebagai negara diktator dan jauh dari demokrasi liberal. Tak ketinggalan Ali Gheissari dan Vali Nasr juga mendakwa bahwa meskipun lahir dari revolusi sosial, bangunan teokratik Republik Islam Iran telah melahirkan rezim otoriter pragmatis (2013:1).

*Wilayah al-Faqih* adalah sebuah konsep atau teori yang muncul dari doktrin Imamah yang dominan dan populer pada masyarakat muslim Syiah di Iran pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979. Doktrin *Wilayat al-Faqih* merupakan proses sentral dari pemikiran politik Syiah kontemporer. Ia mengadopsi sebuah sistem politik perwalian, yang berdasarkan pada seorang *faqih* yang adil dan kapabel untuk memegang pimpinan pemerintahan selama *gabi*nya Imam yang maksum (Vaezi, 2006:67). Kepemimpinan dalam Syiah harus dipegang oleh seorang *faqih* yang adil dan kapabel, karena merupakan sebuah estafet kepemimpinan dari para Imam yang diyakini maksum oleh kalangan Syiah, mereka meyakini bahwa Imam adalah pemimpin dan teladan *(uswah)* bagi massa yang membentuk *ummah* (masyarakat). Ia adalah orang yang kekuatan intelektual dan pandangannya mampu memberikan manfaat bagi orang-orang yang berjalan menuju Tuhan; perbuatan dan pola kehidupannya diikuti dan perintah-perintahnya ditaati (Mujtaba, 2004:23).

Gerakan Islam Syiah di Indonesia dimotori dua organisasi besar Syiah di Indonesia yaitu IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) dan ABI (Ahlul Bait Indonesia), eksistensi Syiah Indonesia juga tidak bisa lepas dari Iran pasca revolusi Islam.

> Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) merupakan salah satu ormas Islam (seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah lebih

> dahulu lahir). Tanggal 1 Juli 2000, Gedung Asia Afrika Bandung, yang pernah menjadi saksi sejarah berkumpulnya bangsa-bangsa Asia Afrika pada Konferensi Asia Afrika, kembali menjadi saksi sejarah lahirnya ormas baru yang mengusung semangat yang sama, pembebasan dan pencerahan. Dipimpin oleh Prof.Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc salah seorang intelektual muslim terkemuka Indonesia, IJABI lahir dengan maksud untuk menghimpun para pencinta keluarga suci Nabi Saw, apapun mazhabnya (ijabi.or.id).

Munculnya IJABI sebagai Organisasi Kemasyarakatan dengan upaya menghimpun seluruh madzhab pencinta Ahlul Bait seperti Syiah Zaidiyah dan Ismailiyah yang masih eksis selain Ja'fariyah-Imamiyah yang mayoritas di Indonesia. Misi IJABI adalah menghimpun seluruh pencinta Ahlul Bait dari kalangan manapun untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan *mustadh'afin* dan pencerahan pemikiran umat, yang tampaknya dengan ormas yang ada sekarang akan sulit efektif karena banyaknya kontaminasi politik yang bias konflik politik (ijabo.or.id).

Di lain sisi, lahir juga organisasi Syiah selain IJABI yang menghimpun Ahlul Baitnya yaitu ABI (Ahlul Bait Indonesia).

> Pada Forum Rakernas tanggal 24-25 Juli 2010 9 orang Dewan Pengarah yang juga disebut dengan Tim 9 akhirnya menetapkan pembentukan ormas yang bersifat nasional dengan nama Ahlulbait Indonesia. Ahlulbait Indonesia merupakan organisasi masyarakat independen yang mengusung visi, misi, tujuan dan sejumlah program sebagai kelanjutan forum Silatnas Ahlulbait (ahlulbaitindonesia.or.id)

ABI telah berhasil mengembangkan gerakan dakwahnya sehingga mampu membentuk beberapa lembaga pendidikan, pengkajian Al-Quran dan Hadits, penerbitan buku, media massa, dan sebagainya telah didirikan untuk mendukung misi luhur penyebaran ajaran Ahlul Bait, kedua organisasi Syiah ini kerap kali

mendapatkan stigma negatif dari kalangan ummat Islam non-syiah khususnya sunni ortodok dengan gerakan purifikasi Islam. Muncullah ANNAS (Aliansi Nasionalis Anti Syiah) yang dideklarasikan oleh ketua FUUI (Forum Ulama Ummat Indonesia) KH. Athian Ali.

> Setelah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan interen Pengurus dan Dewan Penasehat FUUI, maka akhirnya dengan Bismillah dan Nawaitu lillah, li 'ilaa-'i kalimatillah, wa li khidmatil Islam wal Muslimiin, pada Ahad, 20 Jumadits Stani 1435 H/20 April 2014 M, FUUI melaksanakan salahsatu amanat "Musyawarah 'Ulama dan Ummat Islam Indonesia ke-2" menyelenggarakan deklarasi berdirinya "Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)" (annasindonesia.com).

Gerakan ANNAS sering mengkampanyekan wacana *"ancaman Syiah" (The Shia threat)*, wacana ini tidak lebih adalah faktor historis yang berakar pada konflik geopolitik yang tak pernah berhenti di Timur Tengah, bisa juga diartikan sebagai ketakutan sebagian muslim atas ekspansi ideologi ajaran Syiah yang mereka anggap sesat-menyesatkan dan mengganggu kondusifitas dan stabilitas negara. Saefullah (2015:18) mengatakan "wacana tersebut merupakan strategi kontra-revolusi yang sengaja dibuat kelompok elit monarki negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, untuk meredam arus demokratisasi yang mengancam status quo mereka". Issu yang dimainkan Arab Saudi adalah issu Syiah yang digambarkan sebagai paham berbahaya dan menyeramkan, sehingga Syiah dibentuk sedemikian rupa menjadi musuh imajiner demi perkembangan kapitalisme dan kepentingan Arab Saudi dan sekutunya.

> Dalam kerangka geopolitik, wacana 'ancaman' adalah bagian dari strategi yang diproduksi oleh kelompok-kelompok politik yang bersaing. Di era Perang Dingin (1945-1990) contohnya, dikenal istilah 'Ancaman Merah' *(Red Menace)*. Ancaman Merah mengacu pada ketakutan atau kekhawatiran Barat terhadap

> ekspansi ideologi komunisme di negeri mereka. Namun setelah jatuhnya Uni Soviet di tahun 1991, 'Merah' tidak lagi dianggap sebagai 'ancaman'.Sebagai gantinya, para pembuat kebijakan di Washington merumuskan musuh baru: 'Bahaya Hijau' *(Green Peril).* (2015:20)

Setelah hilang Ancaman Merah dikarenakan jatuhnya Uni Soviet, Washington merumuskan musuh baru karena ditakutkan ekspansinya gerakan Islam Fundamental di Iran pasca revolusi 1979. Hadar (1992:177) mengatakan:

> *The Saudis have indicated that they are interested in countering Iranian influence in Central Asia. Ironically, they are doing what they accuse Tehran of-- spending lavishly to establish political and religious influence. Riyadh has spent more than $1 billion to promote the Saudi brand of Islam.*

Menurutnya Saudi ingin melawan pengaruh Iran di Asia Tengah, dengan tuduhan yang selama ini distigmakan terhadap Teheran *(Green Peril)*. Sehingga mereka dengan royal menghabiskan banyak biaya untuk melawan pengaruh Iran tersebut dan mengahabiskan 1 Miliyar Dollar untuk mempromosikan Islam dengan brand Saudi. Setelah muncul wacana Ancaman Hijau yang dibentuk Amerika, di dunia muslim pun muncul wacana yang diciptakan Arab Saudi yang dikenal dengan 'ancaman Syiah' *(Shia threat)* yang menakutkan.

Revolusi Islam Iran terkenal dengan gerakan fundamental Islam sebagai perlawanan terhadap negara-negara Barat. Gerakan ini lahir dari pemikiran ortodoksi Islam yang tidak bisa lepas dari sosok Imam Khomeini yang nantinya melahirkan sebuah konsep pemerintahan Islam dengan nama *Wilayat al-Faqih*.

*Wilayat al-Faqih* merupakan sebuah sitem pemerintahan yang bersandarkan pada wahyu ilahiyah berpacu pada teologi politik sehingga muncul istilah teo-demokrasi. Seperti yang di katakan oleh Muhammad Anis (2015:87) *Wilayat al-Faqih* adalah "*memadukan legitimasi Tuhan (divine legitimacy) dan*

*hak politik rakyat"*. Berbenturan dengan dokrin Imamah ini, banyak dari kalangan ummat Islam yang masih khawatir dengan berkembangnya paham dan ajaran Syiah di Indonesia. Pandangan doktrin Imamah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat mayoritas Sunni di Indonesia, karena mempunya paradigma yang sentral terhadap keyakinan dalam rukun iman orang Sunni. Menurut Zulkifli, Indonesia dengan keragaman masyarakatnya di dalam kelompok Islam sendiri banyak ormas yang bertentangan dengan paham Syiah seperti PERSIS, Al-Irsyad al-Islamiyah, DDII, yang selalu menggembor-gemborkan propaganda anti-syiah di Indonesia, gerakan ini adalah gerakan Islam Reformis yang bertujuan untuk purifikasi Islam. Adapun Muhammadiyah sebagai organisasi reformis pembaharu Islam bersikap netral, dan NU sebagai representasi dari Islam tradisionalis lebih berpihak pada Syiah, meskipun ada di sebagian cabang wilayah NU di daerah yang bekerjasama dengan Muhammadiyah, PERSIS dan yang lainnya untuk mengusulkan kepada MUI tentang fatwa kesesatan Syiah (2013:229-234).

Dalam hal lain, menurut golongan anti-syiah beranggapan bahwa Syiah adalah gerakan anti Pancasila dan bisa berbahaya untuk keutuhan NKRI. Propaganda yang sangat canggih, sitematis, terstruktur, dan massif ini mampu menggiring ummat Islam menjadi wajah Islam yang ganas, saling mengkafirkan, dan memonopoli klaim kebenaran. Tak jarang kedua aliran mayoritas (Sunni) dan minoritas (Syiah) ini bergesekan, tak jarang juga mereka beradu argumen sampai debat kusir di media sosial, dari mulai perdebatan teologi sampai demokrasi. Kaum minoritas akan terus berupaya untuk membela hak-haknya sebagai warga

negara, dengan mengadakan dialog dan interaksi antar ormas seperti yang sering dilakukan oleh IJABI dan ABI di Indonesia.

Demokrasi sebagai sistem politik diartikan sebagai kedaulatan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat, yang sampai saat ini Indonesia masih menggunakan sistem demokrasi Pancasila, dalam beberapa priode pasca kemerdekaan 1945 banyak berbagai model demokrasi yang digunakan tapi tetap berpacu pada falsafah negara yaitu Pancasila, seperti yang di katakan Hatta "Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat." (1932). Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Meminjam bahasanya Habermas, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif yang memiliki makna tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur (Hardiman, 2009:128). Oleh karenanya, demokrasi mempunyai perbedaan signifikan dengan *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi bukan negara yang diilhami oleh wahyu.

Dari perdebatan silang sengkarut ini, penting untuk diteliti bagaimana proses transformasi dan kontestasi yang melibatkan masyarakat Muslim Syiah di Indonesia dengan keyakinannya terhadap Imamah (konsep *Wilayat al-Faqih*) bisa menerima konsep demokrasi Pancasila yang dianut ole sistem politik Indonesia saat ini. Secara normatif Pancasila telah dirumuskan dan disepakati oleh *founding father* kita pendiri bangsa ini sebagai *modus vivendi* (pedoman hidup) bangsa Indonesia yang heterogen *pluralistic* (beragam) namun tetap dalam satu kesatuan

Bhineka Tunggal Ika. Dalam silang sengkarut ini tidak terjadi di ruang kosong maupun bersifat statis, namun terjadi pada kurun waktu yang lama bahkan sampai saat ini. Persilangan pendapat ini berkaitan dengan struktur sosial, politik dan ekonomi tertententu bahkan melibatkan jejaring kuasa dan geopolitik global. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian tentang *Wilayat al-Faqih* karena masih minimnya peneliti ini di lingkungan akademik Indonesia. Sekiranya penting untuk melakukan penelitian dengan judul **"Transformasi *Wilayat Al-Faqih* dalam Konteks Demokrasi Pancasila; Studi Muslim Syiah Indonesia (IJABI dan ABI)."**

## B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana transformasi konsep *Wilayat al-Faqih* Syiah IJABI dan ABI dalam konteks penerimaan Demokrasi Pancasila di Indonesia?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### C.1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses transformasi *Wilayat al-Faqih* yang melibatkan masyarakat muslim Syiah di Indonesia (IJABI dan ABI) dalam konteks sistem Demokrasi Pancasila. Selain itu, skripsi ini juga mengungkap kepentingan politik global dan jejaring kuasa serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses transformasi ini dengan analisis tajam dari teori diskursus, arkeologi, dan genealogi Michel Foucault.

### C.2. Manfaat

a. Manfaat teoretis penelitian skripsi ini adalah sebagai ukuran sejauh mana relevansi teori diskursus paska-strukturalis serta metodologi kualitatif yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

b. Manfaat Praktis penelitian skripsi ini adalah untuk menjadi sumber referensi kepada sivitas akademika untuk melihat diskursus mengenai *Wilayat al-Faqih* dan Pancasila. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan konsep *Wilayat al-Faqih*. Skripsi ini juga diharapkan sebagai salah satu bahan bagi pemecahan masalah yang ada pada seputar polemik dan konflik antar warga negara khususnya masyarakat muslim Indonesia untuk selalu menjaga integritas bangsa, serta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

## D. Tinjauan Pustaka

Memang diakui bahwa penelitian seputar tema *Wilayat al-Faqih* telah banyak dilakukan oleh sarjana Muslim maupun Barat dengan beragam sudut pandang dari spesifikasi pembahasan. Namun, dari pelbagai karya tersebut belum ada yang mendedah konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai doktrin ajaran yang patut diyakini oleh muslim Syiah Indonesia dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Selain itu, karya-karya tersebut juga belum menyentuh studi diskursus Islam dan demokrasi khususnya *Wilayat al-Faqih* dan Pancasila.

Sejauh yang penulis ketahui, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Wilayat al-Faqih*, dari segi teoritik dan konseptual ada Ahmed Vaezi yang

mencoba melakukan studi banding antara *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi dalam karyanya "*Syi'ah Political Thought"* (Vaezi, 2004), namun penelitian Vaezi hanya pada tatanan umum studi komparatif, belum pada konteks demokrasi secara khusus dalam artian hanya bicara di wilayah konseptual belum menyentuh tataran praktis, Vaezi juga menggunakan pendekatan filosofis, teologis, etika, dan jurisprudensi politik. Ada juga Sayid Mujtaba Musawi Lari dengan bukunya "Imam Penerus Nabi Muhammad", ia menulis tentang *Wilayat al-Faqih* dari sisi Teologis, lagi-lagi belum secara spesifik menyentuh demokrasi (Mujtaba, 2004). Ia hanya menjelaskan dalil nash *(text)* yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Selain itu, ada juga penelitian dari Salamuddin dengan judul tesis "Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam" (Salamuddin, 2015). Namun demikian, tesis tersebut hanya mendeskripsikan secara teoritis dengan metode komparasi belum menyentuh tatanan diskursus *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi Pancasila. Salamuddin juga sangat rinci menjelaskan tentang konsep, teori, praktik dekmokrasi dan *Wilayat al-Faqih* dengan pisau analisis teori politik Islam kontemporer. Kemudian, terdapat penelitian studi komparasi antara pemikiran Khomeini dan Ir. Soekarno dalam sebuah skripsis yang ditulis oleh Ahmad Wahyudin dengan judul "Sistem Demokrasi Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno" (Wahyudin, 2013). Wahyudin mencoba membandingkan antara pemikiran dua tokoh besar revolusi tersebut dengan metode deskriptif-komparatif perbandingan madzhab menggunakan studi *library research*, namun penelitian itu belum sampai pada tema diskursus sama halnya seperti penelitian sebelumnya. Begitu pula,

Umar Shahab (Shahab, 2006) menulis disertasi tentang "Khomeini dan Negara Syiah Modern" dalam disertasinya, itu juga hanya terfokus pada pembentukan negara Syiah modern pasca kemenangan revolusi Iran 1979, tidak berbicara demokrasi secara komprehensif karena yang ia gunakan adalah analisis historis. Selanjutnya, ada sebuah penelitian studi komparasi dari Ahmad Arif Imamulhaq (Arif, 2000) yang berjudul "Pandangan KH. Abdurrahman Wahid dan Ayatullah Khomeini tentang Negara dan Demokrasi" penelitian ini menggambarkan dua sosok idealis dan sosok pemikir kenegaraan berikut keduanya menyandang gelar ulama, pada penelitian ini yang sangat penting adalah bagaimana pemikiran kedua tokoh ini tentang negara dan demokrasi di negaranya masing-masing. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengungkapkan aspek sosiologis muslim Syiah di Indonesia.

Muhammad Anis di dalam disertasinya yang berjudul "Politik Syiah dan Demokrasi: Pengalaman Iran Pasca Revolusi 1slam 1979", hanya sebatas membahas sisi perbandingan dan persamaan antara *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi secara umum, tidak terfokus pada Muslim Syiah Indonesia yang mengakui demokrasi Pancasila karena objek yang ditelitinya adalah Iran (Anis, 2013), ia juga bicara di tataran praktis secara umum – bukan konteks demokrasi Pancasila. Adapun penelitian dari Prof. Zulkifli dalam disertasi yang berjudul *The Struggle of The Shi'is in Indonesia* (Zulkifli, 2013). Ia hanya terfokus pada strategi Syiah Indonesia agar mendapatkan legitimasi otoritatif dari penguasa, karena itu disertasinya menggunakan teori Stigma dari Erving Goffman. Secara praktis, penelitian Prof. Zulkifli tidak secara khusus terspesifikasi pada tatanan

sikap politik, dan diskursus antara *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi Pancasila. Prof. Zulkifli juga banyak menulis tentang Syi'ah di Indonesia baik berbentuk jurnal, artikel, atau *review*. Salah satu tulisan beliau dalam jurnal Studia Islamika yang berjudul "*Education, Identity, and Recognition: The Shi'i Islamic Education in Indonesia"* (2014) membahas pendidikan, identitas, dan pengakuan muslim Syiah di Indonesia. Dengan narasi yang mirip Prof. Zulkifli dalam tulisan pendeknya yang berjudul *"Shi'i Identity and Nationalism in Indonesia's Reformasi*" (2017) mencatat pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Syiah di Indonesia atas kesetiannya terhadap NKRI, juga menjelaskan tranformasi dan dinamika masyarakat Syi'ah Indonesia dalam gelombang demokratisasi pasca reformasi 1998. Begitu juga dalam jurnal yang sama beliau menulis *review* buku yang berjudul "Kesalehan 'Alawi dan Islam di Asia Tenggara" (2016) yang direview dari buku *"Shi'ism in Southeast Asia: 'Alid Piety and Sectarian Constructions"*.

Ada juga sebuah tesis yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Rafli Yunus (1976), beliau menulis tesis tentang dua belas Imam dalam Syiah bahkan ketika Revolusi Islam belum mengguncang Iran dan bergema ke seantero jagat. Tesis yang berjudul *The Necessity of Imamah According to Twelver Shi'ism; With Special Reference to Tajrid Al-I'tiqad of Nashiruddin Al-Thusi,* membahas sebuah pemikiran tentang Imamah yang dipahami sebagai akidah Syi'ah dua belas (*ja'fariyah*) dalam kitab *Tajrid al-'Itiqad* karangan Nashiruddin al-Thusi. Tesis ini tidak membahas Wilayat al-Faqih secara konsep dan sistem, melainkan lebih ke pemahaman teologis masyarakat syi'ah terhadap imamah.

Terakhir ada sebuah penelitian yang saya kira sangat penting yaitu Eksistensi Syi'ah di Indonesia: Wacana tentang Konstelasi Reaksi Sunni terhadap Faham Syi'ah di Indonesia sebagaimana Terefleksi dalam Buku "Mengapa Kita Menolak Syi'ah". Penelitian yang ditulis oleh Zainal Aris Masruchi (2002) ini sangat penting, karena sebuah analisis deskripsi wacana-wacana Syi'ah di Indonesia dalam berbagai sumber media cetak, meskipun tidak secara signifikan menjelaskan Wilayat al-Faqih dan demokrasi, tapi penelitian ini cukup menggambarkan kondisi muslim Syiah di Indonesia ditengah mayoritas Sunni.

Dari penelitian-penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Persamaan dapat dilihat dari objek yang diteliti, yakni *Wilayat al-Faqih*, Syiah Indonesia, dan Demokrasi Pancasila.

Sementara perbedaannya, yang jelas sangat fundamental bagi penulis ini, ialah tidak ditemukannya pembahasan mengenai tema tentang *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi Pancasila yang menggunakan pisau analisa diskursus Michel Foucault. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba untuk melanjutkan dan melengkapi khazanah penelitian sebelumnya. Penulis berusaha membahas, mendedah, dan menganalisis diskursus *Wilayat al-Faqih* sebagai konsep yang lahir dari doktrin *Imamah* Syiah dapat bertransformasi dalam idiologi lain yakni demokrasi Pancasila. Tidak hanya pada tataran konsep dan doktrin, melainkan juga pada tataran praktis terkait diskursus ini.

## E. Kerangka Teoritis

### E.1. Diskursus

#### E.1.1. Asumsi Filosofis

Analisis diskursus merupkan kajian sosiologis yang secara eksplisit banyak menganalisis pernyataan-pernyataan. Teori ini telah banyak pakar sosiolog yang mengembangkan di antaranya Foucault, Habermas, Laclau, dan Moffe. Diskursus menurut Michel Foucault adalah kumpulan-kumpulan pernyataan yang mana tema sentralnya adalah *enonce* (statemen), yang dimaksud statemen bukanlah sebuah ungkapan (*utterance*), proposisi, linguistik atau gramatikal, bukan juga sekedar percakapan sosial, entitas psikologis atau logis, serta bukan suatu bentuk ideal atau *event* (Dreyfus & Rabinow, 1983:45). Analisa diskursus dalam lanskap pemikiran Foucault merujuk pada "pembentukan disiplin ilmu pengetahuan" (psikiatri, sosiologi, medis, hukum, dan lain-lain) dan "praktik pendisiplinan" (kontrol sosial) (McHoul & Grace, 2002:26). Keduanya berawal dari posisi filosofis tentang *episteme*. Istilah episteme merujuk struktur tertentu dari pengetahuan pada periode atau masa tertentu, maka setiap periode peradaban atau budaya memiliki kekhasannya sendiri (Downing dalam Pinem, 2014:3). *Episteme* disebut juga oleh Foucault sebagai "sistem pemikiran" atau *historical a priori* yang menjadi objek analisis dari arkeologi (Bertens, 1996: 314). Menurut Foucault, *episteme* adalah merupakan suatu kondisi yang memungkinkan bagi munculnya pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori dalam suatu masa atau priode tertentu. Maka, bagi Foucault, jika Anda ingin memahami perilaku manusia pada tempat dan waktu tertentu, temukanlah wacana-wacana yang mendominasi di situ (Jones, 2009:174). *Episteme* memiliki pandangan bahwa dalam tiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan umum dalam masyarakat,

terdapat susunan yang terstruktur dan sitemik (Agusta, 2012:10). Foucault (2012: 341-342) dengan jelas mengatakan:

> *Episteme* ini adalah keseluruhan relasi-relasi yang menyatukan praktek diskursif, pada suatu masa,yang memunculkan pola-pola epistemologis, sains-sains dan sistem-sistem formal: cara-cara di mana masing-masing formasi diskursif, transisis menuju epistemologisasi, keilmiahan dan formulasi-formulasi ditempatkan dan beroprasi... *episteme* bukanlah satu bentuk pengetahuan (connaisanse) atau tipe rasionalitas yang memanifestasikan kesatuan kokoh dari subyek, spirit atau priode ketika dia berhasilmelewati batas-batas berbagai sains yang ada: *episteme* adalah totalitas relasi-relasi yang bisa ditemukan, di dalam masa tertentu, di antara sains-sains saat seseorang menganalisa sains tersebut pada level regularitas diskursifnya... *episteme* membuka satu wilayah yang luar biasa luas dan tidak akan pernah bisa tertutup.

Pandangan filososfis ini juga berkaitan dengan pengetahuan *(knowledge)* dan kekuasaan *(power).* Foucault dikenal sebagai pemikir yang dipengaruhi oleh Nietzsche, meskipun Foucault sendiri berkata dengan enteng bahwa kesetiaannya kepada Nietzsche bukanlah urusannya (Sheridan, 1982: 117). Nietzsche mengembangkan metodologi terbarunya dalam meneliti sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang bermuara pada asumsi filososfisnya mengenai kekuasaan, inilah yang membuat Foucault tertarik dalam kerangka berfikir tersebut (Ritzer, 2011; Haryatmoko 2002). Meskipun pada akhirnya Foucault sendiri mngkritik konsepsi *knowledge/power* Nietzsche yang bernuansa psikologis (Rabinow, 1984).

Nietzsche mempunyai ciri khas berfikir, sehingga pemikirannya melampaui zamannya. Epistemologinya jelas sekali mengkritik terhadap epistemologi tradisional yang sempit (Santoso et al. 2015: 58). Ia melihat kekuasaan dalam kerangka yang lebih luas, karena kekuasaan adalah unsur paling dalam yang embentuk realitas dan menjadi realitas itu sendiri (Porter, 2006). Kekuasaan adalah titik pusat dari filsafat Nietzsche. Ia menemukan kehendak

untuk berkuasa, berkarya dalam segi tingkah laku penilaian manusia (Kaufmann, 1967:510). Bagi Nietzsche kekuasaan adalah hal paling fundamental, seluruh realitas yang ada di dalamnya adalah bentuk lain dari kehendak untuk berkuasa. Ia menjelaskan bahwa segala konsep dan masalah yang diperbincangkan selalu bermuara pada kehendak untuk berkuasa (Santoso et al. 2015:57). Kehendak untuk berkuasa merupakan "klaim kekuasaan yang paling tiranik, tak punya pertimbangan, dan tak dapat dihancurkan" (Porter, 2006: 550).

Pengetahuan merupakan sebagian dari salah satu kegiatan manusia lainnya, tentunya ada relasinya dengan kehendak untuk berkuasa. Dalam pandangan radikalnya Nietzsche, pengetahuan tidak disusun atas dasar fakta-fakta obyektif atau realita, melainkan terbatas pada tafsir atas metafora (2002:45). Dalam makna lain, pengetahuan menjadi bersifat rekaan, menyembunyikan hasrat kuasa penyusunnya. Tafsir tidaklah netral atau bebas nilai, namun di sini tafsir terkuat muncul sebagai tanda bekerjanya kekuasaan tertinggi yang melingkupinya (Agusta, 2012: 11). Nietzsche melihat pengetahuan itu dalam kerangka yang lebih luas dan general dalam rangka memahami manusia secara utuh. Ia memasukkan unsur yang tidak dibahas oleh pemikir epistemologi sebelumnya tentang motif kegiatan pengetahuan (Santoso et al. 2015: 57).

Foucault menunjukan kekuasaan tidak hanya refresif, tetapi juga penghasil pengetahuan (produktif) (Haryatmoko, 2016: 24). Kekuasaan menurutnya bukanlah suatu kepemilikan yang identik dengan suatu kategori sosial (seperti kelas misalnya), namun merupakan strategi. Seperti yang dikatakan Haryatmoko (2002: 8-21)

> Secara umum harus diakui bahwa kekuasaan lebih beroprasi daripada dimiliki. Kekuasaan tidak merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan kelas dominan, tetapi akibat dari keseluruhan posisi strategisnya, akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi.

Yang dimaksud dengan strategi menurut Foucault dalam Haryatmoko (2016:29)

> Strategi itu ialah "jaringan di mana rangsangan tubuh, intensifikasi kenikmatan, ajakan berwacana, pembentukan pengetahuan, pelaksanaan kontrol dan perlawanan, terkait satu dengan yang lain sesuai dengan strategi besar pengetahuan dan kekuasaan".

Menurut Foucault ilmu pengetahuan dan kekuasaan bersifat diskontinu. Diskontinuitas-diskontinuitas telah mematahkan seri-seri panjang sejarah yang merupakan evolusi pemikiran manusia yakni sejarah, pemikiran, ide-ide, dan pengetahuan sebagai sesuatu yang bersifat kontinu atau kumulatif (1976:7-8). Dalam pandangan Foucault, diskursus bukanlah maniefestasi subyek yang berfikir dalam arti tidak bersifat universal, melainkan satu totalitas tempat bergantung dispersi si subyek dan diskontinuitas dengan dirinya yakni terbatas pada konteks waktu dan tempat tertentu (2012:106). Diskontinuitas inilah yang menjadi pokok kritik Foucault terhadap sejarawan dan ilmuan sebelumnya yang beranggapan bahwa setiap peristiwa sejarah merupakan rentetan kesinambungan *(continue)* atau kumulatif. Demikian dalam Arkeologi Pengetahuan, Foucault mengatakan; "kecenderungan-kecenderungan yang terjadi selama berabad-abad dan kemudian disebut kontinuitas, akumulasi gerak sejarah yang mengalir pelan" (2012:15).

Foucault dikenal sebagai filsuf anti finalis, dalam artian Foucault menentang pembacaan sejarah secara kontinu. Konsepsi sejarah baginya memperhitungkan adanya keterputusan, diskontinuitas, kontradiksi. Pembacaan ini justeru memperlihatkan lebih baik dari berbagai macam representasi dunia,

maka konsep kekuasaan bagi Foucault ada ikatannya dengan perubahan sejarah (Haryatmoko, 2016: 11-12). Diskontinuitas tersebut justeru mejadikan sebuah bahan pencarian retakan *(reptures),* dan selaan-selaan *(interruption)* yang datang tiba-tiba "aktus-aktus epistemologis dan ambang batas-ambang batas" yang mampu membawa mereka pada pembacaan bergesernya sistem pemikiran ke arah yang berlawanan (Foucault, 2012:17). Menururutnya tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan (Haryatmoko, 2016:17). Demikian Pip Jones (2009:204) mengatakan;

> Menurut Foucault, kekuasaan dijalankan dalam dua cara: Pertama, kekuasaan dilaksanakan agar suatu wacana terwujud. Kedua, kekuasaan dilaksanakan oleh suatu wacana, karena kekuasaan menentukan identitas ...praktik diskursif adalah akar kehidupan sosial, pelaksanaan kekuasaan melalui wacana ada di mana-mana. Bagi Foucault identitas ditentukan oleh wacananya. Inilah tema penting

Foucault yang dimaksud dengan kuasa dan pengetahuan bukanlah eksternal satu dengan yang lainnya. Mereka berjalan dalam sejarah sebagai satu model yang saling mengikat dan saling menghubungkan secara internal antara pengetahuan dan kuasa (Santoso et al. 2015:181). Oleh sebab itu, diskursus harus dilihat sebagai sebuah *episteme* (sistem pemikiran) yang memungkinkan lahirnya pengetahuan-pengetahuan dan teori-teori dalam masa tertentu *(given period)* dan wilayah tertentu *(given domain)* (Santoso et al. 2015:166). Diskursus juga bukan hanya sekedar bahasa melainkan arsip yang disebut dalam terminologi arkeologi secara metaforis adalah *Historical a priori* yaitu aturan yang menentukan ciri-ciri

suatu praktek diskursif (Flynn, 1994: 29). Diskursus harus dilihat sebagai sistem yang membentuk cara kita memandang realitas (Mills, 2003: 55).

Oleh karena itu, statemen dalam suatu bentuk diskursif dikaitkan dengan *enunciative modalities*, yaitu suatu aturan atau hukum yang beroprasi di belakang statemen yang variatif itu (Santoso et al. 2015:175). Dengan istilah lain diskursus bukan sebatas instrumen, namun lebih dalam, kompleks, dan holistik. Diskursus adalah sesuatu yang menciptakan dunia, melahirkan pengetahuan dan kebenaran, memberikan otoritas dan kekuasaan pada orang-orang tertentu untuk bersuara (Pinem, 2014:3). Jadi, jika membahas diskursus mengenai *Wilayat al-Faqih*, kita harus memposisikan seluruh pengetahuan tentang *Wilayat al-Faqih* sebagai sebuah sistem pemikiran *(episteme)* yang memiliki regulasi tersendiri dan terbatas pada konteks ruang dan waktu (historis) yang spesifik. Kita tidak dapat mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Wilayat al-Faqih* merupakan suatu yang disusun melalui proses perlintasan *(trajectory)* sejarah yang bersifat kumulatif dan progresif, tetapi harus dilihat dalam periode tertentu dan wilayah tertentu dan terbedakan dengan priode dan wilayah lainnya.

Pernyataan *(statement)* mendapatkan posisi sentral dalam tema diskursus, menjadi tujuan utama dalam rangka pebahasan diskursus. Foucault (2012: 147) mengatakan:

> Di beberapa tempat saya menggunakan istilah "pernyataan" untuk membicarakan sekelompok penyatuan (seolah-olah saya sedang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa individual dan terisolasi) atau membedakan pernyataan dari kelompok yang saya sebut "diskursus" (seperti "bagian" dibedakan dari "keseluruhan"). ...pernyataan-pernyataan muncul muncul sebagai sebuah elemen *ultimate* dan tak dapat diurai sehingga bisa diisolasi dan diletakkan ke dalam serangkaian relasi-relasi dengan elemen-elemen lain yang sejenis. Satu titik yang tak punya permukaaan, tapi bisa ditentukan lokasinya dalam kawasan divisi dan di dalam

> bentuk-bentuk pengelompokan yang spesifik. Satu biji zarah yang muncul dari permukaan kelompok sel *(tissue)* yang merupakan elemen konstituen. Peryataan adalah atom diskursus.

Oleh karenanya, pernyataan bukan sebuah satuan, melainkan sebuah fungsi yang berada di luar domain struktur-struktur dan kesatuan-kesatuan serta menyajikan struktur dan keputusan tersebut dalam muatan konkret pada ruang dan waktu, dalam hal inilah pernyataan juga adalah sebuah fungsi eksistensi (Foucault, 2012:159). Kalau misalkan dalam *Wilayat al-Faqih* kita dapat menganalisa hal yang telah hadir di dalam dokumen-dokumen sejarah, opini, riset, buku ilmiah dan lain sebagainya yang menunjuk sebuah fungsi yang mengandung formasi diskursif yang kemudian membentuk diskursus *Wilayat al-Faqih*.

### E.1.2. Arkeologi dan Genealogi

Formasi-formasi diskursif itu menampilkan level pernyataan, sehingga membentuk pernyataan-pernyataan yang terbatas bila sekelompok syarat-syarat eksistensinya (regulasi formasinya) telah terpenuhi dan sangat bersifat historis dari awal sampai akhir (Foucault, 2012: 214). Keterbatas pernyataan ini bersifat diskontinu dan transformatif, dan bisa berubah menjadi bentuk diskursus yang lain. Lazimnya diskursus yang baru lebih *up to date* dan dianggap ilmiah daripada diskursus yang lama. Hal ini membawa kita pada dua metode Foucault yang lain yaitu Arkeologi dan Genealogi. Arkeologi bagi Foucault bukan sesuatu yang berhubungan dengan geologi tidak juga berhubungan dengan genealogi, melainkan untuk menguji arsip. Arsip adalah kesatuan sistemik suatu pernyataan dan proses transformasi sistem-sistem pernyataan (Smart, 2002: 40), arsip juga merupakan sistem-sistem yang memantapkan pernyataan-pernyataan baik sebagai peristiwa (kondisi dan wilayah pemunculannya) atau sebagai sesuatu yang

sifatnya material (kemungkinan dan bidang penerapannya) (Santoso et al. 2015:165). Meskipun pada awalnya Foucault memisahkan antara arkeologi dan genealogi, tapi pada akhirnya Foucault tidak bisa memisahkannya meskipun karirnya berbeda dan keduanya tidak saling mengasingkan seperti ombak yang berkejaran kemudian pecah di pantai (Santoso et al. 2015:165).

Arsip mempunyai dua sisi pandang yang berbeda yaitu sisi pandang arkeologi dan genealogi. Pertama arsip merupakan deskripsi pernyataan yang hadir pada masa tertentu yakni sebagai wujud diskursus yang membentuk sistem pernyataan sehinnga tugas arkeologi adalah untuk menganalisa *historical a priori* (apriori sejarah) atau sistem pemikiran *(episteme).* Oleh karenanya arsip bukan diperlakukan selayaknya dokumen semata, tapi diperlakukan sebagai monumen yang menandakan suatu zaman untuk menunjukan struktur diskursus yang berlaku, yang disebarkan, diserap, dan menggerakan kehidupan masyarakat (Cutting, 2005:40). Arsip bukan mencari suatu tujuan tertentu *(teleology)* yang mengasumsikan adanya perkembangan atau kemunduran, tapi untuk membantu kita untuk melihat bahwa masa kini adalah sama asingnya dengan masa silam (Kendall & Wickham, 1999:4). Kedua, arsip memperlihatkan pergeseran ke dalam bentuk yang lain (transformasi sistem pernyataan) yakni metode genealogis. Genealogi menolak penyebarat metahistoris atas signifikansi-signifikansi ideal dan teleologi-teleologi yang tak terbatas. Genealogi mempertentangkan dirinya untuk pencarian "asal-usul" (Foucault, 1977: 140). Tugas genealogi adalah mengidentifikasikan aksiden-aksiden, penyimpangan-penyimpangan kecil *(the minute deviations),* atau sebaliknya (Santoso et al. 2015:169). Yudi Latif

mengatakan “Genealogi memfokuskan diri pada retakan-retakan, pada kondisikondisi sinkronik dan pada tumpang tindihnya pengetahuan yang bersifat akademis dengan kenangan-kenangan yang bersifat lokal” (2012: 7). Genealogi di sini berguna untuk memperhatikan dinamika, transformasi dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan historis dari masyarakat muslim Syiah Indonesia. Sehingga penulis akan menerapkan pembacaan genealogis pada penelitian ini. Penelitian ini juga akan menempatkan keadaan-keadaan sinkronik (perubahan pada saat-saat tertentu) dalam kerangka waktu yang diakronik (lama-sinambung). Kita bisa melihat, misalnya masyarakat muslim Syiah, bagaimana pengetahuan tentang *Wilayat al-Faqih* itu dibangun, dengan struktur diskursifnya, yang melibatkan banyak lembaga sosial dan pembentukan subjek disiplin *(docile body)* yang dengan begitu kian mempertahankan atau malah mengubah sistem pengetahuan tersebut.

### E.1.3. Regime of Truth

Di samping semuanya itu, berhubungan erat dengan yang namanya *regime of truth*, yaitu satu sistem yang mengatur produksi, penetapan, distribusi, sirkulasi dan operasi diskursus (Foucault, 1980:133). Foucault (1997:113-114) mendefinisikan kuasa sebagai berikut:

> Kekuasaan saya rasa harus dipahami pertama sebagai bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; kedua, permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh, memutarbaliknya; ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung, sehingga membentuk rangkaian atau sistem, atau sebaliknya, kesenjangan, dan kontradiksi yang saling mengucilkan; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial.

Dalam setiap rezim tentunya selalu mengandaikan pembentukan tentang apa yang benar, dalam arti bukan menyampaikan kebenaran *(true utterance)*, melainkan pembentukan ruang *(establishing domain)* atau kondisi yang memungkinkan *(condition necessary)* sehingga apapun sesuatu yang benar atau salah dapat tertata dan bersangkut paut satu sama lain (hubungan kekuatan) (Mills, 2003: 74; McHoul &Grace, 2002: 58). Dalam konteks ini Foucault melihat pengetahuan bukan hanya sebatas dari larangan atau legitimasinya, namun yang dilihat adalah proses bagaimana pengetahuan itu mampu diterima masyarakat atas produksi kebenaran dari kekuasaan, sebagai normalisasi yang berbentuk common sense (Mills, 2003: 74). Produksi kebenaran tersebut, terjadi dalam suatu masa kekuasaan tertentu. Setiap perubahan kekuasaan selalu diikuti dengan pengorganisasian ulang mengenai pengetahuan dan kebenaran (Rouse, 2005: 95). Oleh sebab itu, pengetahuan dan kebenaran selalu dibentuk pada masa-masa tertentu dengan rezim yang berbeda-beda. Produksi kebenaran juga tidak independen, melainkan dependen mempunyai hubungan ekonomi, dan politik tertentu. Foucault (1980: 131-132) mencirikan produksi kebenaran dengan lima sifat, yaitu (1) truth berpusat pada diskursus ilmiah dan pada institusi yang memproduksinya; (2) tunduk pada dorongan ekonomi dan politik; (3) truth adalah objek yang berada di bawah bentuk-bentuk yang beragam, penyebarannya dan konsumsinya dalam jumlah yang besar; (4) truth diproduksi dan ditranmisikan di bawah kontrol aparatur ekonomi dan politik yang besar; (5) truth merupakan keseluruhan isu perdebatan politik dan konfrontasi sosial.

Jika kita lihat dalam regulasi Aliran Islam yang terlegitimasi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), misalnya pada Keputusan Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1984 tentang Faham Syi'ah, MUI dengan tegas menghimbau kepada seluruh masyarakat Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah* agar senantiasa mewaspadai aliran Syi'ah dikarenakan mereka berfaham *Imamah* (konsep pemerintahan Islam Iran), dan *Imamah* bagi mereka adala sebagian dari rukun Islam sehingga ditakutkan mengancam kedaulatan NKRI. Namun, dalam hal ini kita harus melihat dalam kerangka *regime of truth,* dalam artian bagaimana suatu rezime kekuasaan yang mengeluarkan regulasi tersebut menyediakan ruang-ruang untuk mengatur diskursus-diskursus (wacana) tentang *Wilayat al-Faqih* atau *Imamah* dalam keyakinan Syiah atas dasar asumsi 'benar' atau 'salah', dan bagaimana sehingga ruang-ruang yang ada menciptakan metode untuk menentukan apa yang benar dan salah tentang *Wilayat al-Faqih*. Melaui peran Kementerian Agama atau MUI, misalnya, di mana diskursus *Wilayat al-Faqih* diatur sedemikian rupa sehingga menjadi *common sense* bagi masyarakat.

Oleh karenanya, sangat penting melihat konteks historis, genealogi, dan arkeologi pembentukan pengetahuan tentang Syiah dan *Wilayat al-Faqih* secara spesifik. Kita harus melihat dasar-dasar regulasi tentang Aliran Kepercayaan khususnya tentang Syiah sebagai sistem pengetahuan yang memiliki pembentukannya sendiri, berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dioperasikan untuk menghasilkan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu menghasilkan kekuasaan mengenai *Wilayat al-Faqih,* yakni menyangkut batasan-batasan

pengetahuan tentang Syiah, objeknya, konsepnya, dan lain sebagainya atau *regime of truth*nya sebagaimana yang tadi dijelaskan.

### E.1.4. Pembentukan Diskursus

Selain itu, kita juga harus melihat diskursus Syiah dan *Wilayat al-Faqih* di Indonesia sebagai praktik pendisiplinan yang bertujuan untuk membentuk subyek-subyek yang patuh. Hal ini membantu kita untuk melihat pergeseran episteme masyarakat Syiah dari waktu ke waktu yang dapat dilihat dari bagaimana elemen-elemen diskursus *Wilayat al-Faqih* diimplementasikan, disebarkan, dimunculkan, dibatasi, dihilangkan dan lain-lain. Pada intinya pengetahuan tentang Syiah dan *Wilayat al-Faqih* yang terbentuk selama ini bukan lah hasil dari perkembangan rasionalitas manusia, namun hasil dari produksi kekuasaan tertentu.

Seluruh kompleksitas diskursus ini memiliki strukturnya, yang saya sebutkan di atas sebagai aturan-aturan formasi *(rules of formation)* yang terdiri dari (1) pembentukan obyek; (2) modalitas penyampaian; (3) pembentukan konsep dan; (4) pembentukan strategi-strategi. Pembentukan obyek dilihat sebagai sesuatu yang dinamai, digambarkan, dianalisa kemudian direaktifasi, didefinisi ulang, dibantah dan dihilangkan. Dalam analisis Foucault (2012: 82-97), ada pertanyaan "apa yang mengatur eksistensi semua itu sebagai obyek diskursus?" (a) pertama-tama, kita harus memetakan permukaan kemunculan *(surface of emergence)* obyek-obyek tersebut pertama kali: memperlihatkan dimana perbedaanperbedaannya, berdasarkan tingkat rasionalisasi, kode-kode konseptual dan tipe-tipe teori; (b) kita mesti mendeskripsikan otoritas yang terdapat di dalam pembatasan-pembatasan ini. Hal ini berkaitan dengan "siapa" atau "institusi apa"

yang memiliki otoritas dalam menentukan obyek-obyek; (c) terakhir kita juga harus melihat jaringan spesifikasi, yakni sistem-sistem yang dibagi, dipertentangkan, dihubungkan, dikelompokkan ulang, diklasifikasi, diambil dari sistem lai sebagai obyek diskursus *Wilayat al-Faqih*.

Selanjutnya, setelah memetakan pembentukan obyek-obyek, kita harus melihat modalitas penyampaian dalam diskursus. Modalitas penyampaian (Foucault, 2012: 98-106) berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Apa yang menghubungkan mereka satu sama lain?", "Kepastian-kepastian apa yang mengikat mereka?", "Kenapa kepastiannya seperti ini dan itu, bukan seperti yang lainnya?" Sebelum kita menjawabnya, pertama kita harus menemukan hukum-hukum operasi yang berlaku di balik pernyataan-pernyataan ini dan menentukan dari mana mereka datang. *Pertama,* siapa yang berbicara? Hal ini menunjuk kepada hak yang diberikan terhadap seseorang untuk berbicara dalam "bahasa" *(language)* tertentu. Sehingga ada pertanyaan "siapa yang kualifaid untuk itu". *Kedua,* kita harus mendeskripsikan situs-situs intsitusional tempat seseorang yang berhak dan kualifaid tadi mengembangkan diskursusnya, dan dari sisnila diskursus tersebut menerima sumber-sumber dan titik aplikasinya (obyek-obyek spesifik dan instrumen-instrumen verifikasinya). *Ketiga,* bagaimana posisi dari satu subyek juga ditentukan oleh situasi yang memungkinkan seseorang tadi untuk saling berhubungan dalam satu diskursus, situasi tentang batas-batas diskursus, ketersediaan instrumen yang digunakan.

Demikian, kita harus melihat pembentukan konsep. Konsep adalah sesuatu yang dipelajari dan dibangun. Konsep juga merupakan istilah atau ide yang secara

rutin dan sering dipakai di area tertentu yang menghasilkan bahasanya yang unik dan eksklusif, sehingga setiap orang berfikir, berbicara dan menulis dalam kerangka bentuk konsep tersebut (Pinem, 2014: 4). *Pertama,* konsep-konsep memiliki susunan rangkaian penyampaiannya sendiri, tipe-tipe pernyataannya sendiri, dan skema-skema retorikalnya sendiri. *Kedua,* wilayah penyampaian juga melibatkan bentuk-bentuk koeksistensi yang memerlukan satu wilayah kehadiran. Wilayah kehadiran ini menunjukkan spesifikasi waktu dan tempat yang berbeda dengan wilayah kehadiran lainnya dan wilayah kehadiran menunjukkan kemunculan konsep secara bersamaan (Foucault, 2012: 109- 110). *Ketiga,* kita harus menentukan prosedur-prosedur intervensi yang mungkin diterapkan pada pernyataan-pernyataan *(statement).* Prosedur ini tidak sama untuk setiap formasi diskursif, yakni prosedur tersebut dipakai untuk menyisihkan formasi-formasi yang tidak dikehendaki. Prosedur meliputi teknik-teknik, pola-pola penerjemahan, taksiran-taksiran, metode-metode sistematisasi, dan metode-metode distribusi (Foucault, 2012: 111-112).

Elemen aturan formasi diskursus terakhir adalah pembentukan strategi-strategi. Strategi adalah kesatuan teori dari ketiga elemen aturan formasi diskursus sebelumnya (Foucault, 2012:121). Foucault (2012: 123-131) menjelaskan tujuan risetnya dengan tiga kesimpulan. Pertama, melalui titik-titik (difraksi) sistematisasi yang saling berhubungan. Hal ini menjelaskan tentang bagaimana konsep-konsep, modalitas penyampaian dan objek-objek yang berbeda *(titik ketidaksebandingan)* dapat diabstraksi sedemikian rupa dan dijelaskan dengan cara yang sama. *Kedua,* yakni pengaturan konstelasi diskursif, dengan ini,

Foucault ingin membongkar diskursus yang seolah-olah menyatu dan kumulatif dengan melihat penghubungan di antara ragam diskursus yang ada. *Ketiga*, hubungan antar diskursus ini juga harus dilihat dalam hubungannya dengan wilayah praktek-praktek non-diskursif (otoritas lain). Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pembentukan teoritis sebagaimana terjadi pada poin pertama dan kedua harus dilihat dalam hubungannya dengan sesuatu yang di luar teoritis.

**E.1.5. Diskontinuitas Diskursus**

Pembentukan diskursus *Wilayat al-Faqih* tidak hanya membuka peluang munculnya diskursus yang sudah ada, namun sekaligus dapat menemukan domain baru bagi munculnya calon diskursus *Wilayat al-Faqih* lainnya. Domain yang digunakan suksesi suatu diskursus tersebut adalah berupa suatu kejanggalan.

Kejanggalan yang menguat menghasilkan sebuah kontradiksi *Wilayat al-Faqih*. Menurut Foucault (2002: 150-179), terdapat dua level kontradiksi *pertama*, kontradiksi penampakan, yang telah didamaikan dalam kesatuan diskursus Islam *(Wilayat al-Faqih)* yang lama. *Kedua*, kontradiksi fondasi, yang melahirkan diskursus Islam *(Wilayat al-Faqih)* yang baru. Analisis diarahkan kepada tipe-tipe kontradiksi negara Islam *(sistem Wilayat al-Faqih)*, perbedaan pada levelnya sesuai dengan kemampuan kontradiksi tersebut dipetakan, dan perbedaan peran terhadap diskursus *Wilayat al-Faqih* yang bisa dianalisis.

Sebuah kontradiksi yang memuncak menghasilkan transformasi atau diskontinuitas diskursus. Diskontinuitas adalah praktik untuk menghasilkan perbedaan, diferensiasi atau distingsi dari diskursus Islam dan Demokrasi Pancasila sebelumnya.

### E.2. Kerangka Konseptual

#### E.2.1. Syi'ah dan Imamah

Syiah adalah aliran politik Islam yang tertua (Zahroh, 1992:25). Syiah selalu diidentikkan dengan pengikut Sayyidina Ali k.w. karena, istilah Syi'ah sendiri brasal dari kata *Syi'atu Ali* (partai atau pengikut Ali) (Shihbudi, 2007:66). Kelompok ini mengalami penindasan yang sangat lama bahkan bisa dikatakan sebagai korban genosida terbesar oleh Dinasti Mu'awiyah. Kepemimpinan Mu'awiyah ini lah yang telah mendorong ekstrimitas kelompok Syiah dalam menghormati Ali.

Murtadha Muthahhari mengatakan, "Ali adalah sahabat Nabi seperti juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Tetapi Ali lebih baik, lebih terdidik, lebih saleh, dan lebih berkemempuan ketimbang para sahabat lainnya, dan bahwa Nabi sudah merencanakannya sebagai pengganti beliau" (Shihbudi, 2007:66). Dalam hal ini Ali diyakini sebagai pewaris otoritas rohani dan politik dari Rasulullah. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukaddimah seperti yang dikutip Abu Zahroh (1992: 25-26) yaitu asas atau pondasi aliran Syiah adalah "Imamah (kepemimpinan) bukan kemaslahatan umum yang diserahkan kepada pandangan ummat, dan ketentuan Islam yang tidak boleh diabaikan oleh setiap Nabi untuk diserahkan kepada ummatnya; bahwa wajib ditentukan imam untuk mereka, imam ini ma'shum (terpelihara) dari dosa-dosa besar atau kecil." Imam adalah manusia ideal wakil Tuhan yaitu manusia teomorfis *(theomorphic)* yang dalam dirinya ada Roh Tuhan telah menempati separuh wujudnya (Syari'ati,

2013: 177). Imam adalah pelopor kemanusiaan, ia ditunjuk oleh Tuhan sebagai penghubung dan perantara antara dunia ghaib dan ras manusia (Mujtaba, 2004:164)

Dari doktrin Imam ini, muncul konsep Imamah yang melahirkan sistem *Wilayat al-Faqih.* Syi'ah menganggap Imamah layaknya kenabian, menjadi kepercayaan paling fundamental, dan menaatinya adalah kewajiban agama (Vaezi, 2006:71). Konsep Imamah (kepemimpinan agama dan politik) ini sangat berpengaruh terhadap gagasan mereka tentang negara dan pemerintahan Islam, yang mana menjadikan *Mullah* (para ulama) sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang politik dan agama (Shihbudi, 2007:67).

**E.2.2. Wilayat al-Faqih**

*Wilayat al-Faqih* adalah pemerintahan Islam yang mana pemimpinnya memiliki syarat-syarat tertentu yaitu pengetahuan dan keadilan (Khumaini, 2010:85). Seorang yang memiliki pengetahuan sudah dipastikan seorang *faqih* (ahli hukum) dan tergolong dalam *Fuqaha* (ulama Syariat) sehingga mampu menciptakan keadilan. *Wilayat al-Faqih* adalah poros sentral pemikiran Syiah kontemporer, di mana pemikiran politik ini berbasiskan perwalian yang bersandar pada seorang *faqih* yang adil, dan kapabel untuk memimpin pemerintahan selama gabinya Imam Maksum (Vaezi, 2006:67). Dari pemikiran ini nampak bahwa *Wilayat al-Faqih* adalah kelanjutan dari Imamah, konsep ini murni sekali hasil dari pemikiran Khomeini yang merupakan pendukung pemerintahan agama (teokrasi), di mana ke absahan seorang pemimpin harus berasal dari Tuhan *(divine legitimacy)* (Anis, 2013:118).

Pemikiran ini menggegerkan dunia pada tahun 1979, yaitu terjadinya revolusi Islam Iran. Revolusi ini, mematahkan dominasi sekulerisme dan liberalisme yang dikhutbahkan Barat ke seluruh dunia. Michel Foucault menyebutnya sebagai "sebuah bentuk politik baru" yang menandai kelahiran format baru "spiritualitas politik". Foucault mengakui kekuatan inspiratif yang besar dari wacana Islam revolusioner, karena baginya dinamika gerakan Islam jauh lebih kuat dari pada gerakan Marxis, Lenin, dan Maois (Janet & Kevin, 2005:209-241)

**E.2.3. Muslim Syiah Indonesia IJABI dan ABI**

Syiah di Indonesia dalam literatur klasik atau modern tercatat sebagai ajaran Islam yang sudah lama di Indonesia, dalam arti Sy'iah sudah berdampingan lama dengan komunitas mayoritas Sunni. Namun, fonomena zaman ini pasca reformasi 1998, marak sekali gerakan anti-Syiah. Meskipun, dahulu sebelum reformasi pernah ada gerakan anti-Syiah tetapi sifatnya lokal, terbatas dan sporadik. Berbeda dengan saat ini, gerakan anti-Syiah sudah bersifat nasional, tak terbatas, dan sistematis.

Pada masa Orde Baru, gerakan penolakan terhadap Syiah didengungkan oleh Presiden Soeharto dan kroninya, karena ditakuti dan dikhawatirkan *"virus"* politik revolusi Islam Syiah di Iran menjadi efek domino bagi Indonesia (Afkar, 2017:38). Namun, yang disayangkan saat ini, gerakan anti-Syiah dikomandoi oleh beberapa ormas yang konsisten menyerang Syiah seperti PERSIS, DDII, dan al-Irsyad al-Islamiyah (Zulkifli, 2013:229-234). Gerakan anti-Syiah ini tergabung dalam organisasi ANAS (Aliansi Nasionalis Anti Syiah), dengan kampanye yang

sangat mengkhawatirkan, menuduh Syiah sebagai aliran menyimpang, ironinya bukan hanya sekedar tuduhan dan pembusukan ajarannya melainkan kekerasan fisik juga merenggut nyawa kelompok Syiah seperti kasus di Sampang, Bogor, Lombok, dan lain sebagainya (Afkar, 2017:38).

Masyarakat Muslim Syiah di Indonesia berada di bawah dua organisasi Ahlul Bait, yaitu IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) dan ABI (Ahlul Bayt Indonesia). Kedua organisasi ini bergerak dibidang dakwah, pendidikan, dan filantrofi layaknya ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah.

IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) adalah ormas keagamaan yang menaungi seluruh madzhab Syiah, baik Ismailiyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan lain sebagainya. IJABI didirikan pada Tanggal 1 Juli 2000, Gedung Asia Afrika Bandung, periode awal IJABI dipimpin oleh DR. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc (sebagai Ketua Dewan Syura) dan DR. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng (sebagai Ketua Umum Tanfidziyah) (ijabi.or.id).

ABI (Ahlul Bayt Indonesia) adalah organisasi keagamaan sama halnya IJABI. Namun, IJABI lebih mengakomodir jamaahnya (non ahlul bait) sedangkan ABI adalah Ahlul Baitnya. Pada Forum Rakernas tanggal 24-25 Juli 2010, ada 9 orang Dewan Pengarah yang juga disebut dengan Tim 9 akhirnya menetapkan pembentukan ormas yang bersifat nasional dengan nama Ahlulbait Indonesia. Ahlulbait Indonesia merupakan organisasi masyarakat independen yang mengusung visi, misi, tujuan dan sejumlah program sebagai kelanjutan forum Silatnas Ahlulbait (ahlulbaitindonesia.or.id).

**E.2.4. Demokrasi Pancasila**

Demokrasi pada umumnya diartikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat”. Memahami demokrasi sangatlah luas dengan berbagai definisi para tokoh filsuf politik. Dalam metode demokrasi menurut Schumpeter (1994:269-273) adalah pengaturan institusional untuk mencapai keputusan-keputusan politik, yang di dalamnya individu-individu dapat memperoleh kekuasaan untuk memutuskan, melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara rakyat. Dengan makna lain, menurut pendapat ini, demokrasi diidentikkan dengan adanya kontestasi atau kompetisi dan partisipasi dalam pemilu (Huntington, 1991:6-7).

Pancasila merupakan sebuah falsafah negara Indonesia sebagai mana Bung Karno menyebutnya dalam bahasa Belanda sebagai *“Philosofiche grondslag”* yang diartikan sebagai pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila ini juga adalah buah *“stenografisch verslag”* yaitu hasil dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dengan cara spontan *(voor de vuist),* sehingga atas lahirnya Pancasila dijadikanlah sebagai *“Democratisch Beginsel”* atau dasar demokrasi yang menjadi dasar negara Indonesia *(Rechts idiologie)* (Odiejo et al. 1963:35-37)

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila didefinisikan sebagai “paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan-ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Darmodiharjo et al. 1991:81). Dalam demokrasi ini, rakyat adalah subyek demokrasi.

## F. Metode Penelitian

### F.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ingin mejelaskan proses transformasi *Wilayat al-Faqih* sebagai sistem pemerintahan yang lahir dari doktrin agama dalam konteks Demokrasi Pancasila yang lahir dari kesepakatan dan ide manusia, oleh karena itu, meliputi ruang lingkup diskursus secara komplek, yaitu pembentukan diskursus, *regime of truth*, dan genealogi. Dalam proses diskursus, semua pengetahuan tentang Syiah adalah hasil konstruksi. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Marvasti, 2004).

Selain itu, penelitian ini mengambil metode kualitatif karena kompleksitas dan interkoneksi dalam proses penyelidikannya, karena secara aktif melibatkan peneliti untuk mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris dengan berbagai cara dan metode (Denzin et.al, 1993: 4-5). Pertimbangannya. Pertama, sebab tidak ada jarak antara peneliti dan objek yang diteliti, karena, peneliti turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Kedua, peneliti mengambil posisi dalam menginterpretasi data namun dalam prosesnya peneliti tetap menjunjung tinggi objektivitas agar dalam kelanjutan prosesnya tidak ditemukan bias-bias hasil penelitian. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan Diskursus besutan Foucault, karena wacana *(discourse)* mentransmisikan dan memproduksi kuasa; wacana mengokohkan kuasa,

namun juga melemahkan kuasa, membuat kuasa menjadi rapuh dan memberi kemungkinan untuk merintangi kuasa (Foucault 1976: 101).

Pendekatan ini diambil karena penelitian ini sesuai dengan analisis Michel Foucault yaitu diskursus sebagaimana dalam karyanya "Arkeologi Pengetahuan" (2012). Di antara pendekatan diskursus adalah mencoba melihat bagaimana pembentukan disiplin pengetahuan dan praktik pendisiplinan dikonstruksi untuk tujuan tertentu dan berhubungan dengan kekuasaan. Untuk memahami ini, peneliti perlu melihat kembali "pernyataan" *(statement)* yang ada. Pernyataan bisa muncul secara verbal dan non verbal *(text).* Namun bukan sekedar makna yang ditangkap, melainkan lebih mendalam, yakni melihat bagaimana elemen-elemen diskursus hadir. Pendekatan kualitatif dipakai untuk menangkap atau menerjemahkan elemen-elemen diskursus yang terdapat di dalam pernyataan yang pada akhirnya menampilkan bentuk pengetahuan dan praktik pendisiplinan yang syarat dengan kekuasaan sehingga membutuhkan "interpretasi yang mendalam" (Marvasti, 2004: 112). Hal ini sangat relevan apabila kita melihat juga bentuk data kualitatif yang lebih halus (soft date) seperti kesan, kata-kata, kalimat, gambar, simbol, dan seterusnya, bukan angka-angka, sebagaimana dalam kuantitatif (Neuman, 2007: 85).

Pendekatan kualitatif juga memiliki pola riset yang sesuai dengan penelitian ini, yakni pola yang non-linear *(non-linear research path).* Pola non-linear yang dimaksud adalah tahapan penelitian yang tidak berurutan

dan baku *(linear and fixed)*, namun bersifat memutar *(cyclical)*, bisa maju bisa mundur dalam setiap capain tahap, sehingga peneliti dapat mendapatkan data baru dan pemahaman baru melalui pola itu (Neuman, 2007: 85). Dalam kerangka teoritis tersebut, hal ini sangat berguna sebab dengan mengambil pernyataan, peneliti dapat kembali lagi melihat elemen-elemen diskursus, interaksi antar diskursus, aturan-aturan diskursus, maupun pergeseran epistemik *(epistemic shift)* yang terjadi.

Dengan pendekatan kualitatif ini, diskursus *Wilayat Al-Faqih* menjadi menarik tidak luput dari suatu jaringan yang ada di dalamnya, yaitu kuasa yang tidak lepas dari pengetahuan begitu juga sebaliknya, sehingga berangkat dari cara pandang seperti ini analisis diskursus kritis berusaha sebisa mungkin mengungkapkan relasi-aturan kekuasaan di dalamnya melalui tindakan, konteks, historis, kekuasaan, pengetahuan, dan ideologi dalam internal Syiah. Maka dari itu, metode kualitatif sangat penting dalam penelitian ini karena dapat mengambil bentuk pemahaman yang lebih tepat dengan kerangka teoritis yang diambil dalam penelitian ini.

**F.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi dua yaitu primer dan sekunder yang mengacu kepada cara memperoleh data, yaitu data langsung (tidak melalui perantara) atau data tidak langsung (melalui perantara). Data langsung di sini berarti melalui wawancara dengan informan dan observasi, sementara data tidak langsung diperoleh dari studi dokumen atau literatur (Silalahi, 2010: 289-291). Data dalam penelitian

ini, baik primer maupun sekunder menampilkan “pernyataan/statement”. Oleh karena itu data diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang muncul dari waktu ke waktu sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Pernyataan diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau dari objek yang menyaksikan atau terlibat langsung dalam fenomena yang sedang dikaji, seperti wawancara dan observasi maupun dari telaah kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan atau berita di media massa.

### F.3. Teknik Pengumpulan Data

#### F.3.1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ada dua teknik wawancara. Pertama, wawancara secara mendalam *(indepth interviews)* sebab peneliti ingin memahami makna yang dalam yang terkandung dalam informan, yakni dalam arti peneliti ingin memahami bagaimana si informan melihat dunianya (Marvasti, 2004: 21). Dalam metode penelitian ini, wawancara merupakan teknik yang dipakai untuk melihat susunan diskursus yang ada yang meliputi si informan melalui informasi yang diberikan olehnya. Wawancara mendalam ini penting sebab dapat memberikan data yang lebih autentik dan menangkap persepsi-persepsi tersembunyi *(hidden perceptions)* di balik informan yang sangat penting dalam melihat bentuk diskursus *Wilayat Al-Faqih*. Analisa diskursus Foucault ingin mengangkat serangkaian praktek diskursus yang berada di balik pernyataan (Mills, 2003: 54), oleh sebab itu sangat memerlukan wawancara mendalam. Kedua, wawancara terstruktur adalah wawancara

yang mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan meliputi serajah, aktor, strategi, tempat dan tentunya makna dan filosofi di dalamnya terkait diskursus dan tema yang peneliti angkat.

**F.3.2. Observasi**

Observasi dilakukan dalam arti melihat *"atmosfer"* dalam suatu lingkungan yang diobservasi. Atmosfer yang dimaksud di sini ialah hal-hal yang terlihat yang meliputi aspek fisik (manusia, tindakan) dan aspek non-fisik (hubungan sosial, identitas) sehingga peneliti dapat menangkap keseluruhan gambaran dari lingkungan tersebut (Neuman, 2007: 287-288). Maka, keseluruhan gambaran ini akan menampilkan data-data otentik yang original sebab peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati maupun berpartisipasi sehingga peneliti dapat memahami makna-makna yang berada dalam lingkungan.

Observasi ini dilakukan pada:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IJABI dan ABI, meliputi pengajian, ritual, seminar, dan kegiatan filantrofi.

2. Mencari wacana Syiah pada komunitas Ormas Islam di Indonesia yaitu NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan yang lainnya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi dalam ormas-ormas Islam tersebut.

3. Menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi anti-Syiah sepert ANAS (Aliansi Nasionalis Anti Syiah).

### F.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bagian dalam pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (Silalahi, 2010: 291). Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang mempunyai kelebihan dibandingkan teknik lainnya, sebab tidak semuanya kejadian atau peristiwa terekam oleh panca indera atau memori setiap orang. Dalam penelitian ini, studi dokumen menjadi penting untuk melihat hal-hal di masa lampau yang, mengacu pada kerangka teoritik dalam penelitian ini. Namun, sebagai tambahan, dokumen dalam penelitian ini tidak diperlukan hanya sebatas kumpulan catatan atau tulisan, tetapi sebagai monumen yang menunjukkan bentuk-bentuk diskursus yang ada.

### F.3.4. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang berhubungan dengan peneliti dalam rangka mencari dan dapat memberikan data penelitian yang dibutuhkan (Neuman, 2007: 299). Informan juga dilihat sebagai orang yang ahli mengenai letak dan akses informasi yang dibutuhkan bagi peneliti yang tidak bersedia memberikan informasinya kepada orang sembarangan. Oleh sebab itu, informan dapat dipetakan sebagai orang yang (1) dapat menjawab pertanyaanpertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh orang lain; (2) orang yang dapat merekomendasikan peneliti kepada

informan lain dengan kapasitas pengetahuan yang kurang lebih sama; (3) menyediakan akses dan mengembangkan kesadaran peneliti mengenai bagian-bagian latar dan; (4) orang yang membantu peneliti untuk menafsirkan makna dari observasi peneliti (Marvasti, 2004: 52).

Meninjau kriteria informan tersebut, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu *purposive* dan *snowball*. Yang pertama adalah purposive digunakan dalam situasi dimana peneliti menggunakan justifikasi dalam memilih kasus dengan tujuan tertentu. Hal ini biasanya digunakan pada penelitian eksploratif atau penelitian lapangan (Neuman, 2007: 142) atau dalam istilah lain, penelitian kualitatif. Ada tiga situasi yang sesuai dengan teknik ini. *Pertama*, ketika peneliti memilih kasus-kasus yang unik yang membutuhkan informasi yang juga unik. *Kedua*, penelitian membutuhkan informan yang sulit untuk dijangkau *(difficult-to-reach)* sehingga memerlukan informasi subjektif dan ahli untuk mengidentifikasi sample dalam proyek riset. Dalam penelitian ini, informan yang dicari memang agak sulit, terutama pemakai tokoh-tokoh dan aktor yang terlibat d, sebab memerlukan informasi subjektif terlebih dahulu untuk mendapatkannya. *Ketiga*, ketika peneliti hendak mengidentifikasi tipe-tipe kasus yang khusus untuk melakukan investigasi secara mendalam (Neuman, 2007: 143). Sementara yang kedua, yakni snowball, dipilih sebab untuk mengidentifikasi jaringan informan dalam kasus yang sedang diteliti. Peneliti tertarik dalam jaringan interkoneksi orang maupun organisasi (Neuman, 2007: 145). Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan informan dari tokoh-tokoh di IJABI dan ABI serta yang terkoneksi satu sama lain, dengan kapasitas pengetahuan yang sama dan dapat memberikan informasi terkait kasus penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa informan sebagai berikut:

1. Dewan Syuro IJABI (Jalaluddin Rakhmat)
2. Ketua Tanfidziah IJABI (Syamsuddin Baharuddin)
3. Dewan Syuro ABI (Umar Shahab)
4. Ketua Dewan Dakwah ABI (Muhsin Labib)
5. Jamaah-jamaah Syiah yang berkaitan dengan IJABI dan ABI (Dina Y. Sulaeman, Musa Kazhim)
6. Pemerintah dalam hal ini BIN (As'ad Said Ali)
7. Kalangan Ormas Islam NU, Muhammadiyah, dan Rabithah Alawiyah (Zuhairi Misrawi, Mohamad Anis, Habib Jindan bin Novel, dan Habib Ahmad bin Novel)
8. Akademisi (Usep Abdul Matin0

**F.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam pendekatan kualitatif, analisa data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu *reducing* data, *displaying* data, dan *conclusing* data (Marvasti, 2004: 88-90). Yang pertama merupakan tahap memilah data, mengeliminasi data yang tidak diperlukan, mencari informasi kunci, agar saat peneliti menganalisis dapat lebih fokus dan teratur. Yang kedua, *displaying* data, merupakan tahap sistematisasi data. Data-data yang telah

dipilah kemudian disusun secara sistematis menggunakan kerangka teoritik. Selanjutnya, ketiga, *conclusing* data, adalah tahap menarik makna dari data yang menggambarkan topik penelitian.

## G. Hambatan dan Kemudahan

Pada penelitian ini, penulis menemui beberapa hambatan yang cukup memperlambat proses berjalannya penelitian ini. Di antaranya akses menjangkau informan dari elit pemerintah yang bersangkutan dengan ideologi Negara seperti BPIP yang menjadi tema dari penelitian ini. Juga, penulis kesulitan dalam hal sumber-sumber ilmiah tentang Wali Faqih, meski ada beberapa yang menulis dapati dari para informan yang memberi buku Wilayat Al-Faqih namun dalam Bahasa Arab dan Persi, adapun Bahasa Persi penulis kurang memahami berbeda dengan Bahasa Arab yang sering penulis temui di Pondok Pesantren dan literatur di kampus.

Namun begitu, meski ada hal-hal yang sulit dijangkau oleh peneliti, ada juga kemudahan peneliti mendapatkan informan yang sudah lama akrab dengan peneliti, melalui jaringan-jaringan Syiah yang terkoneksi, baik itu ABI atau IJABI. Ada sebuah kemudahan di mana peneliti dekat dengan tokoh-tokoh Syiah karena kurang lebihnya 4 tahun berada di lingkaran Syiah, dan hampir menjadi Syiah. Terakhir yang paling mudah bagaimana mendapatkan informan dari BIN (Badan Intelejen Negara) meski hanya satu tokoh yang peneliti wawancarai, hal ini mudah karena peneliti sudah lumayan lama bermintra dengan BIN dalam hal dakwah melaui lembaga Al-Mahabbah untuk meminimalisir gerakan dan paham Islam radikal.

Yang paling penting dari semuanya itu, penilitian ini membawa legitimasi kampus sehingga mudah untuk mendapatkan data, meski ada beberapa kesulitan juga, tapi itu sudah biasa di kalangan para akademisi.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab pertama: berisikan tentang pernyataan penelitian, pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan untuk langkah awal penelitian pembahasan selanjutnya.

Bab kedua: berisikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yakni sejarah IJABI dan ABI dan sejarah diskursus Syiah di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika secara umum objek yang dibahas dalam penelitian yaitu Wilayat Al-Faqih di antara kedua Ormas Syiah.

Bab ketiga: berisi deskripsi hasil dan temuan selama penelitian yang sekaligus menjadi jawaban pertanyaan penelitian yakni bagaimana pembentukan diskursus mengenai Wilayat Al-Faqih yang dilakukan oleh IJABI dan ABI dan bagaimana IJABI dan ABI melakukan transformasi ideologi, sosial-religionya dalam konteks keindonesiaan dan Pancasila.

Bab keempat: yakni bab terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dari semua hasil dan temuan penelitian dan penutup yang juga mencakup saran serta masukan kepada segenap pihak yang terkait terhadap tema penelitian ini. Dalam bab ini juga mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.

# BAB II

## Diskursus Syiah di Indonesia

### A. Diskursus Sunni dan Syiah di Indonesia

Polarisasi ummat Islam sudah terjadi berabad-abad silam, kalau kita hitung dari tahun 657 M, ketika terjadi perang Shiffin yaitu perang saudara paling besar yang melibatkan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib , maka terhitung 1.359 tahun sejarah muslim di dunia terjebak dalam ruangan stagnan politik yang tak berkesudahan akibat perseteruan elite Arab Muslim waktu itu. Saat ini polarisasi itu digunakan oleh orang Islam dan orang yang di luar Islam untuk mencapai kepentingannya terhadap umat Islam, semata-mata hanya pengaruh politik. Sejarah Syi'ah selalu hadir dalam percikan ketidak-adilan, tragedi demi tragedi menindasnya, selama berabad-abad digoncang-gancing penguasa Sunni, oleh karenanya mereka mengembangkan doktrin *taqiyyah* (penyamaran identitas), bahkan mereka tidak berani untuk menampakkan simbol-simbol dan ritual Syiah di tempat umum, demi keberlangsungan hidup mereka, seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam Investigasi Tempo 2012, ia mengatakan:

> Tak beda dengan penganut aliran lainnya. Kami salat di masjid biasa, yang notabene milik ahlul sunnah. Karena tidak ada masjid Syiah di Indonesia. Bukan tak memiliki dana, tapi kami tidak mau menimbulkan provokasi. Kalau mendirikan masjid, nanti malah dibakar. We used things and we love people. Bukan kami tidak cinta masjid. Tapi masjid itu benda, kami lebih cinta manusia. Cinta damai. Kalau mengaku, kami akan diusir. Karena itu kami mempraktikkan taqiyah (bertindak layaknya pemeluk Islam yang berbeda aliran). Tujuannya, menyembunyikan identitas ke-Syiah-an demi persatuan. Jadi biarlah kami menyesuaikan cara beribadah kalian (Sunni), tak apa kami menjadi makmum,

> tidak disebut Syiah juga tak masalah, asal Islam rukun. Kami dahulukan akhlak ketimbang fikih.

Setidaknya ada empat versi terbentuknya aliran Syiah dalam Islam. Pertama, istilah Syiah lahir dari Rasulullah sendiri, dalam arti sudah dilekatkan oleh Rasulullah melalui haditsnya yang berbunyi, "Ali dan Syi'ahnya benar-benar orang yang menang di hari kiamat. Kedua, istilah Syiah dilekatkan kepada orang-orang muslim yang tidak membai'at Abu Bakar ketika peristiwa *Saqifah*, karena meyakini Ali sebagai *washi,* mereka meyakini bahwa *washi* adalah pemegang otoritas keagamaan dan otoritas kepemimpinan politik, yaitu kepala negara *(khalifah)*. Ketiga, term Syiah diidentikkan kepada ummat Islam yang setia kepada Imam Ali setelah peristiwa *tahkim* (arbitrase) yang mengakhiri Perang Shiffin yaitu perselisihan antara Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. (Ma'arif, 2015:36-38). Keempat, istilah Syiah dan terbentuknya Syiah atas konspirasi agen Yahudi yaitu Abdullah bin Saba sebagai actor intelektual di belakangnya. Konon ia juga berperan sebagai orang yang menghambat proses perdamaian antara Sayyidina Ali dan Thalhah dan az Zubair di Bashrah, dia pula lah yang menciptakan ide-ide yang irasional ketika berada di Kuffah, missal Ali yang harus jadi Nabi, Malaikat Jibril keliru menyampaikan wahyu semestinya diturunkan kepada Ali bukan kepada Muhammad. Namun, pendapat terakhir ini sangat tidak logis dan terlampau imajiner dan fiktif, mana mungkin seorang Yahudi dapat memengaruhi sahabat-sahabat besar Nabi saw, tidak habis piker jika sahabat sekelas Ali, Thalhah, dan az Zubair dapat dikelabui oleh seorang Yahudi sehingga upaya damai mereka gagal. (Shihab, 2014:64-65). Abdullah bin Saba seringkali dijadikan isu untuk menstigma masyarakat Syiah dengan kesesatan,

tercatat ada tiga kejanggalan untuk membantah sosok Abdullah bin Saba. Pertama, kesimpangsiuran sosok Abdullah bin Saba, sebagaimana pendapat Ibn Hazm dan Syahrastani bahwasannya Abdullah bin Saba adalah Ibnu Sauda alias dua nama untuk satu orang, namun dalam riwayat lain Ibn Thahir Al-Baghdadi dalam kitabnya At-Tabshirah fid-Diin mengatakan bahwa Ibn Sauda adalah orang lain, bukan Abdullah bin Saba. Kedua, menyoal isi ajaran yang disampaikan Abdullah bin Saba sangat tak rasional, berbeda dengan ajaran Syiah yang lainnya ia meyakini Ali sebagai Tuhan seutuhnya. Ketiga, periwayatnya tentang Abdullah bin Saba pertama kali muncul ada dalam kitab Tarikh Thabari, ia meriwayatkan bahwa kisah Abdullah bin Saba bersumber dari dua orang yaitu Saif bin Umar At-Tamimi dan As-Surri bin Yahya, keduanya adalah orang zindiq, munkar, dan lemah secara periwayatan. Para Ulama Hadits seperti Ibnu Hayyan, Al-Hakim, An-Naisaburi, Ibnu Addiy, Ibnu Mu'in, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan As-Suyuthi menggelarinya sebagai al-Kadzdzab (pendusta). (IKMAL, 2015:33-35).

Sejarah selalu ditulis dan diceritakan, begitu juga dengan sejarah Syiah di Indonesia tidak lepas dari tradisi literatur dan tradisi oral masyarakat Indonesia dalam agama dan budaya, yang mana secara esoterik agama selalu berdampingan dengan tradisi budaya atau disebut dengan *local wisdom*. Syiah di Nusantara dalam beberapa literatur sejarah tercatat sebagai gerakan dan faham Islam pertama yang hadir di tanah Nusantara pada priode pertama islamisasi di Nusantara, banyak para pakar dan sejarawan Islam yang menulis tentang keberadaannya Syiah di awal Islam sperti Abubakar Atjeh, A. Hasyimi, Agus Sunyoto, Azmi Jamil, Fatimi, Kern, dan sebagainya. Namun, beberapa intelektual Muslim

menolak teori yang mengatakan Syi'ah sebagai aliran Islam pertama yang hadir di Indonesia, di antaranya Buya Hamka dan Azyumardi Azra (Zulkifli, 20013:3).

Misal dalam beberapa literatur banyak mencatat sejarah tentang Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah di Perlak Aceh, sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara dibuktikan dengan naskah Deklarasi Kerajaan Perlak tahun 840 M (225 H) dan berbagai simbol-simbol kerajaan yang identik dengan Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. (IKMAL, 2015:77) Syiah sudah menetap lama dalam kepribadian diri masyarakat Indonesia terutama umat Islam, layaknya Asyura yang selalu diperingati oleh berbagai elemen masyarakat dan agama, bukan hanya Islam Syiah atau Sunni melainkan Umat Katholik di pelbagai daerah juga melakukan tradisi yang sama merayakan hari 'Asyura dengan pelbagai ritual tirakat dan sajian hidangan khas 'Asyura seperti Bubur Suro. Perjalanan Syiah yang teramat panjang menurut penulis adalah sebuah perjalan ajaran adiluhung yang mampu menginfiltrasi dan mentransformasikan ajarannya terhadap budaya setempat, kalua kita mengkaji ulang Syiah yang berkembang pesat di Iran mempunyai kesamaan tradisi dengan masyarakat Indonesia, yaitu sama-sama mempercayai ritus-ritus keramat, mistis, dan pelbagai hal yang supra-rasional. Sebagai contoh, masyarakat Iran sangat kental dengan *wafaq* atau *azimat* dengan berbagai rajah yang mereka tulis dalam benda-benda bertuah seperti batu cincin dan lain sebagainya, sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan yang sama.

Sebuah kemiripan itu, menjadi mudah bagi para pemuka agama dari Persia yang datang ke Indonesia untuk berdakwah. Adapun jika kita ambil dua teori yang

paling *shahih* yaitu Persia dan Gujarat, kita akan menemukan karakteristik corak Islam yang sama yaitu bukan sebuah ajaran Islam berbentuk madzhab yang agresif dan ekspansif, melainkan sebuah ajaran Islam yang bercorak etika, rasionalitas, dan local wisdom, yaitu Islam yang bukan hasil doktrin dan paksaan teks, melainkan Islam berdasar pada kesadaran individu, keluarga, dan masyarakatnya. Oleh karenanya juga corak syafi'iyah yang ada di Indonesia sangat lekat dengan kultur Syi'ah, seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rakhmat bahwasannya orang Hadlrami dari kalangan kaum 'Alawiyyin mereka adalah orang-orang Syi'ah yang bermadzhab Syafi'i;

> Kemudian mereka semua secara lahir menganut mazhab Syafi'i. Mereka bertaqiyyah sebagai pengikut mazhab Syafi'i di daerah Yaman, Hadramaut. Sehingga di dalam kamus Munjid edisi lama, pada kata 'Hadramaut' ditulis: sukkanuha syi'iyyuna syafi'iyyuna; penduduknya orang-orang Syi'i yang bermazhab Syafi'i. Saya kira Munjid itu merekam mereka. Dari Hadramaut inilah menyebar para penyebar Islam yang pertama, khususnya kaum 'Alawiy, orang-orang keturunan Sayyid, atau yang mengklaim sebagai keturunan Sayyid. Mereka datang ke Indonesia dan menyebarkan Islam. Tetapi ketika mereka datang ke Indonesia, di luar, mereka Syafi'i, di dalam, mereka Syi'i.

Begitu juga penulis saksikan sendiri di kalangan 'Alawiyyin di Indonesia, sedikit sekali majelis-majelis para Habaib yang sering menyampaikan *maqalah-maqalah* (ucapan nasihat) Ulama Madzhab Syafi'i, meskipun mereka mendeklir diri sebagai sunni madzhab Syafi'i, yang mereka sampaikan adalah nasihat atau ajaran yang diambil dari literasi leluhurnya seperti kisah perjalanan Imam al-Baqir, kisah Imam 'Ali Zainal 'Abidin dan keturunan Rasulullah yang lainnya hingga para Habaib yang menulis syair-syair maulid seperti *Simthuddurar, Ratibul 'Aththas* dan lain sebagainya. Berbeda dengan ulama-ulama atau para kiai kampung yang selalu menyampaikan ajaran Islam Sunninya dengan berbagai

literatur Syafi'iyyah terutama pesantren-pesantren klasik yang masih berinduk kepada literasi Syaikh Nawawi al-Bantani.

Penulis memahami bahwa Syi'ah adalah madzhab keluarga keturunan Rasulullah atau madzhab Bani 'Alawi, baik yang memang betul-betul bermadzhab Imamiyah atau pun di luar itu, karena pada dasarnya mereka sama-sama memuliakan leluhur mereka, bahkan fanatisme hingga pengkultusan. Di Indonesia kaum 'Alawi antara Sunni dan Syi'ah mereka bersaudara sering berdiskusi bareng, bahkan dari satu keturunan itu bisa jadi berbeda pemahaman madzhabnya seperti yang dikatakan oleh Habib Aahmad bin Novel bin Salim Jindan bin Syekh Abu Bakar:

> Kami 'Alawiyin, semuanya bersaudara baik yang Sunni maupun yang Syi'i, tidak ada permasalahan pada kelompok kami, yang mempermaslahkan adalah kelompok di luar kami. Adapun stigma atau labelisasi Syi'ah sesat itu adalah tuduhan dari mereka yang tidak tahu, di mana letak sesatnya syiah? Mereka shalat, puasa, haji, zakat, bahkan syahadat dan al-Qur'annya pun sama, kenapa harus dipermasalahkan? Ya kalau memang di kelompok kami ada gerakan takfiri yaw ajar juga, karena gerakan takfiri itu di semua kelompok ada baik di Sunni atau Syi'i, namun secara pribadi saya dan keluarga, kebetulan kita punya lembaga pesantren dan juga perpustakaan yang dibangun bersama Prof. Quraish Shihab, kita terbuka dengan semua golongan, karena yang salah itu adalah hatinya bukan orangnya.

Memahami kaum 'Alawi ini, kita harus membaca banyak literatur sejarah, karena mereka adalah bagian dari para pendahulu yang mempunyai sumbangsih besar kepada bangsa Indonesia. Kelompok Arab di Indonesia terbagi kepada dua kategori yaitu 'Alawi dan non-'Alawi, mereka memiliki organisasi masing-masing, meski dahulu mereka berhimpun di satu organisasi tertentu yaitu Jami'at Kheir dan PAI (Partai Arab Indonesia), seiring berjalannya waktu terjadi sebuah konflik ideologi dan pemahaman terutama dalam masalah ibadah dan mu'amalah

yaitu perdebatan klasik antara kaum *tuo* dan *mudo*, dalam permasalahan tarekat, bid'ah, dan churafat. Lahirlah organisasi yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Surkati, yaitu perkumpulan Arab yang berpemahaman reformis dan mayoritas bukan 'Alawi, meski ada sebagian kecil 'Alawi yang mengikutinya yaitu Abdullah bin Salim Alattas Tegal (alirsyad.or.id)

Perkembangan ini semakin pesat, sehingga lahirlah organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PERSIS, PERTI, Al-Washliyah, Nahdlatul Wathan, dan al-Khairat, semua organisasi kemasyarakatan tersebut tidak lepas dari perdebatan klasik kaum *tuo* dan *mudo*. Di luar ormas itu semua, bermunculan ormas Islam baru pasca reformasi seperti IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia) dan ABI (Ahlul Bait Indonesia), kehadiran kedua ormas Ahlul Bait ini juga diiringi dengan menjamurnya gerakan purifikasi Islam, pasca Soeharto tumbang justeru yang menjadi *mastermind* (otak dan penggerak utama) sekaligus *footsoldiers* adalah kelompok Islam garis keras ini yang menciptakan kekerasan social-komunal di tengah masyarakat termasuk mempelopori gerakan Anti-Syiah.

Gerakan perlawanan Syi'ah di Iran sangat ditakuti oleh rezim Orde Baru, karena takut virus revolusi yang terjadi di Iran akan menular ke Indonesia lewat para kaum intelektual terutama mahasiswa. Pada tahun 1980, buku-buku karya intelektual Syi'ah disambut hangat oleh para kaum intelektual di Indonesia, bahkan seorang Amien Rais yang dilatarbelakangi Muhammadiyah yang notabene banyak dari kalangan mereka yang anti-syiah, Amien Rais menjadi penerjemah buku Ali Syari'ati yang berjudul "Tugas Cendekiawan Muslim". Hal ini

menunjukan bahwa pemikiran revolusi dan progresif Islam Syi'ah betul-betul mendapatkan angina segar dari kaum intelektual Indonesia. Menurut Jalaluddin Rakhmat, *"Pemerintahan otokrasi Iran dikalahkan oleh revolusi dengan xeroxisasi"* xeroksasi adalah mesin photocopy untuk memperbanyak tulisan khutbah Imam Khomeini dari Prancis. Tumbangnya rezim Syah oleh revolusi Khomeini meretas jarak antarnegara, angin segar revolusi disambut banyak negara seperti Pakistan, India, Malaysia, hingga Indonesia. Di era Orde Baru, pemerintah Indonesia sedang kuat-kuatnya menjalankan kebijaksanaan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dengan cara memberangus segala kegiatan yang berbau politik melalui organisasi di lingkungan kampus, termasuk melarang keberadaan Dewan Mahasiswa. Dari situlah Mahasiswa *ar-Ruju' ila al-Masjid*, kembali ke masjid dan mengembangkan revolusi dari dalam masjid dan menyambut buku-buku dari negeri mullah.

Terjadilah reformasi tahun 1998 pergantian rezim dari Soeharto ke B.J. Habibie, embrio Syiah sudah ada namun belum menampakan dirinya dalam sebuah lembaga organisasi, adapun gerakan intelektual sudah sangat banyak, di sinilah Syi'ah dipahami sebagai gerakan ideologi, bukan sebuah madzhab fiqh yang mengorganisir pemahaman 'ubudiyah dalam sebuah organisasi yang legal dan terlembagakan. Banyak kelompok-kelompok syiah yang hidup secara komunal dengan komunitasnya masing-masing, tentunya masyarakat Arab yang 'Alawi mempunyai kebiasaan berkerumun atau teralokasi dari masyarakat mayoritas Sunni. Kelompok-kelompok kecil ini yang nantinya akan membangun

sebuah lembaga untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan komunitasnya, misal lembaga pendidikan pesantren atau formal, dikarenakan Syiah ini adalah komunitas kecil tentunya mempunyai posisi yang sangat terhimpit bahkan terdiskriminasi oleh kelompok mayoritas hingga ruang geraknya pun dibatasi.

Di tengah masyarakat Sunni, keberadaan Syi'ah tentunya adalah sebuah ancaman bagi Sunni, terutama dalam medan yang sama yaitu dakwah yang dijadikan komoditi bagi golongan tertentu. Munculnya gerakan anti-syiah yang dimotori oleh berbagai ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan lain-lain dalam koalisi yang sama yaitu ANNAS (Aliansi Nasionalis Anti Syi'ah) adalah sebuah respon melawan *(against)* terhadap menjamurnya faham Syi'ah di Indonesia. Komunitas Syiah pada awalnya dianggap sebagai identitas resistensi meski mereka sudah mengisi sejarah Indonesia yang panjang ini, keberadaannya tetap diwaspadai oleh berbagai kelompok yang berkepentingan, termasuk negara di dalamnya, menurut As'ad Said Ali kelompok Syiah adalah kelompok yang berbaha:

> Saya tidak benci sama Syiah, ndak. Hanya karena konsep dia seperti itu, ada 5 juta aja sudah merusak itu, karena dapat dana dari Iran untuk menyebarkan Wilayatul Faqih itu.

Apa yang dikatakan mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) adalah sebuah respon kewaspadaan terhadap gerakan Syi'ah, oleh karena itu Syiah dipahami sebagai identitas resistensi, maka mereka terus berupaya bertransformasi menjadi *project identity*. Namun, di tengan konstruksi justifikasi negatif terhadap Syiah sebagian organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah, melalui para intelektualnya mencobe mengkonstruksi

identitas Syiah sebagai sebuah bagian dari elemen bangsa ini, yang nantinya menjadi sebuah paradigma baru yaitu Islam *wasathiyah* (moderat). Seiring dengan berjalannya waktu gelombang perkembangan syiah yang ditopang oleh proses demokratisasi yang berjalan pada era reformasi, syiah berkembang dari fase individual, institusional, hingga fase organisasional (Zulkifli, 2017:XVI)

## B. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesi (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI) dalam Diskursus Syi'ah dan Wilayatul Faqih di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sejuta keanekaragaman budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan di atas keberagaman tanpa mendiskreditkan kelompok tertentu. Syiah hadir menjadi bagian penting dari Indonesia, tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya pemikiran dan paradigma keberislaman yang moderat justeru mampu menarik simpatik orang untuk masuk dan bergabung menjadi Syiah secara kelembagaan atau pemikiran. Pada tanggal 1 Juli 1992 seorang intelektual terkemuka Dr. Jalaluddin Rakhmat mendirikan lembaga pendidikan Ahlul Bait di Bandung yaitu Yayasan Muthahhari yang mengelola 4 buah pendidikan umum formal di antaranya SMA Plus Muthahhari Kiara Condong, Bandung, SMP Plus Muthahhari Cicalengka, Bandung, SMP Bahtera Bandung, dan Sekolah Cerdas Muthahhari (SCM) Bandung setingkat SD. Yayasan Muthahhari adalah awal pertama Jalaluddin Rakhmat berdakwah melalui lembaga pendidikan yang ia miliki. Penulis melihat, pergerkan dakwah Jalaluddin Rakhmat banyak bergerak di bidang Pendidikan ketimbang pengoptimalan organisasi dan politik, berbeda dengan organisasi Syi'ah seperti Hizbullah di Lebanon. Menurut Usep Abdul

Matin (2016:20) menumbuhkembangkan pikiran potensial dan potensi baik dalam dirinya, keluarganya, jamaahnya serta para muridnya adalah satu pekerjaan rumah yang senantiasa Pak Jalal upayakan.

Kang Jalal, penulis memanggilnya karena sama-sama lahir di tanah pasundan. Ia adalah sosok yang gigih dan tekun, setiap kali penulis mampir kerumahnya, penulis mendapati beliau sedang membaca buku di depan sebuah laptop di kamar kecil di salah satu rumah di Kalibata. Tahun 2014 penulis berkesempatan hadir di majelis pengajian para Muhibbin di Masjid al-Munawwarah tepat belakang rumah Kang Jalal di Bandung, banyak pertanyaan kritis dari jamaah dan para muridnya, Kang Jalal selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan pelik dari muridnya dengan meyakinkan supaya para pelajarnya berpikiran cerdas dan mentalnya terbangun dan terus latihan melalui aktivitas belajar dan ruhani. Karena bagi Kang Jalal, dalam otak manusia ada sel glial *(glial cells)* atau intelek bercair *(liquid intelligence)* yang menajadikan otak manusia mampu berpikir tingkat tinggi, abstrak, kompleks dan filosofis.

Yayasan Muthahhari menjadi tempat untuk mendidik mental para pelajar dan mempelajari seluruh ilmu pengetahuan umum dan agama, yang menarik di Yayasan Muthahhari diajarkan lembaran sejarah yang hampir hilang di tengah perk embangan masyarakat muslim di dunia, yaitu sejarah perjalanan panjang Ahlul Bait dan para Imam. Dalam pengembangan SDM Yayasan Muthahhari telah cukup banyak mencetak manusia-manusia yang berbudi-pekerti baik, cakap, dan melek teknologi, kemampuan akademik yang memadai ini ditopang dengan berbagai fasilitas Yayasan yang mencukupi.

Sosok Kang Jalal bukan hanya saja berkiprah di bidang Pendidikan intelektual, ia juga mendirikan organisasi Islam untuk menghimpun seluruh pecinta Ahlul Bait yaitu IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia. Menurut Kang Jalal (2018), IJABI sendiri sama sekali tidak ada hubungan administratif dengan Yayasan Muthahhari secara kelembagaan, berbeda dengan NU yang memiliki Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau Muhammadiyah yang memiliki Lembaga Pendidikan yang sangat banyak. Hal ini terkonfirmasi dengan tidak terlibatnya civitas akademika Muthahhari dengan IJABI, karena tenaga pengajar di Muthahhari bukan hanya orang Ahlul Bait, banyak juga yang dari luar.

Menurut salah satu anggota Dewan Syuro IJABI, Ustadz Miftah Rakhmat (2018), IJABI adalah sebuah organisasi untuk mewadahi para *muhibbin*, ia mengkategorisasikan antara kedua term *muhibbin* dan *syiah*, keduanya berbeda. IJABI memahami dua kategori ini adalah predikat keimanan atau fase dalam spiritual, bagi orang awam IJABI berada pada posisi Muhibbin (para pecinta Ahlul Bait Nabi), meskipun demikian IJABI lebih cenderung kepada madzhab Syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyah seperti yang diikrarkan dalam deklarasi IJABI dan disetiap pelantikan pengurus untuk mengikuti, patuh, dan taat kepada para *aimmah* yang dua belas. Predikat Syiah itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, ibarat di dalam pemahaman Sufisme ada fase di mana orang awam hanya memahami syari'at, semakin belajar ia masuk ke tahap selanjutnya yaitu tarekat, dan seterusnya hingga ma'rifat sampai hakikat, begitu juga dengan *muhibbin* dan *syiah*.

Kang Jalal seringkali dituduh sebagai Syi'ah *Munharif* (menyimpang) oleh sebagian kaum syiah yang lainnya. Karena ia kerap melakukan *talfiq* (menggabungkan berbagai madzhab), misal seperti yang dikatakan Kang Jalal dalam wawancaranya:

> Ketika dalam suatu kondisi di mana sedang bersama orang sunni, dan masuk waktu shalat sedangkan kita adalah minoritas, maka kita ikut yang mayoritas, tanpa kita mempermasalahkan fiqh atau madzhab kita.

Senada dengan apa yang diamati oleh Usep Abdul Matin, ia mengatakan:

> Dalam beberapa khutbah atau ceramah pengajian Kang Jalal sering melontarkan argumentasi-argumentasi sunni untuk memperkuat pendapat yang diyakininya, bahkan bukan hanya itu Kang Jalal juga banyak mengkutip ilmuwan-ilmuwan Barat.

Terlepas dari kontroversi Kang Jalal, baik itu di internal syiah seperti relasi IJABI dan ABI, atau di eksternal syiah seperti relasi syiah dengan sunni. Ia cukup menjadi sorotan utama tokoh Syiah Indonesia dari pada tokoh lainnya. IJABI menjadi bahtera besar untuk berlayar menyebarkan ajaran Ahlul Bait dan tetap konsisten mengembalikan Pancasila sebagai *modus vivendi* kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah maraknya gerakan yang melupakan Pancasila.

Kehadiran IJABI yang lahir satu tahun pasca reformasi, mampu menampung banyak orang syiah di Indonesia, seperti Umar Shahab, Musa Kadzim, dan lain-lain yang juga adalah bagian dari Yayasan Muthahhari. Seiring berjalannya waktu, menurut Kang Jalal ada beberapah hal yang menjadi hubungan Syiah non-Arab dengan Syiah Arab (keturunan 'Alawi) menjadi renggang, yaitu ada sebagian orang syiah dari keturunan 'Alawi yang merasa ego dengan IJABI, karena IJABI didirikan oleh orang biasa bukan dari keturunan Sayyid *('Alawiyyin),* selanjutnya dalam pandangan teologis dan politik antara IJABI dan

keturunan Sayyid ada beberapa berbedaan yaitu memahami definisi Syi'ah, Muhibbin dan memahami konsep politik Imamah dan Wali Faqih. Konflik internal syi'ah ini cukup berjalan lama, namun akhir-akhir ini sudah lumayan teredam, meski masih ada beberapa khilafiyah yang berbeda.

Tahun 2010 pada tanggal 25 Juli orang-orang Syiah keturunan sayyid mendeklarasikan sebuah organisasi dari hasil keputusan forum rakernas yang diikuti oleh 9 dewan pengarah, dari keputusan itu lahirlah organisasi yang bernama ABI (Ahlul Bait Indonesia). Peran organisasi ABI sama halnya dengan IJABI, namun penulis sangat jarang menemukan literatur yang banyak membahas organisasi tersebut. Penulis menemukan di website resmi ABI bahwa ABI juga dibentuk untuk menjadi wadah dakwah bagi umat, karena menurut salah satu tokoh ABI, Muhsin Labib dalam wawancara ia mengatakan "Syiah itu sangat kecil bila dilembagakan, baik IJABI atau ABI, tapi Syiah itu ada dalam diri manusia yang berfikir rasional".

Terkait organisasi atau lembaga Syiah di Indonesia yang paling di kenal ada empat, yaitu IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia), ABI (Ahlul Bait Indonesia), ICC (Islamic Cultural Center), dan terakhir IKMAL (Ikatan Alumni Jami'ah al-Musthafa) atau Alumni Qum sebuah Universitas Syi'ah terbesar di Iran. Keempat lembaga ini cukup berperan penting dalam membangun pendidikan dan citra Syiah sebagai wajah Islam yang damai. Mayoritas dari keempatnya juga adalah penganut madzhab Syiah Itsna Asy'ariyah atau Syiah Imamiyah, meski di Indonesia sendiri tidak hanya ada satu golongan Syi'ah, menurut Adlin Sila (2017:69) ada tiga kelompok Syiah di Indonesia yaitu Ghulat, Rafidhah, dan

Mu'tadilah. Pertama, Ghulat adalah sekte Syiah yang menuhankan Ali dan faham ini ditolak oleh kelompok mayoritas Syiah di Indonesia. Kedua adalah Syi'ah Rafidhah kelompok ini juga tertolak dan ditolak oleh aghlabiyah (mayoritas) umat Islam Syi'ah di Indonesia, namun kelompok ini tentu adanya misal seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam wawancara dengan penulis yaitu;

> Ada Syi'ah yang dibentuk oleh London atau dikenal dengan sebutan Syi'ah London atau Syiah Inggris, pimpinannya adalah Yasser Al-Habib dan Shadiq Shirazi kelompok ini kerap kali menghina simbol-simbol Sunni bahkan mengkafirkan di luar golongannya termasuk Syi'ah di Iran Sendiri, Syiah pengikut As-Shirazi di Indonesia dianut oleh sebuah oraganisasi syiah yang menamakan dirinya Organization of Ahlubayt for Social Suport and Education (OASE) yang dipimpin langsung oleh mantan istri saya Emilia Renita AZ

Ketiga, adalah kelompok Mu'tadilah, penulis menyebutnya Syi'ah Muqsithah atau moderat, kelompok ketiga ini yang diklaim oleh banyak komunitas Syiah di Indonesia.

Penulis hanya terfokus kepada tiga objek penelitian yang akan dibahas, yaitu diskursus Syiah dan Sunni, relasi IJABI dan ABI dan Wilayatul Faqih dalam pandangan IJABI dan ABI, dan terakhir diskursus Wilayatul Faqih dan Pancasila.

Umunya banyak dari kalangan kita yang berasumsi bahkan menuduh bahwa sekte Syiah itu adalah kelompok monolitik, tunggal, dan seragam baik dari segi pemahaman teologi keagamaan, praktek peribadatan, hingga ekspresi dan pandangan politik pemerintahan dan kerakyatan, bagi penulis itu sangat keliru besar, karena tidak ada satu pun kelompok keagamaan memiliki entitas keagamaan yang seragam baik itu Sunni, Syiah, bahkan kelompok keagamaan di luar Islam itu sendiri seperti Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Namun, ada sebuah pandangan yang unik dari mantan wakil ketua

BIN (Badan Intelijen Negara), As'ad Sa'id Ali dalam wawancara penulis mencatat bahwa ia mengetakan;

> Lebanon yang Hizbullah itu ABI, kalau yang IJABI itu Gerakan Amal *(The Amal Movement)* pimpinannya Nabih Berri dari dulu itu sudah ada, Amal itu sekuler IJABI-nya kalau di Indonesia, dia tidak mendukung Negara Islam, tapi di antara keduanya kalau di politik itu satu, tapi pas masuk menjadi beda, sebenarnya dua-duanya satu kesatuan, di Lebanon sama kaya di Indonesia, konsep Teokrasinya tetep ada. Ya gimana, mereka punya hadits dan al-Qur'annya sendiri untuk memahami konsep Teokrasi itu. Mereka punya Quran sendiri kok, yang mashhaf Utsmani itu 1/3 Qur'an mereka, mereka menyimpan sebagian Qur'an mereka. Jadi dulu ada salah satu surat al-Qur'an yang palsu dari Syiah, tapi ketauan. Alasan mereka taqiyah itu mempunyai rahasia-rahasia di Internal mereka, yaitu keyakinan terhadap Imam-imam mereka, jelas kok di *al-Kafi al-Kulaini* itu.

Jelas. Pandangan As'ad Said Ali berbeda dengan pandangan mainstream pada umumnya, bagi As'ad Syi'ah memiliki pandangan yang sama dalam politik, terutama penyebaran paham keagamaan dan politik yang disatukan dalam doktrin Imamah. As'ad memberi contoh gerakan Amal di Lebanon dan Hizbollah, dua gerakan tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh, namun mempunyai kesamaan yang sangat prinsipil yaitu tegaknya Imamah. *The Amal Movement* atau *Harakatul Amal* (Gerakan Amal), Amal sendiri adalah singkatan dari *Afwaj al-Muqawamah al-Libnaniyah* (Resimen Perlawanan Rakyat Lebanon), Amal Movement adalah organisasi politik dan paramiliter yang mewakili Syiah di Lebanon, gerakan ini mucul pada tahun 1975 sebagai sayap milisi gerakan Syiah dan ia mengambil peran penting dalam *Lebanese Civil War* (Perang Sipil Lebanon), meskipun hanya aktor non-state Amal Movement mempunya infrastruktur politik yang cukup mapan, ia memiliki pengaruh besar di bagian barat Beirut dan Lebanon Selatan. Pasca revolusi Iran tahun 1979 Amal Movement menikmati dukungan yang sangat luar biasa dari Republik Islam Iran.

Namun, setelah tahun 1982 Iran membentuk milisi Syiah saingan Amal Movement yaitu Hizbullah, sehingga Amal sendiri berbalim dukungan ke Suriah sebagai pengganti Iran.

Hizbullah sendiri lahir pada masa perang sipil Lebanon tepatnya pada tanggal 6 Juni 1982, atas dukungan dari pemerintah revolusioner Iran. Selama perang sipil berjalan sepanjang 1983-1984 terjadi pengoboman yang dilakukan oleh milisi Syiah dari Amal dan Hizbullah menghantam kedutaan besar Amerika dan markas militer Amerika dan Prancis, akhirnya pasukan multinasional ditarik mundur sehingga pengaruh Barat di Lebanon berakhir.

Usai konflik sipil selesai, ada ketegangan Antara kedua kelompok milisi Syiah tersebut, terutama ancaman besar bagi Nabih Berri sebagai pimpinan Amal Movement, karena Amal adalah gerakan Syiah sekuler yang tetap independen tidak tunduk terhadap pengaruh politik Iran, meski Nabib Berri mendukung revolusi Iran dan menganggap Imam Khomeini sebagai pemimpin spiritual.

> Jurang ideology dan politik Antara Amal Syiah dan Hizbollah akhirnya menimbulkan konflik bersenjata di Antara mereka, dan kemudian menjadi pemandangan rutin yang menghiasi Lebanon sejak 1985. (Farid, et.al. 2006:188)

Konflik kedua kelompok tersebut bukan hanya karena ideologi yang harus ikut dan tunduk terhadap Wali Faqih atau pengaruh politik Iran, seperti yang dikatakan Uri Rosset (2011:2) Amal Movement sangat bertentangan dengan Hizbullah Syed Hassan Nasrallah, karena Amal menolak mutlak Wilayatul Faqih. Namun, konflik itu juga diakibatkan oleh perebutan kekuasaan territorial dan pengaruh politik yaitu kontrol atas desa-desa strategis Syiah yang berdekatan dengan zona keamanan Israel tepatnya di *Iqlim al-Tuffah* (sebelah tenggara Sidon)

yang awalnya dikuasai oleh Amal hendak direbut oleh Hizbullah, keduanya ibarat ada dalam kubangan benci tapi rindu, di satu sisi harus menyatukan kekuatan untuk melawan hegemoni Barat, namun di sisi lain harus menguatkan militansi kelompok masing-masing, senada dengan teori konflik fungsionalis dari seorang sosiolog Jerman-Amerika Lewis Coser, bahwa fungsi konflik adalah instrument penting untuk menguatkan solidaritas kelompok dan mempertahankan struktur sosial.

Sama halnya seperti Syiah di Lebanon, Syiah di Irak juga pernah berseteru dengan rezim Syiah di Iran gara-gara terlalu banyak intervensi urusan politik domestik Irak (al-Qurthuby, 43:2017). Hal ini diperkuat oleh pandangan Ayatullah al-Uzma Ali al-Sistani dan gurunya Ayatullah al-Uzma Abdul Majid al-Khoei, kedua ulama Syiah ini sangat berpengaruh di Dunia, bahkan soko guru dan *marja' taqlid* seluruh Ulama Syiah di Dunia, keduanya juga dikenal dengan Ulama Syiah Moderat tidak ekstrime atau radikal, di Irak keduanya adalah Ulama Kharismatik yang menolak keterlibatan Ulama dalam politik (*the "silent hawza"*). Dalam pandangan kubu al-Sistani, keterlibatan ulama dalam politik hanya akan mengganggu kesucian agama (Sihbudi, 2007:93-94). Ada tiga kelompok Ulama Syiah yang memiliki kesamaan pandangan dalam memahami kepemimpinan politik kaum Ulama atau Mullah, pertama ulama Irak yaitu Ayatullah Muhammad Sadiq al-Shadr dan Ayatullah Baqir al-Hakim, kedua ulama Lebanon Ayatullah al-Imam Musa al-Shadr dan Ayatullah Sayyid Hussein Fadllullah yang memimpin Hizbullah, ketiga ulama dari Iran Ayatullah al-Uzma al-Imam Khomeini, ketiga kelompok ulama ini pada tahun 1970-an sering bertemu di Najaf, Irak, oleh

karenanya Imam Khomeini berhasil mendirikan sistem Wilayatul Faqih di Iran, hingga melebarkan sayapnya di Lebanon, bahkan secara terang-terangan dalam salah satu butir piagam pembentukan Hezbollah berbunyi:

> Kami adalah kader-kader umat Hezbollah, di mana Allah SWT telah memberi anugerah kemenangan pertama di Iran. Kami komitmen menaati perintah pimpinan adil yang telah diwakili oleh Wali Al Faqih.

Terlepas dari kedua gerakan Syiah yang populis di Timur Tengah, Syiah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, karena konteksnya jauh berbeda, jika di Timur Tengah disintegrasi antar kelompok sangat kuat dan kompleks sehingga menimbulkan pertumpahan darah, sedangkan di Indonesia masyarakat Syiah hanya mendapatkan ancaman dari eksternal Syiah, seperti kriminalisasi Masyarakat muslim Syiah di Sampang Madura dan di tempat lainnya oleh masyarakat Sunni, sampai saat ini bahkan nanti konflik Sunni-Syiah itu tak akan pernah padam. Kendati demikian, Syiah sendiri di Indonesia nyaris ada letupan-letupan atau gesekan kecil di tengah internalnya sendiri, misal tentang pandangan ABI dan IJABI terhadap konsep Wali Faqih, sama halnya seperti pandangan Amal Movement dan Hizbullah atau Ulama Irak yang terpecah menjadi dua kelompok hanya karena berbeda cara pandang atas peran ulama dalam politik, perbedaan itu akan selalu ada dan nyaris dekat konflik.

Iranisme atau Iranisasi adalah momok yang menakutkan bagi Negara Indonesia, isu ini dikembangan oleh kelompok yang anti terhadap syiah, namun boleh jadi stigmasi itu ada yaitu ekspansi Wilayatul Faqih dan pengaruh Iran dalam mencampuri kebijakan Negara-negara lain, bukti empiriknya apa yang telah terjadi di Lebanon, Irak, dan Yaman, karena kalau kita lihat seberapa besar

pengaruh Iran, ia selalu mendapatkan angin segar atau harapan baru bagi Negara-negara yang dalam kondisi lemah secara politik.

Wali Faqih atau Sistem Wilayatul Faqih adalah turunan dari doktrin Imamah atas ijtihad Imam Khomeini dan ini diakui oleh Emilia Renita AZ ketika masih bersuami dengan Jaluddin Rakhmat, ia mengatakan (2009:96) Memang benar, Syiah memasukkan Imamah sebagai bagian besar dari Aqidah, bukan furu'. Jadi, Imamah dalam Syiah sangat betul-betul prinsipil, jika dalam Sunni Imamah atau Khilafah (Kepemimpinan) memang benar adanya dalam agama, berdasar pada dua landasan penting Sunni tentang kepemimpinan yaitu *Wujub al-Syar'i* (wajib menurut agama) dan kedua *Wujub al-'Aqli* (wajib adanya pemimpin secara akal atau pemikiran), adapun kalangan Syi'ah menerima dua akar dasar ini, namun ia menambahkannya yang ketiga yaitu *Rahmat asl-E'luft* di mana seorang Imam atau pemimpin ditentukan oleh rahmat Tuhan melalui perantara utusan-Nya. (Muzaffari, 1994:41).

Hal ini juga dipertanyakan oleh cendekiawan muslim Indonesia yaitu Komaruddin Hidayat kepada khalayak umat, ia menanyakan eksistensi Syiah Indonesia dan Wilayatul Faqihnya, apakah itu tidak akan mempengaruhi pribadi masyarakat muslim Syiah dalam meyakini dan mengimplementasikan Pancasila? (Matin, 2018).

## C. Diskursus Islamisme Wilayatul Faqih dan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Islam selalu ada dalam obyek kajian penting para intelektual dari zaman bahela hingga di era modern ini, banyak para ilmuWan sains dan sosial yang lahir dari rahim Islam, pada masa Abbasiyah Islam memiliki peran penting dalam perkembangan pengetahuan, di bidang tafsir ada Ibnu Jarir at-Thabari, Ibnu Athiyah al-Andalusy, Maqathil bin Sulaiman, Abu Bakar Asam, di bidang hadits kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Imam al-Tirmidzi, di bidang kalam ada Abu Hasan al-Asy'ari sebagai penghulu faham Sunni, ada Washil bin Atha' pendiri faham Mu'tazilah, dan seorang sufi terkenal Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali, di bidang Bahasa kita sering mengenal perdebatan antara blok Kuffah dan Bashrah yaitu Imam Abu Zakaria al-Farra dan Imam Sibawaih, di bidang fiqih lahir ulama empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Ahmad bin Hambal, di bidang kedokteran dan sains ada Abu Zakaria Yuhana bin Masiwaih, Sabur ibn Sahal, Abu Zakaria al-Razi, dan yang paling familiar adalah Ibnu Sina. Selain itu masih banyak berkembang ilmu lain pada masa Abbasiyah, ilmuan social yang juga ilmuwan politik pertama dalam Islam yaitu Abu al-Hasan al-Mawardi yang mana magnum opusnya selalu menjadi rujukan ilntelektual muslim yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyah.

Sejarah panjang Islam adalah peradaban yang selalu terulang polanya, konflik yang teramat panas dalam tubuh Islam adalah konflik poltik, meski sejatinya dalam teori awal Islam tidak ada pemisahan antara *din* dan *daulah* atau *siyasah* (agama, Negara, atau politik). Pada masa awal Islam, Rasulullah hijrah ke Madinah ia mendirikan kota namun dalam bentuk negara *(city-state)* yang masih

dalam prinsip yang bersifat ketuhanan, Al-Maududi menyebutnya dengan system teodemokrasi (Azra, 25:2016). Pandangan seperti ini masih ada dalam bayang-bayang umat Islam modern yang merasa kesal dengan sistem yang ada, mereka meluapkan emosinya dan berupaya untuk mengembalikan sistem yang dahulu pernah ada.

Politik Islam pasca Rasulullah saw wafat hanya muncul dua prinsip dalam sistem kenegaraan yaitu *ikhtiyar* (pemilihan) dan *bai'at* (sumpah setia). Prinsip ini dijalankan oleh Khilafah Rasyidah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun, pasca tragedi pembunuhan yang menimpa khalifah ketiga dan keempat umat Islam pada masa itu mengalami konflik yang teramat dahsyat, belakangan kelompok yang pro derhadap Utsman menang yang diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemenangannya mengantarkan ia menjadi seorang pemimpin dan mendirikan Dinasti Umayyah yang berprinsip monarki dan mengklaim kepemimpinannya sebagai Khilafah. Kemudian Umayah tumbang pada 132H/750M, oleh klan Abbasiyah yang mampu bertahan hingga 656H/1258M, Abbasiyah masih dikenal sebagai bagian dari keluarga Ali, oleh karena itu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah, kelompok Abbasiyah sangat mengistimewakan pendukung Ali yang selama masa Muawiyah mereka tertindas (Hasjmy, 1993:213-214).

Selanjutnya, pasca kedua dinasti besar dalam Islam itu hancur, skisma dalam Islam semakin memuncak, loyalis Ali mengkristal sebagai kelompok Syiah (pengikut atau partai), sedangkan loyalis Muawiyah memproklamirkan kelompoknya sebagai Sunni, gagasan tentang politik pun terbelah menjadi dua

yaitu Imamah kepemimpinan versi Syiah dan Khilafah kepemimpinan versi Sunni, bagi Syiah terkhusus Syiah Imam Dua Belas semua pemerintahan politik non-imamah dianggap tidak sah, begitu sebaliknya (Azra, 2016:26). Akhirnya dunia muslim terpecah menjadi kepingan-kepingan *mamlakah* (kerajaan) yang berceceran sifatnya regional dan menjadi negara-negara teritorial sampai Dinasti Utsmaniyah di Turki, namun tak lama muncul sosok Mustafa Kemal Attatruk yang menghapus lagi sistem kekhilafahan universal dunia Islam, yang mengakibatkan Turki Utsmani selesai. Padahal, Turki Utsmani kala itu telah menjadi imperium Islam yang cukup besar karena mempunyai kekuatan militer terbesar di dunia pada abad ke-17, dan hal ini lah yang menjadi ancaman nyata bagi Negara-negara Salib yaitu Eropa Timur dan Eropa Barat. Selain Utsmani, ada juga kerajaan Islam yang cukup besar yaitu kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia. Yang terakhir ini adalah embrio atau cikal bakal berdirinya negara Syiah modern yaitu Iran.

Barangkali ada dua kelompok penting dalam perumusan filsafat pergerakan Revolusi Islam Iran, yaitu: kelompok ulama *(religious scholars)* dan intelektual awam *(lay intellectuals)*. Yang paling menonjol di kelompok ulama yaitu Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Ruhullah Imam Khoemeini, adapun di kelompok intelektual yang paling menonjol kala itu Ali Syari'ati, Mehdi Bazargan, dan Bani Shadr (Azra, 2016:81). Pada dasarnya revolusi Islam Iran memang digerakkan oleh berbagai tokoh intelektual dan ulama, dan ini menjadi buah bibir dunia, di mana banyak intelektual Barat yang mengkaji tentang revolusi agama di Iran, Foucault (2011:187-192) mengatakan:

> Musim panas lalu orang-orang Iran berkata, ‘Ribuan orang dari kami siap mati untuk mengusir Syah (Reza Pahlevi).’ Tak ada satu kekuasaan pun yang mampu membuat gerakan semacam ini. Mustahil. Semua bentuk kebebasan yang diperoleh atau dituntut, semuah hak yang kita hargai bahkan hak-hak yang melibatkan persoalan yang paling tidak penting, pastinya menemukan dalam suatu pemberontakan sebuah kritik terakhir di mana mereka melabuhkan diri. Titik yang jauh lebih kukuh dan lebih dekat ketimbang hak-hak natural. Karena orang yang memberontak berada ‘di luar sejarah’ sekaligus di dalamnya, dank arena hidup dan mati dipertaruhkan, maka kita dapat memahami mengapa pemberontakan mudah mendapatkan ekspresinya dan modus pelaksanaannya dalam tema-tema keagamaan, seperti janji akan alam baka, kembalinya waktu, penantian akan sang juru selamat ‘Imam Mahdi’, dan berkuasanya kebaikan yang tidak bias dibantah lagi. Ketika agama tertentu memungkinkan, tema-tema ini selama berabad-abad telah menyediakan bukan hanya sebuah jubbah ideologis, melainkan juga jalan untuk menghidupi pemberontakan itu sendir.

Dalam hal ini, Foucault melihat bahwa revolusi yang digerakkan oleh kaum intelektual dan masyarakat Iran ini adalah bentuk revolusi agama, karena sedari awal Imam Khomeini mengatakan bahwa agama tidak terpisah dari politik dengan segenap dimensinya (Eickelman, 1998:63). Dari sini, tampak terlihat corak pemikiran Khomeini dalam politik ia sangat mendukung pemerintahan agama (teokrasi) di mana keabsahan seorang pemimpin harus berasal dari wahyu atau Tuhan (*devine legitimacy*), meski menurut sebagian orang dalam prakteknya tetap demokratis, dan menyebutnya dengan sitem pemerintahan teodemokrasi.

Imam Khomeini sangat dipengaruhi oleh pemikiran al-Farabi, Nashiruddin Thusi, dan Shadruddin al-Shirazy dalam memahami politik, politik diartikan sebagai bagian penting dari agama untuk menggerakkan manusia menuju Allah atau kesempurnaan, baginya pemimpin harus berasal dari Allah, dengan demikian orang yang telah melebur dirinya dengan Tuhan, maka perjalanan politiknya akan berlanjut dengan kembali kepada masyarakat sebagai pemimpin mereka. (Anis, 2015:95-96). Konsep ini dikenal juga dalam teori sufisme al-Hallaj yaitu *wahdah*

*al-wujud* (menyatu dengan Tuhan), di Nusantara terkhusus di tanah Jawa masyarakat mengenal dengan konsep *manunggal ing kawulo lan gusti*, puncak segala keimanan adalah pada tingkatan *dzauq al-haqiqi* (merasakan hakikat melebur dengan Tuhan). Ketika diri manusia sudah melebur dengan Tuhan, tentunya semua ketakutan akan sirna, begitu yang dipahami Khomeini bahwa sudah tidak ada berhala dan ketakutan di depan matanya sehingga ia berani melawan rezim Syah.

Dari konsep tersebut, Khomeini membagi politik dalam tiga bagian. Pertama politik setan *(siyasah syaithaniyah*) yaitu politik yang diperaktikan para tiran dan penindas seperti rezim Syah dan Amerika. Kedua politik hewan (*siyasah hayawaniyah*) yaitu politik yang tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tanpa ada tujuan yang mulia yaitu agama. Ketiga politik Islam (*siyasah Islamiyah*) politik yang tujuannya adalah Allah untuk menjadi manusia sebagai insan yang sempurna, dalam terminologi sufi disebut *insan kamil* atau *hikmah al-muta'aliyah*. Berdasarkan ijtihadnya Imam Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam harus dipimpin oleh seorang fakih, yaitu ulama yang memahami hokum-hukum syariat dan agama (Anis, 2015:96-97). Memahami argumentasi Khomeini tentunya Islam dan Negara adalah kedua matahari kembar, ibarat matahari di siang hari dan rembulan di malam hari keduanya sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya di Negara Islam bagian tertentu yang umatnya dan ulamanya ingin menegakkan hukum Islam di negaranya, begitu juga di Indonesia dengan segala dinamikanya umat Islam dalam tubuh politik.

Islam dan politik dalam satu bejana yang tidak bisa dipisahkan, dalam sejarah sangat jelas Islam berkembang sebagian besar karena ekspansi kekuasaan atau pengaruh politik, sehingga ketika Islam dihadapkan dengan konsep Barat tentang agama dan Negara seakan-akan Islam mengalami *culture shock*, karena dampak penetrasi Barat ke Dunia Islam menyangkut sistem politik kenegaraan. Seperti yang dikatakan Azra (2016:32-33) Islam dihadapkan dengan konsep Negara Bangsa (*nation states*) nasionalisme, *sovereignity* (kedaulatan), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Islam, masyarakat muslim hanya mengenal dua konsep teritorial relogio-politik yaitu *dar al-islam*, wilayah damai yaitu wilayah umat Islam, dan *dar al-harb* wilayah perang atau wilayah non-muslim. Hal ini juga yang pernah menjadi luka sejarah yang mendalam di Indonesia, ketika Kartosoewirjo dipenggal oleh sahabatnya sendiri Ir. Soekarno. Karto dikenal sebagai pemimpin pemberontak Darul Islam (DI) tujuannya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), ambisinya dibangun berdasarkan kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan masih terbayang-bayang romantisme masa silam tentang konsep *ummah wahidah* (umat yang tunggal) dalam Islam. Tak berhenti di situ, Islam terus diperjuangkan meski tanpa mendirikan Negara Islam secara frontal, misal sosok Muhammad Natsir yang dikagumi sebagai tokoh Islam dan Masyumi ia mengatakan, Negara, bagi kita, bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan, *intergreerend deel* dari Islam. (1973:442). Meski demikian, Natsir juga meyakini bahwa konsep nasionalisme terhadap bangsa dan Negara Indonesia adalah lahir dari Islam dan Islam lah (Sarekat Islam) yang pertama mendefinisikan

nasionalisme dalam tali keislaman (Effendy, 2009:76). Jadi ada dua kelompok yang memperjuangkan Islam, yaitu kelompok pemberontak dan kelompok transformasi yang melakukan penetrasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, seperti parlemen.

Dewasa ini, di era modern kita juga dihadapkan dengan paham ideologi yang sama dengan pemberontakan NII, di mana umat Islam terprovokasi atau terpukau dengan model ideologi Islamisme dalam politik, padahal di Indonesia sudah berjalan lama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kekurangan dan dinamikanya. Tipologi gerakan ini anti dengan demokrasi dan Pancasila, karena mereka beranggapan bahwa itu semua adalah *thaghut* yang merupakan bagian dari semitisme atau Yahudi. Bassam Tibi (2016:76) mengatakan, orang-orang Islamis menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Zionis mengahsut penghapusan kekhalifahan, sebagai langkah pertama menuju pemecahbelahan umat muslim menjadi Negara-negara kecil dan lemah. Bahkan dalam ideologinya islamisme mengatakan bahwa introduksi konsep Negara-bangsa dianggap sebagai konspirasi Yahudi untuk merusak Islam.

Nampaknya dinamika Islam dan Negara cukup menegangkan, sehingga banyak bermunculan varian sikap dan pemikiran tentang posisi Islam dan Negara, setidaknya ada tiga sistem kenegaraan dalam Dunia Islam pasca kemerdekaan, yaitu Sekuler, Islam, dan Muslim. Turki memilih untuk menjadi Negara sekuler totalitas pasca revolusi kemalian yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attatruk, disebut sekuler karena Negara ini membatasi peran agama pada kehidupan pribadi, meski akhir-akhir ini banyak tanda-tanda ingin meninggalkan sistem

sekuler dan mengembalikan pemerintahan Islam. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan dan sebagian Timur Tengah lainnya secara formal mereka menyatakan Negara Islam. Adapun Negara-negara yang berpenduduk muslim terbesar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya lebih tampil sebagai Negara Muslim. (Azra, 2016:42). Selanjutnya, Indonesia hadir dengan sitem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa.

Pancasila seperti dalam pidatonya Ir. Soekarno, ia mengatakan:

> Kita bersama-sama mencari persatuan *philosofische grondslag*, mencari satu *weltanschaung* yang kita semua setuju. Saya katakana lagi, setuju. Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus.

Dari kesepakatan itu lahirlah Pancasila, meski Ir. Soekarno sendiri menolak anggapan bahwa dirinya pencipta Pancasila, melainkan adalah seorang penggali dari ajaran Pancasila. Bagi Bung Karno Pancasila adalah sebuah *philosofische grondslag* dari pada Indonesia Merdeka, Sjafruddin Prawiranegara (1983:3) mencatat bahwa *philosofische grondslag* adalah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dengan berbagai dinamikanya Pancasila mengalami beberapa kali perubahan, dalam pidato Bung Karno butir-butir Pancasila adalah sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan social, dan ketuhanan. Namun, pada tanggal 22 Juni 1945 Pancasila dirumuskan ulang menjadi, Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at

Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan yang kedua ini banyak penolakan dari kalangan minoritas (non-muslim) yang berujung pada penghapusan atas masukan dari Moh. Hatta, sehingga Pancasila diubah kembali pada 18 Agustus 1945 dengan menghapus tujuh kata di sila pertama, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak semudah itu untuk mendamaikan di antara kedua kelompok yang bertegangan, ternyata Islam sendiri tidak begitu menerima tujuh kata dalam sila pertama dihapus, sehingga muncul banyak pemberontakan terhadap Negara yang dipimpin oleh DI/TII/NII bahkan perjuangan legalisasi syari'at Islam sampai saat ini masih diperjuangkan oleh beberapa partai politik Islam. Singkatnya, masuk ke masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebuah asas tunggal oleh pemerintah di awal rezim Orba berkuasa, sehingga mengalami ketegangan lagi antara pemerintah dan umat Islam, salah satu tokoh Islam dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Sjafruddin Prawiranegara menolak dijadikannya Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik, Sjafruddin menyurati Soeharto pada tanggal 7 Juli 1983, dalam suratnya Sjafruddin menjelaskan bahwa HMI dalam kongresnya di Medan menolak pergantian asas dari asas Islam ke asas Pancasila, bahkan bukan hanya HMI, melainkan juga umat Islam Indonesia umumnya yang masih cinta kepada agamanya. Pergantian azas Islam oleh asas Pancasila berlawanan dengan UUD yang berlandaskan Pancasila. Yaitu Pancasila yang asli yang menjadi dasar dari UUD 1945. Bagi Sjafruddin inti dari suratnya

adalah jangan memaksakan umat Islam yang berserikat untuk mengganti asasnya menjadi asas Pancasila, karena pada dasarnya kemerdekaan beragama dan Ibadah dijamin oleh pasal 29 ayat 2 UUD, yang mana UUD tersebut berdasar pada Pancasila. Memang terkadang kita tidak bias memuaskan satu kelompok namun kelompok lain kecewa, *ridhannaas ghaayah laa tudrak,* kerelaan seluruh manusia adalah tujuan yang tak mungkin dicapai.

Berbeda halnya dengan Sjafruddin, Gus Dur sebagai tokoh sentral di NU (Nahdlatul Ulama) waktu itu menerima gagasan asas tunggal Pancasila yang usulkan oleh pemerintah Orba. Pada Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984, NU menetapkan dan menerima asa tunggal Pancasila dengan alasan jalan keluar dari sectarian menuju kepentingan nasional yang lebih luas, bagi Gus Dur penggantian asas organisasi juga bukan berarti penggantian akidah umat Islam. Gus Dur lebih luas memahami Pancasila sebagai asas tunggal, karena ini memicu diskursus epistemologis hubungan antara Negara dan agama, sehingga agama mampu berperan menjadi sumber dari Pancasila itu sendiri di samping sumber-sumber lain seperti kebudayaan, dengan kata lain agama berperan memotivasi kegiatan individu, melalui nilai-nilai luhur yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa (Wahid, 1985:2). Jadi bagi Gus Dur hubungan Pancasila dengan agama itu adalah hubungan komplementer, bukan hubungan substitusi (saling mengganti) seperti apa yang dipahami Sjafruddin Prawiranegara.

Islam dan kekuasaan akan selalu *vis a vis* dan tidak bergaris linier untuk sebagian umat Islam yang masih traumatik terhadap demokrasi atau sistem yang

lahir dari Yahudi. Kerap kali gerakan Islam Politik ini disebut dengan Islamisme, Jalaluddin Rakhmat dalam wawancara mengatakan:

> Islam adalah sebuah agama, sebuah jalan hidup, sebuah rangkaian upacara-upacara, dan sebuah cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Islamisme adalah sebuah ideologi politik yang disandarkan pada ajaran-ajaran Islam atau dalam bahasa lain Islamisme adalah politisasi Islam.

Menjadi hal penting untuk para civitas akademika mendalami varian aliran politik dalam Islam, bagaimana pun dalam Islam sendiri terdapat berbanyak pandangan politik, setidaknya ada dua yang kita sering dengar yaitu Khilafah dan Imamah, dua terminologi ini memiliki arti yang sama namun makna yang cukup berbeda. Dalam istilah lain, Khilafah juga memiliki istilah yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan *as-Siyasah as-Syar'iyyah* seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, ada yang menyebutnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* seperti apa yang ditulis oleh al-Mawardi, ada juga yang menyebutnya *min fiqh al-dawlah* seperti yang diutarakan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi, istilah yang berbeda ini memiliki subtansi yang sama yaitu tegaknya syari'at Islam. Berbeda dengan Khilafah, ulama Syiah menyebut istilah kepemimpinan itu dengan kata Imamah sebagai induk genuine identitas politik muslim Syiah, Imamah melahirkan konsep *Wilayat al-Faqih* atau kepemimpinan seorang ulama, namun dalam prakteknya *Wilayat al-Faqih* memiliki perluasan yaitu *Wilayat al-Ummat* dalam Bahasa Indonesia disebut kepemimpinan ummat atau rakyat, *Wilayat al-Ummat* sering juga disebut *dawlah musyawarah al-'awami* atau Negara kesepakatan rakyat.

Imamah dalam pandangan Syiah adalah sistem politik yang mana tidak bias dipisahkan dengan agama *(intergrated),* pemerintahan Negara

diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi *(devine sovereignty).* Berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan melalui garis keturunan Nabi terutama Ali sebaga *washi* (penerima wasiat kepemimpinan), tentunya legitimasi politik juga harus berdasarkan legitimasi keagamaan, dan hal ini mutlak hanya dimiliki oleh para *washiyyin* (para penerima wasiat) yaitu Aimmah (para imam) yang lahir dari keturunan Nabi yang diyakini oleh muslim Syiah sebagai *ma'shumin* (yang terjaga dari dosa) atau insan suci *(muqaddasin).* Din Syamsuddin (1999:46) menyebut Imamah adalah bagian dari sistem teokrasi karena Imamah menjadi lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan, dan mempunyai fungsi menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan".

Ketika Syi'ah diidentikan dengan aliran madzab yang sangat politis, karena melegalkan legitimasi Tuhan untuk mengurus Negara, bagaimana dengan kaum muslim Syi'ah di Indonesia yang saat ini mengalami banyak dinamika perkembangan keagamaan di Indonesia. Apakah Syiah Indonesia mengalami transformasi pemikiran sehingga mampu mengikuti apa yang menjadi hukum Negara dan sistem yang sudah lama dibangun yaitu demokrasi Pancasila. Apakah ada misi *Wilayat al-Faqih* yang dibangun dan disebarkan sebagai ideologi politik (iranisasi) yang bisa jadi memicu disintegrasi bangsa, karena merupakan paham Islam Transnasional, atau Syiah akan tetap bertahan menjadi entitas tertentu di tengah mayoritas masyarakat Sunni tanpa mengeksplorasi *Wilayat al-Faqih*. Selanjutnya bagaimana Negara menyelesaikan permasalahan keagamaan yang beragam, ada bagaimana pandangan Negara terhadap Syi'ah, ancaman atau hanya dinamika sosial keagamaan saja?

Banyak para akademisi yang menulis tentang Syiah, namun kebanyakan dari mereka meneliti tentang ritual keagamaan dan tradisi Syiah yang mengakar dalam budaya keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Padahal kalau melihat dunia politik internasional, Iran adalah bagian penting dari percaturan politik di Timur Tengah dan Syi'ah modern telah melahirkan konsep *Wilayat al-Faqih* yang sampai saat ini masih pro dan kontra di internal Syiah sendiri. Adakah hubungan erat antara Syiah di Iran dan di Indonesia, meski Syi'ah menurut ilmuwan sejarah telah lama hadir di Indonesia yang sebelumnya belum mengenal konsep *Wilayat al-Faqih.*

Sejarah diskursus Syiah yang teramat panjang dan dinamis di Indonesia, telah melahirkan pembentukan pengetahuan tersendiri tentang Syiah, bahkan melibatkan relasi kuasa yang cukup dalam meliputi ilmu keagamaan, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Banyak forum-forum keagamaan atau forum kebijakan pemerintah tentang Syiah dan golongan keagamaan minoritas lainnya. Selanjutnya kita akan melihat pembentukan diskursus *Wilayat al-Faqih* di Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga keagamaan yang ada seperti ABI (Ahlul Bait Indonesia), IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia), IKMAL (Ikatan Alumni Jam'iyah Al-Mushtafa), pandangan pemerintah dan Ormas keagamaan di luar Syiah tentang *Wilayat al-Faqih*.

# BAB III

## Rebutan Syiah dan Klaim Pancasilais IJABI Versus ABI

### A. Bingkai Diskursus dan Transformasi Wilayat Al-Faqih IJABI

Sebagai kelompok yang berserikat komunitas Syiah perlu adanya badan hukum tertentu untuk membentuk sebuah lembaga, karena ini adalah bagian dari kebutuhan bermasyarakat. Jalaluddin Rakhmat telah berhasil membentuk dan mendirikan IJABI sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun masyarakat muslim syiah di Indonesia terutama orang-orang non alawi (bukan keturunan Arab), secara politik IJABI memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga Negara lainnya, dalam wawancara Jalaluddin Rakhmat mengatakan:

Kami punya organisasi yang diakui secara resmi oleh negara. Kami juga terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28, yang melindungi hak semua warga negara *"...untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran...",* maka, para pecinta Ahlulbait as. di Indonesia dengan ini menyatakan maksudnya untuk bersatu dalam Organisasi Masyarakat (ORMAS) Nasional bernama IJABI.

Dalam hal ini, IJABI adalah organisasi resmi yang diakui Negara, begitu juga IJABI dilindungi secara HAM seperti yang dikatakan oleh UUD 1945 BAB X.A. Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Namun belakangan ini, banyak sekali

aliansi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap Syiah. Sepanjang tahun 2011 ada 9 gerakan masyarakan menyerang komunitas Syiah di berbagai daerah, dan yang terbesar di Sampang Madura dan di Bangil Jawa Timur (Agnes, et.al, 2012:145-182).

Bersumber pada kasus-kasus yang marak terjadi, mayoritas konflik lahir dikarenakan adanya hembusan fitnah, tuduhan-tuduhan yang bersifat rasial, hal ini yang terjadi dan menimpa kelompok-kelompok Syiah di berbagai daerah, seperti apa yang sering terdengar di tengah masyarakat sunni bahwa Syiah memiliki al-Qur'an yang berbeda dengan umat Islam lainnya, bahkan isu yang ada di Timur Tengah dimanipulasi dan di reproduksi ulang dengan kemasan isu yang terbalik sehingga memunculkan gesekan sunni-syiah di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Dina Sulaeman (2018) dalam wawancara:

> …karena akses informasi mereka mungkin, mereka hanya menerima informasi dari medi-media online yang memang berafiliasi denga kelompok-kelompok teror itu, kita tahu misalnya ISIS, Al-Qaeda atau kelompok-kelompok misalnya Jaisy Al-Islam di Suriah itu, itu kan di belakangnya adalah Ikhwanul Muslimin, nah Ikhwanul Muslimin itu kan punya cabang di Indonesia, ustadz-ustadz di Indonesia itu banyak yang berideologi Ikhwanul Muslimin dan mereka sumber informasi untuk orang-orang di Indonesia yang ikut pengajian misalnya dan ada ustadz-ustadz selebriti juga yang sering masuk Tv, nah itu berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini gitu, makanya informasinya juga berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Emosi manusia biasanya terbangun atas dasar isu-isu sensitif kemanusiaan, seperti perang, pembunuhan, dan lain sebagainya. Isu itu kian dihembuskan bahwa orang Syiah di Suriah dan Palestina membunuh masyarakat Sunni dan berkelompok dengan Israel dan Amerika. Secara psikologis posisi seperti ini dapat membuat kericuhan di mana-mana, sehingga kelompok minoritas Syiah di

Negara kita terancam. Namun, di sisi lain, kita juga melihat apa yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah, misalkan As'ad Said Ali (2018) memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi konflik di Timur Tengah, menurutnya:

> Sekarang begini orang muja-muja Hizbullah bisa lawan Israel, akibat dialah Yerusalem di tangan Israel, jadi kan gini,orang Syiria, orang Persi itu kan suku-suku Arya, pinter-pinter tapi, demi untuk menguasai dunia Arab, dulu kan ada perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel, ya intinya menginginkan berdirinya negara Palestina dan perdamaian Timur Tengah, syarat negara Palestina diakui ini harus menunjulkan Palestina ini benar-benar berdamai jangan pakai kekerasan, lalu apa yang terjadi sekarang bikin lah Hamas dibantu Hizbullah ini, lawanlah Intifada itu, Hamas itu dibantu Ikhwanul Muslimin juga. Sekarang, setiap ada kekerasan yang kalah pasti yang pake kekerasan, citranya kalah hingga jadi jelek, Hamas dikendalikan oleh Iran, termasuk PKS bantu Hamas, dari dulu Ikhwanul Muslimin dekat dengan Syiah.

As'ad beranggapan bahwa Syiah malah menambah terjadinya kerusuhan di Timur Tengah melalui Hamas yang dibantu juga oleh Ikhwanul Muslimin, ini menjadi dua pertimbangan bagi kita di mana konflik di Timur Tengah sangatlah kompleks, tidak bisa kita dikte satu persatu. Dari konflik ini juga, Jalaluddin Rakhmat (2018) tidak mau membawa-bawa isu Timur Tengah ke Indonesia, bagi Jalaluddin IJABI memiliki ciri khas keindonesiaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok Syiah lainnya, bahkan lebih jauhnya Jalaluddin Rakhmat ingin menciptakan sejarah Syiah baru di Indonesia.

Seiring berjalannya rezim pemerintahan di Indonesia, dengan berbagai isu yang menimpa terhadap kaum Syiah ternyata perubahan setiap rezim itu tidak melulu diikuti dengan perubahan wacana dengan pandangan-pandangan yang optimis, misal transisi Orde Baru menjadi reformasi di Tahun 1998 menjadi transisi dari suatu rezim otoritarianisme ke dalam suatu rezim demokratis tidak

terbukti (Hadiz, 2005). Dalam hal Syiah, walaupun struktur politik berubah dengan ditandai dengan beberpa perubahan yang terjadi di beberapa sektor, namun pembentukan wacana tentang dari dulu masih tetap sama, bahkan malah muncul wacana-wacana baru yang memproduksi kebenaran sepihak, rezim politik bisa saja berganti namun rezim kebenaran belum tentu bisa dirubah.

Tahun 1984, MUI mengeluarkan fatwa agar mewaspadai kaum Syiah dan faham Syiah terutama yang paling prinsipil adalah masalah akidah di bagian Imamah, fatwa tersebut berbunyi:

> Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah.

Tidak berhenti di situ, pasca terjadinya penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan Bangil, pada Tahun 2012 MUI Jawa Timur mengeluarkan dan merekomendasikan fatwa kepada MUI Pusat tentang kesesatan kaum Syiah. Sedikit mengerikan, di mana kita melihat objek yang tertindas adalah masyarakat Syiah namun yang disalahkan juga adalah masyarakat Syiah. Sedangkan penanganan serius dari pemerintah pusat tidak ada, hanya sebatas retorika pidato dari SBY agar masyarakat tetap menjaga persatuan (Agnes, et.al. 2012:183). Selanjutnya kita melihat banyak sekali tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan Sunni radikal kepada faham ajaran Syiah, terutama yang paling inti diserang adalah konsep Imamah dengan legitimasi dasar kenegaraan yaitu akan menimbulkan disintegrasi dan perpecahan antar agama di NKRI, bahkan bisa

mengancam keutuhan NKRI dan demokrasi Pancasila yang dibangun sudah sejak lama.

Demikian Syiah sangat terkriminalisasi dan terdiskriminasi di tengah masyarakat mayoritas Sunni di Indonesia, tentunya masyarakat Syiah juga harus mempunyai strategi bertahan *(struggle)* di tengah masyarakat yang bukan bagian dari golongannya. Dalam hal ini, tentunya ada kajian diskursus tentang Syiah dan Imamah yang difahami oleh masyarakat sebagai ideologi atau ajaran yang memecah belah bangsa, dalam istilah Foucault kita harus memulai dari masa kini dan bergerak mundur ke masa lalu sampai perbedaan itu ditemukan. Kemudian, ia akan bergerak maju kembali, menelusuri proses transformasi dan berusaha mempertahankan argumentasinya, baik diskontinuitas ataupun kontinuitas.

Syiah dalam bahasan sejarah sudah sejak lama ada di Nusantara, dengan berbagai peninggalan-peninggalan dan penggalan-penggalan cerita tradisi verbal masyarakat Nusantara, kini Syiah modern menjelma menjadi sebuah madzhab yang mampu membentuk sebuah Negara berdasar pada nilai-nilai ilahiyat, sistem Wilayat al-Faqih yaitu sebuah sistem yang lahir dari konsep Imamah hasil dari ijtihad Imam Khomeini, sebagai mana menurut Ibn Khaldun dalam J. Subhani (2013: 241) Imamah yang dipimpin oleh seorang Imam merupakan pilar dan fondasi agama yang bahkan Rasulullah Saw pun tidak dapat mengabaikannya atau melimpahkannya kepada umat, melainkan harus menunjuknya dan imam juga harus terjaga dari segala dosa.

Demikian sentralnya Imamah dalam madzhab Syiah, sehingga ia tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kedudukan Imamah sangat vital di tengah umat. Karena itu Imam sebagai pemegang otoritas dan pelaksana hukum-hukum Islam harus ditetapkan oleh Allah Swt, dan bukan berdasar konsensus *(ijma')* dan permusyawaratn *(syura)* umat (J. Subhani, 2013:243). Dalam pandangan ini, fondasi teokrasinya sudah jelas bahwa Wilayat al-Faqih adalah bagian dari pada Imamah. Sistem perwalian sendiri itu sudah lama kental dengan ajaran Syiah bahkan konsep perwalian dalam Sufi yang kita kenal dengan Waliyullah (sebutan bagi orang alim yang memiliki karomah), di mana ritusnya sering dijadikan tempat ibadah ziarah awalnya diambil dari tradisi Syiah. Seperti yang dikisahkan oleh Murtadha Muthahhari (2014:44) ada seorang orientalis datang mewawancarai Allamah Thabathaba'i, ia bertanya apakah orang Syiah mengambil konsepsi wilayah dari kaum Sufi, atau sebaliknya? Faktanya adalah doktrin wilayah sudah ada di kalangan Syiah sebelum adanya taswuf, seandainya jika ada pertanyaan seperti itu maka orang Sufi lah yang mengambil dari Syiah.

Dari konsepsi dan doktrin wilayah ini Imam Khomeini berijtihad harus mendirikan Negara berdasar pada teks-teks agama, sebab pemerintah Islam tak lain adalah otoritas undang-undang ilahiah. (J. Subhani, 2013:297). Namun di awal perjalanannya tentunya tidak semudah memasang kancing dalam lubangnya, beberapa tokoh intelektual di Iran juga banyak yang mengkritisi bahkan menolak Wilayat al-Faqih, seperti Ali Syari'ati yang sangat mengecam Wilayat al-Faqih karena telah memberikan peranan yang terlalu besar kepada Ulama dalam urusan kenegaraan. Hal ini dapat mengakibatkan kekuasaan sulit dikontrol, dan tingkat

partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. Padahal dalam sistem demokrasi control terhadap kekuasaan dan partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur dominan (Sihbudi, 2007:69). Senada dengan yang dikatakan oleh Zuhairi Misrawi dalam wawancara:

> Banyak masalah HAM yang dihadapi oleh Iran, HAM itu juga terkait mereka yang menentang sistem Wilayatul Faqih, maka Iran banyak dikritik tentang hukuman mati dll. Jadi kontrol terhadap kekuasaan itu sedikit peluangnya, karena dengan berbagai kelebihan dan kekurangan ya itu lah sistem politik Iran.

Sekiranya ada dua kelompok yang menolak Wilayat al-Faqih di kalangan Syiah, yaitu pertama kelompok intelektual yang tidak ingin ulama terlalu berperan dalam wilayah pemerintahan, kedua adalah kelompok ulama yang tidak ingin agama dicampuri dengan politik, karena agama bersifat suci sedangkan politik terkadang mengharuskan kita berbuat kotor. Fenomena penolakan terhadap Wilayat al-Faqih sebenarnya bukan fenomena baru, fenomena ini muncul ketika Wilayat al-Faqih dijtihadkan sebagai sistem politik. Bukan hanya di Timur Tengah, di Indonesia juga banyak dari kalangan Syiah yang menolak sistem Wilayat al-Faqih terutama dari kalangan Ijabiyyun (jamaah IJABI). Jalaluddin Rakhmat dalam wawancara mengatakan:

> Kita sebagai warga IJABI sangat menolak sistem Wilayat al-Faqih, karena itu sulit diterapkan di Indonesia, meski sebagian orang Syiah yang non-IJABI ada juga yang masih memperjuangkan Wilayat al-Faqih, di Indonesia, awalnya saya orang yang pertama kali mengenalkan Wilayat al-Faqih, namun saya juga orang yang pertama menolak Wilayat al-Faqih, makanya banyak orang luar IJABI terutama ABI yang tidak suka dengan pendapat saya.

Pembentukan diskursus Wilayat al-Faqih terus berlanjut dengan berbagai perdebatan di dalamnya, bahkan sampai pada tingkat mendekonstruksi hadis-hadis Ghadir Khum yang diyakini oleh kaum Syiah sebagai hadits di mana

Rasulullah Saw berwasiat kepada Ali untuk meneruskannya sebagai pemimpin. Hadits yang berbunyi *man kuntu maula fahadza aliyyun maula* (Ali adalah pemimpin bagi orang yang menjadikan aku sebagai pemimpin) adalah hadits mutawatir dan hadits ini menurut Khwaja Nashiruddin Thusi dalam Murtadha Muthahhari (2014:97-99) tidak mungkin ini hadits *dha'if, maudlu'*, atau khabar wahid, karena periwayatnya adalah orang-orang yang mencintai Imam Ali seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad. Namun Jalaluddin Rakhmat menolak bahwa hadits ini adalah Hadits estapet kepemimpinan politik setelah Nabi, ia mengatakan:

> Selama menjadi Syiah, saya pernah pergi ke Najaf Irak, di suatu waktu saya ingin sowan dengan ulama-ulama Syiah di Irak, bertemulah saya dengan Syaikh Basyir al-Najafi dan Sayyid Ali Sistani, saya tiba-tiba ditanya oleh seorang Syaikh, apakah kamu dari Thailand? *Laa, ana min Indunisi*, jawab saya. Tafadldlal kata seorang Syaikh itu, saya dipaksa untuk maju ke depan menghadap Sayyid Ali Sistani padahal itu antriannya sangat panjang, Sayyid Ali Sistani bertanya apakah kamu tidak mengikuti Wilayat al-Faqih? Saya diam saja, tak menjawab karena takut salah. Tiba-tiba Sayyid Ali Sistani mendoakan saya, *Allahumma wahhid kalimatahum* Ya Allah persatukanlah mereka, mungkin *hum-nya* itu untuk muslim Syiah Indonesia yang konflik hanya karena perbedaan pendapat dalam memahami Wali Faqih.

Dari sini kita memahami bahwa ada fase perubahan di tubuh IJABI yang dimotori oleh Jalaluddin Rakhmat atas pandangannya terhadap Wilayat al-Faqih. Bagi Jalaluddin Rakhmat dan Ijabiyyun Wilayat al-Faqih adalah bagian dari Islamisme, atau sebuah gerakan Islam Politik yang sedang marak saat ini, gerakan ini menurutnya bisa diidentifikasi dengan seringnya membawa simbol-simbol agama dalam politik, dalam wawancara Kang Jalal mengatakan:

> Kelompok Islamis biasanya menggunakan identitas Islam untuk tujuan politiknya, dan Wilayatul Faqih itu Islamisme itu ideologi yang ditegakkan di atas ajaran-ajaran Islam memperjuangkan satu sistem politik yang berdasarkan ajaran Islam

> seperti yang dipahami oleh Imam Ayatullah Khomeini, saya termasuk orang pertama yang mengenalkan Wilayatul Faqih di Indonesia, saya pernah menulis beberapa artikel tentang Wilayatul Faqih, ini ada hubungannya dengan Syiah di Indonesia.

Jelas. Jalaluddin Rakhmat mengkategorikan Wilayat al-Faqih adalah bagian dari Islamisme, seperti apa yang dikatakan oleh Bassam Tibi (2012:1) Islamisme itu terkait tatanan politik, bukan iman. Islamisme adalah politik yang diagamaisasikan, Islamisme tidak seperti yang digambarkan sebagai bentuk kebangkitan Islam, Islamisme tidak menghidupkan kembali Islam, tetapi malah merekonstruksi Islam yang tidak sesuai dengan warisan sejarahnya. Begitu juga bagi Kang Jalal, menurutnya ada tiga kelompok yang tidak mau membedakan Antara Islamisme dan Islam yaitu pertama kelompok Islamophobia, kelompok yang benci terhadap Islam di Barat, kedua kelompok Islamis sendiri, karena merekalah yang menggunakan Islam untuk kepentingan politiknya, ketiga adalah kaum intelektual dan politisi yang tidak mau membedakan Islam dengan Islamisme, karena mereka tidak mau mengkritik Islamisme karena nanti dituduh tidak Islami, mereka juga tidak berani menyalahkan orang yang mau mendirikan negara Islam, karena nanti ia takut dituduh Kafir, istilahnya kelompok tiga itu menjaga *Political Correctness*, supaya tidak dianggap ulama sesat, dia berusaha menunjukan keberpihakannya kepada Islam padahal dalam hati mereka tau Negara Islam itu *The Impossibe State*, konsep yang tidak mungkin diwujudkan.

Bukan hanya karena alasan Islamisme, Kang Jalal (2018) juga menggunakan argumentasi bahwa *aghlabiyatul ulama* (mayoritas ulama) Syiah menolak Wilayat al-Faqih dalam arti tidak sepakat dengan Imam Khomeini, menurutnya tidak semua yang menolak Wilayat al-Faqih adalah Syiah London

atau Syiah ekstrim yang dikenal Syiah Shirazi. Pembentukan diskursus Wilayat al-Faqih dalam tubuh IJABI semakin berlanjut dan banyak reaksi negatif dari komunitas Syiah di luar IJABI, terutama dari kalangan Sayyid atau Alawi yang ada di organisasi ABI. Pendapat Kang Jalal itu dianggap telah menyelisihi madzhab Syiah Imamiyah.

Selanjutnya, Kang Jalal (2018) telah mendekonstruksi hadis Ghadir Khum, menurutnya Imam Ali bukanlah diangkat untuk memegang otoritas politik, melainkan untuk memegang otoritas agama, dengan alasan, andai saja itu adalah wasiyat politik, kenapa Imam Ali tidak memperjuangkan haknya itu, jadi Imam Ali ditugaskan oleh Nabi untuk melanjutkan Minhaj Nabi, seperti apa yang terjadi pada masa Umar dimana ada ungkapan Laula ‘ali lahaka ‘umar (andai saja Ali tidak ada, maka Umar rusak) dalam hal ini yang dimaksud adalah agama, seringkali para Sahabat Nabi bertanya masalah agama kepada Imam Ali, seperti apa yang dikatan oleh Imam Ali *Saluunii qabla an tafquduuni* (bertanyalah kepadaku sebelum aku meninggal).

Padahal dalam teks Syiah Imamiyah sangat jelas, hadis Ghadir Khum adalah estapet kepemimpinan politik yang juga tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan agama (Murtadha Muthahhari, 2014:101-102). Dilihat dari hadits ini, Syiah meyakini bahwa ada dua dimensi yang menjadi spirit kaum Syiah yaitu dimensi *fiqhiyah* (agama) dan dimensi *harakah al-siyasah* (gerakan politik), sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa Syiah adalah madzhab paling politis. Gerakan *muqawamah* ini ditandai dengan kepentingan politik Iran di Timur Tengah, Hizbullah adalah bagian dari gerakan politik Syiah di Lebanon dan

misinya adalah penyebaran Wilayat al-Faqih sebagai sayap kekuatan Iran, As'ad Said Ali (2018) dalam wawancara:

> Sangat, sangat ada misi itu (Wilayat al-Faqih), itu hanya taktik aja. Pada akhirnya juga begitu, karena tekanan Amerika Irak akhirnya gak jadi, makannya ISIS kuat karena Sunni bantu ISIS, yang jadi permainan Iran ya Syiah ini, kita gak boleh ngebunuh orang Syiah, di Maroko kaya gitu Syiahnya dilindungi Negara tapi gak biarkan berkembang. Misalnya Syiah di Madura itu harus di lokalisir.

Adanya misi Wilayat al-Faqih yang terus dikampanyekan oleh Iran untuk diekspansikan ke berbagai Negara di luar Iran, itu benar adanya, hal ini diamini juga oleh Jalaluddin Rakhmat (2018), di mana Iran mempunyai misi Wilayat al-Faqih, yaitu untuk mengisi kepemimpinan *ghaibah*nya Imam Zaman (al-Mahdi), sehingga semua madzhab Syiah Imamiyah perlu mengimani para Imam yang ada saat ini di Iran. Tapi corak Islamisme Iran ini berbeda dengan Islamis pada umumnya yang menghendaki selain golongannya harus dibunuh, dan Islamis pada umumnya sangat anti dengan Demokrasi karena itu adalah bagian dari produk Barat, sementara Iran, apakah kita memilih Islam atau bukan Islam sebagai dasar sistem politik kita, mereka mengadakan referendum, dan 90% lebih memilih Islam, jadi itu pilihan rakyat. Inilah yang menjadi pembeda antara Islamis Sunni dan Islamis Syiah.

Bahkan menurut Kang Jalal (2018) jika suatu madzhab ingin besar, ingin masyhur dalam sejarah, maka syaratnya ialah harus memperoleh dukungan dari penguasa, seperti madzhab-madzhab yang sudah tercatat dalam sejarah seperti Syafiiyah di Mesir, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Syiah, Syiah ingin besar harus memiliki kekuasaan, dibuatlah oleh mereka Iran sebagai Negara Syiah modern.

Menjadi penting pembahasan ini di mana Indonesia hari ini banyak dihadiri oleh berbagai ideologi asing transnasional, di mana ideologi itu berada di balik sebuah agama, ada mereka yang menggunakan agama sebagai ideologi maut yaitu sudah berani membunuh bahkan mengebom tempat ibadah, ada juga mereka yang secara terang-ternangan menolak demokrasi namun dengan tindakan halus, bahkan ada juga mereka yang berjuang di parlemen, dan sangat banyak sekali macamnya. Jika semua ini adalah bagian ideology transnasional, maka yang jadi pertanyaan Syiah yang ber*wilayat* kepada Iran adalah bagian dari ideology transnasional yang mengancam keutuhan NKRI.

Tentunya, ini yang menjadi alasan Jalaluddin Rakhmat memutuskan untuk menolak sistem Wilayat al-Faqih. IJABI sudah menentukan pilihan dengan berbagai pengalaman dan dinamika yang berjalan, bahwa menjatuhkan Pancasila sebagai ideologi organisasi sudah menjadi pilihan tepat. Karena bagi IJABI, Imam Ali bukan penerus estafet Wilayah al-'Ammah (Kepemimpinan Politik) melainkan penerus Wilayat al-Diniyyah (Otoritas Agama). Hal ini disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam wawancara:

> Penolakan terhadap Wilayat al-Faqih itu bukan hanya digaungkan oleh saya, banyak dari kalangan Ulama Syiah terkemuka yang juga menolak Wilayat al-Faqih. Dahulu ketika saya masih jadi Syiah Islamis saya meyakini bahwa Imam Ali itu adalah penerus estafet politik, ternyata setelah saya belajar banyak lagi, Hadits Wasiat Ghadir Khum yang difahami oleh Syiah Iran itu keliru, dan di Indonesia tentunya banyak juga orang Syiah yang Iranisme apalagi banyak yang beralumni dari Jami'ah al-Mushtafa Qum Iran.

Selanjutnya IJABI mempunyai tafsir sendiri terhadap Wilayat al-Faqih, bagi Kang Jalal (2018) IJABI berpandangan bahwa Wilayat al-Faqih mempunyai dua makna, yaitu Wilayat al-Diniyah (otoritas agama) dan Wilayat al-'Ammah

(otoritas politik), IJABI telah sepakat bahwa Wilayat al-Faqih bukan otoritas politik, melainkan Wilayat Marja'iyah atau Wilayah di mana kita mengambil sebuah rujukan terhadap *Marja' Taqlid* dalam permasalahan agama, oleh karenanya IJABI menyebutnya dengan Wilayat al-Diniyyah (otoritas agama), IJABI ber*marja' taqlid* kepada Ulama Syiah di Irak bukan di Iran, meski kita pernah juga merujuk ke Ulama Iran.

Pandangan IJABI ini sangat berbeda dengan pandangan IKMAL (Ikatan Alumni Jami'ah Al-Mushtafa) dan ABI (Ahlul Bait Indonesia), dalam www.ikmalonline.com ada sebuah penjelasan Hadits Ghadir Khum, di mana hadits itu adalah wasiat politik Nabi Muhammad kepada Imam Ali as, IKMAL dan ABI menyatakan bahwa Hadis Ghadir Khum adalah hadis yang menegaskan status Kepemimpinan Imam Ali as oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin Ummat Islam (Khalifah) sepeninggal beliau.

Salah seorang Ulama Hadits Syiah Syarafuddin al-Musawi (1982:265-274) mengatakan bahwa hadits Ghadir Khum adalah hadis berpredikat mutawatir, ada beberapa factor pendukung bahwa hadits ini adalah hadits mutawatir, pertama kebiasan atau hukum alamiyah di mana ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah yang selalu diingat oleh generasi selanjutnya, apalagi peristiwa penting dalam politik dan agama, kedua kaum Syiah menjadikan tanggal 18 Dzul Hijjah sebagai peringatan sejarah di mana pada masa itu Rasulullah berkhotbah memberi wasiat kepada Imam Ali, ketiga derajat kemutawatiran hadits ini di lihat ketika Imam Ali menjadi khalifah, ada seorang bertanya "wahai Imam bagaimana aku menganggap engkau sebagai khalifah, sedangkan engkau berbangsa Arab dan saya A'jam?"

Imam Ali menjawab, siapa saja yang menganggap Rasulullah sebagai pemimpin kaum Arab dan A'jam maka saya juga *Maulahu* (pemimpin sepertinya). Di sisi lain, hadis Ghadir Khum juga difahami oleh kalangan Sunni sebagai hadits Shahih dalam Salamah Noor Hidayanti (2014:105-108) bahwa hadits Ghadir Khum adalah peringatan agar umat Islam saling melindungi dan menolong di antara sesama umat Islam, jangan saling mencaci maki bahkan hingga bermusuhan.

Bisa difahami bahwa ada banyak pandangan terhadap tafsir hadits Ghadir Khum di internal umat Islam, namun jika kita ambil benang merahnya bahwa hadits Ghdir Khum adalah hadits yang diakui oleh kedua madzhab besar Sunni-Syiah sebagai hadits yang Shahih atau mutawatir, namun perbedaan yang prinsipil adalah tafsir mengenai hadits Ghadir Khum tersebut, mayoritas ahli hadits dari kalangan Syiah meyakini bahwa itu hadits politik, sedangkan Sunni beranggapan bahwa itu adalah peringatan kepada kaum muslimin agar tidak saling bermusuhan pasca sepeninggalan Rasulullah, dengan merujuk kepada asbab al-wurud (asal muasal hadits) bahwa kondisi masa itu banyak yang tidak seka terhadap kebijakan Ali, sehingga banyak orang yang menghardik dan mencaci Ali.

Selebihnya IJABI mempunyai pandangan tersendiri dalam memaknai hadits ini, yaitu Imam Ali tidak memiliki otoritas politik dalam konteks hadits ini, melainkan Imam Ali adalah pemegang otoritas agama pada masa itu dan ini didukung oleh beberapa hadits yang di kalangan Syiah dan Sunni diakui kredibelitas haditsnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, *anaa madinatul 'ilmi wa 'aliyyu baabuhaa* (saya adalah kota ilmu dan 'Ali adalah pintu ilmu), seperti yang diungkapkan Kang Jalal (2018):

> Belakangan saya tahu yang diamanatkan oleh Rasulullah untuk dipegang teguh ialah Wilayah Diniyah/Fiqhiyyah, Rasulullah itu ingin ada pelanjut ajaran agamanya, karena ada kemungkinan umat ini terpecah-pecah karena perbedaan penafsiran, Rasulullah ingin menitipkan, seperti seorang guru yang mau meninggalkan kelas kata Ali Syari'ati, pasti Rasulullah menitipkan ilmunya kepada muridnya yang paling cerdas, untuk jadi guru. Dan amanah itu dijalankan oleh Imam Ali, pada zaman Abu Bakar dia jadi penasihat Abu Bakar, zaman Umar dan juga Utsman, dia berteriak-teriak dihadapan orang-orang *"Saluunii Qabla an Tafquduunii,* tanyalah aku sebelum kau kehilangan aku" bukan tanya masalah kekuasaan, udah jelas orang tau kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi berdasarkan itu sebagian besar para Ulama tidak menerima Wilayatul 'Ammah.

Apa yang difahami Kang Jalal dan IJABI-nya kalau dilihat dari sudut pandang tafsir atas hadits Ghadir Khum, Kang Jalal mengambil jalan tengah antara Sunni dan Syiah. Dalam tafsir Sunni seperti yang dikatakan Imam Syafi'i dalam Al-Dzikra (2018:64) sesuai konteks hadits pada masa itu *(asbab al-wurud)* bahwa *maula* dalam hadis Ghadir Khum berarti pelindung yang saling tolong menolong antar umat Islam, karena pada masa itu banyak para Sahabat yang tidak satu pendapat dengan Imam Ali ketika Imam Ali mengumpulkan zakat dan mengambil seperlima Jizyah di Yaman, akhirnya para Sahabat berselisih hanya karena kebijakan Imam Ali. Jika kita ambil subtansinya, Rasulullah pada masa itu berpihak kepada Sayyidina Ali, dan menghimbau agar umat tidak berpecah belah, menucullah redaksi hadits *man kuntu maula fahadza 'aliyyun maula*, barangsiapa yang menganggap saya pemimpin maka Ali adalah pemimpin juga. Jalaluddin Rakhmat menafsirkan, *maula* yang berasal dari kata *walaa-yalii-wilayatan* adalah otoritas agama, di mana sepeninggal Rasul umat akan terpecah belah, maka yang jadi rujukan agama adalah Imam Ali.

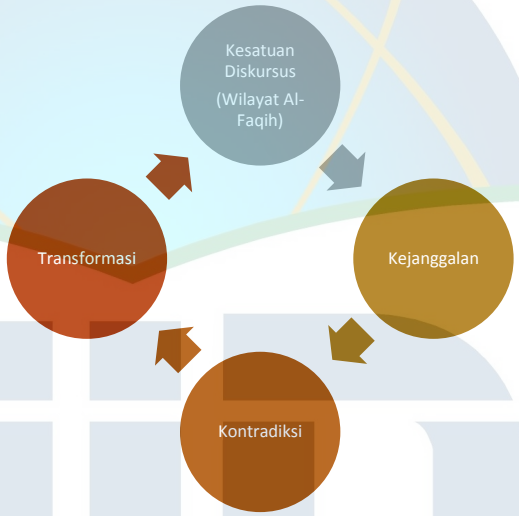
Hal inilah yang disebut dengan diskontinuitas dalam teori Diskursus Foucault (Agusta, 2012:10) yaitu di mana diskontinuitas sejarah pengetahuan berkaitan dengan pandangan, bahwa perkembangan tiap jenis pengetahuan terbatas menurut ruang dan waktu, tidak bersifat universal baik dalam arti teorinya berguna untuk masyarakat sedunia, atau teorinya berlaku sepanjang waktu. Konsekuensinya metode untuk menilai atau mengontrol pengetahuan juga tidak universal, melainkan hanya sesuai dengan ruang dan waktu perkembangan jenis pengetahuan tersebut.

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, IJABI telah berkiprah dalam mencerdaskan anak bangsa, tentunya banyak krikil-krikil berceceran dalam perjalanannya, tuduhan sesat dari eksternal Syiah dan tuduhan *munharifah* (menyimpang) dari internal Syiah juga telah dilalui oleh sosok Jalaluddin Rakhmat dan IJABI-nya. Bagi Kang Jalal, Wilayat al-Faqih yang difahami sebagai kepemimpinan politik *(wilayat 'aammiyah)* hanya diterima oleh satu bangsa saja yaitu Iran, dalam wawancara Kang Jalal (2018) mengatakan:

> Suatu saat Ayatullah Sistani ditanya tentang Wilayatul Faqih, kata Ayatullah Sistani Wilayatul Faqih itu Ijtihad Khomeini, kita gak sepakat masalah itu. Kalau wilayatul 'Ammah hanya satu bangsa aja yang menerima, seperti Wilayatul Faqih di Iran, dan ini tidak diterima di Irak, malah pemilu Irak yang menang dari partai Komunis. Gak bakal diterima juga oleh orang Indonesia, kalau orang Indonesia mikirnya rada bener, jadi saya dianggap orang yang pertama kali menolak Wilayatul Faqih, dan itu disebarkan oleh ABI dan di laporkan ke Iran bahwa IJABI itu menolak Wilayatul Faqih, dan kemarin kita mengajak mereka diskusi, sayangnya Ustadz Umarnya tidak dating.

Sesuai dengan karakternya sebagai orang Indonesia, IJABI terbatas oleh ruang dan waktu yang ada di tempat kelahirannya, ia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan konfrontatif terhadap bangsa, apalagi ada niatan untuk merubah

ideology bangsa Indonesia yang sudah tertanam lama di bumi pertiwi, IJABI melakukan proses-proses transformasi organisasi yang diawali dengan transformasi ideologi dengan mendekonstruksi tafsir teologi lama Syiah tentang Imamah dalam sistem politik *(siyasah)* menjadi Imamah dalam sistem agama *(diniyyah)*. Dalam hal ini tentunya IJABI harus mengambil resiko yang cukup berat, yaitu mengambil jalur moderat antara Syiah ekstrim yang menuduh IJABI anti Wilayat al-Faqih (Iranisme) dan Sunni ekstrim yang menuduh dan memukul rata Syiah sebagai kelompok anti Pancasila dan demokrasi.




**Gambar 1**. Arkeologi Diskursus

Sebuah kejanggalan yang menguat menghasilkan kontradiksi Wilayat al-Faqih di tubuh IJABI. Terdapat dua level kontradiksi (Foucault 2002: 150-179), pertama, kontradiksi penampakan, yang telah didamaikan dalam kesatuan diskursus Wilayat al-Faqih yang lama yaitu teologi Imamah. Kedua, kontradiksi fondasi, yang melahirkan diskursus Wilayat al-Faqih yang baru, yaitu IJABI memiliki tafsir tersendiri dalam memahami konsep Imamah. Analisis diarahkan

kepada berbagai tipe kontradiksi, di mana Wilayat al-Faqih *vis a vis* dengan Negara Pancasila.

Kontradiksi Wilayat al-Faqih yang memuncak menghasilkan transformasi atau diskontinuitas diskursus. Diskontinuitas sendiri adalah praktik untuk menghasilkan perbedaan, diferensiasi atau distingsi dari diskursus Wilayat al-Faqih sebelumnya yang difahami dan ditafsirkan oleh *muhadditsin* (ahli hadits) dari ulama klasik Syiah.

Transformasi pemikiran Jalaluddin Rakhmat mengenai teologi utama Syi'ah (Imamah) yang memiliki perbedaan tafsir dan implementasi terhadap Wilayat al-Faqih dilatarbelakangi oleh fase-fase perjalan pemikiran yang ia kaji selama ini. Sebagaimana Jalal dulu dikenal sebagai cendekiawan Islam yang cukup popular di Indonesia, fase perjalanan hidupnya dipenuhi dengan banyaknya pengalaman yang ia lewati dalam beragama, seperti dalam wawancara Jalal (2018) mengatakan:

> Jadi dalil-dalil menjadi Islamis itu saya tau, dan kita harus mendirikan negara Islam. Ayah saya itu seorang anggota DI/TII, pernah diutus ketemu Daud Beureuh, baru ketemu lagi dengan saya ketika saya mau nikah, dan dia tanamkan betul di hati anak-anaknya bahwa cita-cita seorang muslim itu ialah menegakkan *Li i'laa-i kalimaatillahi al-'Ulya* dan itu dibuktikannya dengan menegakkan negara Islam, jadi saya seorang Islamis dahulu, dulu saya berjuang untuk Islamisme sekarang saya berjuang untuk Islam, yang memebedakannya adalah saya tidak menggunakan ajaran Islam untuk kepentingan politik.

Selanjutnya ketika menjadi seorang Islamis Jalal mencari jati dirinya yang akhirnya berlabuh di salah satu organisasi Islam terbesar yaitu Muhammadiyah, di Muhammadiyah lah Jalal besar menjadi Ulama hingga dijadikan sebagai tim dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu sebuah lembaga penentuan hukum Islam

dengan metode pentarjihan terhadap hadits-hadits Sunni. Jalal juga mengaku dirinya selalu berdiskusi dengan orang-orang di luar Muhammadiyah, Saudara kandungnya sendiri sampai saat ini adalah Ulama Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung, Jalal juga pernah menjadi orang NU namun tidak sampai meletakkan kaki di jabatan NU struktural hanya sebatas menggeluti pemikiran Islam karena kedekatannya denga sosok Gus Dur, bukan hanya itu Jalal juga dikenal sebagai sosok mujahid dakwah seperti Aa Gym, dalam wawancara:

> Saya dahulu sering memancing emosi masyarakat agar menangis ketika saya berdakwah, bahkan ceramah-ceramah saya dahulu 90% berisikan ceramah tentang kesedihan dalam Islam, namun sekarang saya sudah berhenti dari profesi itu, tapi profesi itu malah dilanjutkan oleh Ustadz Aa Gym dan Arifin Ilham.

Perjalanan yang cukup panjang Jalal pun menjadi Syi'ah karena tertarik dengan pemikiran-pemikiran filsafat Islam Syiah kala itu, dan dipasoknya buku-buku gratis dari Iran, selanjutnya masuk salah satu organisasi Mahasiswa yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), sehingga citra HMI Bandung waktu itu kental dengan tradisi pemikiran Syiahnya, bahkan Jalal juga adalah salah satu yang membesarkan dakwah di Masjid Salman ITB. Menurut Jalal, corak HMI pada masa itu sekitar tahun 1966 hingga 1971 ketika Cak Nur menjabat Ketua Umum PB. HMI selama dua periode ada tiga kiblat HMI dalam pemikiran wacana keislaman, di antara ketiganya yaitu pertama pemikiran Islam Progresif yang dimotori oleh aktivis HMI Jogyakarta, kedua Islam Liberal yang digagas oleh Ketua Umum sendiri yaitu Cak Nur dari HMI Ciputat, dan ketiga Islam Syi'ah yang diusung oleh HMI Bandung, termasuk saya. Namun, karena kearifan seorang Cak Nur sebagai tokoh yang pertama kali menyusun NDP (Nilai Dasar Perjuangan) HMI, semua pemikiran Islam itu masuk dalam NDP tersebut, dan

pemikir Syiah ada di dalamnya. Dari situ lah awal Syiah massif dikenalkan kepada para intelektual, termasuk Pak Amien Rais juga sangat mengagumi pemikiran Ali Syari'ati.

Segudang pengalaman ini yang akhirnya Kang Jalal menjadi Syi'ah dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah Yayasan Muthahhari pada tahun 1992, dan baru-baru ini Kang Jalal terjun di dunia politik sejak 2014 menjadi calon legislatif DPR RI dari PDIP. Sebelum menjadi politisi PDIP Kang Jalal mengaku dirinya adalah seorang Islamis Syiah yang bercita-cita ingin menegakkan Wilayat al-Faqih, namun rasanya tidak mungkin karena mayoritas muslim di Indonesia adalah Sunni, tentunya jika hal itu dilakukan akan mendapatkan respon yang sangat buruk dari masyarakat. Upaya itu pernah dilakukan oleh Kang Jalal dalam doktrin internal Syiah hingga berakhir pada kontradiksi yang memuncak, akhirnya Kang Jalal memutuskan untuk menolak bahkan merevisi pandangan lama terhadap Wilayat al-Faqih.

Sepengakuan Kang Jalal, IJABI ingin Syiah Indonesia itu lebih menusantara tidak Iran sentris, karena Syiah bukan Iran, meski Iran adalah Negara dengan penduduk muslim Syiah yang terbanyak. Dalam wawancara Kang Jalal mengatakan:

> Saya ingin Syiah di Indonesia ini memiliki tradisi sendiri, artinya tradisi-tradisi Iran itu jangan diambil, Iran itu tidak sama dengan Syiah seluruhnya, harus ada Syiah Indonesia juga lah, Miftah pernah menyajikan pemaparan tentang Syiah Indonesia di Iran, IJABI ingin mengembangkan Syiah di Indonesia yang ditegakkan di atas nilai-nilai Indonesia, kalau di Sunda saya ingin buat Syiah Sunda.

IJABI telah memberi fondasi awal bagi umat muslim Syiah Indonesia, bahwasannya Islam dipandang secara teologis adalah sebuah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah, dogmatis, dan transeden di mana Wilayat al-Faqih adalah poin penting dalam ajaran Syi'ah. Namun pada titik sosiologis, Islam merupakan fenomena historis, kultural, dan realitas peradaban dalam kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat berbagai macam kelompok, oleh karenanya Islam dengan sendirinya akan membentuk pola-pola pandangan dunia *(weltanschauung)* yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.

Dalam melakukan upaya ini, sering terjadi ketegangan teologis antara IJABI dan komunitas Syiah lainnya yaitu antara keharusan memegang keteguhan terhadap doktrin Wilayat al-Faqih dan keinginan memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut, namun inilah realitas yang mewarnai panorama corak Islam dalam aktualisasinya melalui apa yang disebut pembaharu/*tajdid*/transformasi atau *ishlah/reform*. Bagi IJABI relasi Islam dan Negara sudah selesai dan final pada garis *kalimatun sawaa* (titik temu) yaitu Pancasila dalam lanskap Indonesia, sebagaimana filsuf kelahiran Swiss Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam setiap agama memiliki *common value* (nilai bersama) atau nilai universal, untuk Indonesia nilai itu adalah Pancasila.

Jalal dan IJABI-nya tetap setia dengan tradisi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia, ia tidak mau melibatkan Republik Islam Iran dalam organisasinya, bahkan Jalal tidak pernah mencari legitimasi luar negeri agar diakui sebagai bagian dari Syiah Internasional, bahkan dalam peraturan agama yang di atur oleh pemerintah Indonesia Jalal mengikuti apa yang telah ditentukan

oleh pemerintah, seperti waktu dan jadwal puasa dan lain sebagainya, berbeda dengan ABI yang selalu menentukan dan memutuskan hukum harus sesuai dengan Islam Syiah di Iran.

## B. Bingkai Diskursus dan Transformasi Wilayat Al-Faqih ABI

ABI (Ahlul Bait Indonesia) adalah bagian dari organisasi Syiah yang berkembang di Indonesia, organisasi ini dimotori oleh beberapa orang Syiah dari keturunan Arab Ahlul Bait/Alawi/Habaib. Dari segi nama ABI identik dengan Ahlul Bait keturunan Nabi saja, berbeda dengan IJABI yang menyematkan nama Jama'ah di singkatannya.

Setidaknya kelompok Syiah di Indonesia terdiri dari tiga kelompok yang dominan yaitu keturunan Arab, kelompok kampus/intelektual, dan alumni Qom Iran yang terkumpul dalam organisasi IKMAL (Ikatan Alumni Jami'ah Al-Mushtafa). Secara organisatoris ada dua kelompok Syiah yang cukup mendominasi di Indonesia yaitu IJABI yang dipimpin oleh Jalaluddin Rakhmat dari kalangan kampus/intelektual dan ABI yang menaungi kelompok Arab, Sayyid, dan alumni Qom Iran (Zulkifli, 2017:XV).

ABI dan IKMAL bagian dari komponen Syiah yang ber*marja* kepada Iran, berbeda dengan IJABI yang sama sekali tidak ber*marja* kepada Iran karena penolakannya terhadap Wilayat Al-Faqih. ABI dan IKMAL meyakini bahwa Wilayat Al-Faqih dan Imamah adalah bagian penting dari akidah dasar kaum Syiah, seperti yang dikatakan oleh Muhsin Labib (2018) dalam wawancara:

> Kita sebagai *al-Ahaqqu* (yang paling berhak) dalam faham Syiah ini sangat jelas kita ber-wilayat pada imam-imam yang telah ditentukan oleh para ulama di Iran. Justru karena Wilayatul Faqih, kita harus mendukung demokrasi, mendukung kebhinekaan, mendukung Pancasila, jadi yang tidak ber-Wilayatul Faqih dia tidak mendukung demokrasi, Pancasila, NKRI, dan keragaman. Justeru karena konsep Wilayatul Faqih kami menolak agama sebagai dasar negara, karena konsep itu kami menolak agama sebagai dasar negara. Cukup ekstrim ya?!.

Pernyataan Dewan Syuro IJABI ini sangat menarik, menjadi wacana baru dalam diskursus Wilayat Al-Faqih di Indonesia. Sering kali tuduhan yang dilontarkan kepada kaum Syi'ah itu adalah anti Pancasila dan anti NKRI di balik tuduhan Syi'ah sesat dan menyimpang. Namun, terkadang juga ego sektarian di internal Syiah sendiri itu tidak bisa dihilangkan, berebut siapa yang paling benar dan paling berhak. Secara tidak langsung pernyataan Muhsin Labib membantah pernyataan Jalaluddin Rakhmat (2018) yang mengatakan:

> …Orang Syiah yang ber-Wilayat Al-Faqih, mereka ber*taqiyah*, dan sebenarnya mereka anti Pancasila, tidak jauh berbeda dengan HTI.

Begitu juga ungkapan As'ad Said Ali (2018) yang membenarkan pernyataan Jalaluddin Rakhmat, bahwa Syiah ABI adalah kepanjangan tangan dari Iran dan Hizbullah, bahkan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan *Majma Jahani Ahlulbait* (Lembaga Internasional Ahlulbait) yang banyak pengurus di lembaga itu bagian dari tokoh Syiah Iran dan Hizbullah, tujuannya untuk mengenalkan Syiah dan Wilayat Al-Faqih ke seluruh masyarakat di Dunia, seperti mereka me*recovery* berita-berita Abna *(Ahlulbayt News Agency)* pada berita-berita yang diproduksi oleh Syiah ABI di channel Maula Tv yang secara jelas dikelola oleh ABI. Mereka tahu bahwa media adalah bagian penting dari instrument penyebaran ideologi.

Kedekatan ABI dengan Iran dan Hizbullah juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Syuro ABI, Umar Shahab, menurutnya Syiah terbagi pada tiga bagian yaitu, (a). Syiah moderat, kelompok Syiah ini diklasifikasikan sebagai pengikut Syiah Iran dan Hizbullah, di Indonesia Syiah moderat ini dinaungi dalam organisasi ABI (b). Syiah tradisional, yaitu Syiah yang tidak begitu tertarik dengan politik, kelompok ini minoritas tapi terkesan banyak, karena mereka menghayati Syiah pada simbol-simbol budaya dan pemikiran (c). Syiah intoleran, yang dikenal di kalangan Syiah sendiri adalah bagian dari Syiah Shirazi atau Syi'ah Takfiri, di Indonesia paling sekitar belasan orang yang menganut faham Takfiri dan itu kita kecam.

Syiah ABI adalah wajah Hizbullah di Indonesia, di mana Iran dan Hizbullah adalah kekuatan Syiah yang secara ideologis sangat mengakar dengan karakteristik Wali Faqihnya. Dalam Musa Kazhim (2012:61) Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syaikh Naim Qassem, menjelaskan bahwa Hizbullah mempunyai tiga pilar utama: kepercayaan kepada Islam sebagai wahyu terakhir dan paling komprehensif; jihad; dan Wilayah Al-Faqih. Menurut dia, ketiganya saling terikat dan memperkuat. Yang satu tidak bisa berdiri tegak tanpa yang lain demi terciptanya sebuah organisasi ideologis yang kuat dan kukuh. Dari penjelasan ini ada sebuah pencerahan dan mulai terlihat titik terang di mana sebuah organisasi Syiah tanpa memiliki tiga pilar penting itu tidak akan tercipta sebuah organisasi Syiah yang ideologis, kuat dan kokoh.

Yang mejadi pertanyaan di benak pikiran peneliti adalah bias informasi tentang Syiah Iran dan Hizbullah, karena banyaknya informasi yang sampai

kepada peneliti dengan berbagai perbedaan pandangan dalam memahami Iran dan Hizbullah. Persepsi Hizbullah sebagai kepentingan Tehran di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari citra Hizbullah sebagai kepanjangan tangan dari Iran, jika kita melihat pada sisi itu boleh jadi ABI adalah kepanjangan Tehran di Indonesia, seperti apa yang dipersepsikan Jalaluddin Rakhmat dan As'ad Said Ali.

Namun, persepsi itu dibantah oleh Umar Shahab, bahwa banyak orang yang menuduh konsistensi ABI terhadap Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar Negara dan NKRI sebagai bentuk Negara Republik yang sudah final, dalam wawancara Umar Shahab mengatakan:

> Bahwa di sana-sini ada oknum tertentu yang mengatasnamakan Syiah yang mengeluarkan statemen tertentu yang berbeda dengan sikap dan pandangan ABI itu tidak dapat dikatakan sebagai sikap komunitas Syiah secara keseluruhan.

Dari pernyataannya, Umar Shahab seakan-akan memonopoli kebenaran Syiah yang difahaminya yaitu statemen tertentu yang berbeda dengan pandangan ABI, itu tidak dapat dikatakan sebagai sikap komunitas Syi'ah secara keseluruhan, dalam hal ini kita sering mengenal istilah *mafhum mukhalafah* dalam ilmu Ushul Fiqh atau dalam bahasa hukum adalah *argumentum a contrario* pada kesimpulannya bahwa statemen di luar ABI tentang Syiah adalah adalah statemen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Statemen Umar Shahab ini diperkuat juga oleh statemen Musa Kazhim (2018) yang mengatakan bahwa Syi'ah yang asli Syiah adalah Syiah yang bersumber dari Iran dan para *aimmah* yang telah disepakati oleh Wali Faqih di Iran, di Indonesia Syiahisme adalah ABI dan kelompok-kelompok alumni dari Universitas terkemuka di Iran seperti dari Jami'ah Al-Mushtafa Qum Iran dan

orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di Iran dan dia Syi'ah secara pemikiran dan madzhab, bahkan Musa Kazhim membantah pernyataan Jalaluddin Rakhmat dengan statemen bahwa Pak Jalal itu bukan orang yang terlahir dari Syiah dan besar di Syiah jadi Pak Jalal tidak merepresentasikan komunitas Syiah Indonesia, wong Pak Jalal dari Muhammadiyah kok, wajar saja kalau dia tidak ber-*wilayat al-faqih* Pak Jalal itu cenderung ke Syiah reformis, karena kultur lamanya di Muhammadiyah.

Simpangsiurnya paham Wilayat al-Faqih antara ABI dan IJABI ini, pernah menjadi pemicu konflik di antara keduanya, bahkan pernah diadakannya forum rekonsoliasi dalam menyepakati makna Wilayat al-Faqih dalam lanskap keindonesiaan yang digagas oleh ICC (Islamic Cultural Centre) dalam sebuah seminar nasional yang bertemakan "Negara Islam dalam Perspektif Islam Madani dan Wilayatul Faqih", acara ini di selenggarakan pada 30 Maret 2018 dengan narasumber Ketua Dewan Syuro ABI Umar Shahab dan Ketua Dewan Syura IJABI Jalaluddin Rakhmat, namun kata Kang Jalal dalam wawancara *"Pak Umar Shahab waktu itu tidak hadir, sehingga kesepakatan tentang makna Wilayat Al-Faqih pun tidak ada"*

Hal ini menjadi penting bagi peneliti, karena masih adanya polemik dan perbedaan persepsi di antara internom masyarakat komunitas Syiah, secara garis besar IJABI menolak sistem Wilayat Al-Faqih karena menurutnya itu adalah bagian dari wajah Syiah Iran dan syarat berbau politik yang tidak sesuai dengan konteks keindonesiaan. Sedangkan ABI berpendapat bahwa Wilayat Al-Faqih adalah penguatan bagi kaum Syiah agar tetap mencintai bangsanya. Seperti dalam

buku yang ditulis Tim Ahlulbait Indonesia (2014:335) Wilayat Al-Faqih bermakna ketika masyarakat Syiah menjadi bagian dari bangsa itu sendiri. Sebagaimana iman dan amal mesti seimbang dalam sendi kehidupan kita, maka iman seorang Syiah menjadi sempurna dengan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara di mana ia hidup. Jadi, kesyiahan dan keindonesiaan hamper sejajar. Kesyiahan itu iman dan keindonesiaan itu amal. Iman tanpa amal tidak ada artinya. Dengan kata lain, Syiah tanpa meng-Indonesia tidaklan bermakna.

Dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh para petinggi ABI dan para penggeraknya terutama aktor intelektual yang terus mengembangkan wacana kesyiahan dan Wilayat Al-Faqih menjadi penting bahwa pandangan ABI terhadap Wilayat Al-Faqih tidak menakutkan seperti apa yang diungkapkan oleh orang di luar ABI yang tidak pro terhadap Wilayat Al-Faqih. Bahkan bantahan-bantahan yang disampaikan adalah bentuk respon terhadap serangan dari luar ABI, seperti Muhsin Labib cukup keras membantah tuduhan Jalaluddin Rakhmat dalam wawancara:

> Justeru yang tidak percaya imamah dia anti Pancasila dan pro Khilafah. Jalal itu tidak merepresentasikan Syiah, anda jangan mengambil informan jalanan seenaknya. Syiah di Iran cenderung lebih homogen, Lebanon heterogen, Wilayatul Faqih selalu mendorong untuk mendukung konstitusi di negaranya masing-masing, Syiah sendiri tidak menyukai negara Islam, negara Islam itu milik ISIS, kita Republik Islam. Justeru kita mendukung konstitusi NKRI, aufuu bil ‘uquud, terikat kontrak di negara. Disebut Islam suatu negara karena ada prosesnya dan produknya undang-undang.

Cukup ekstrim memang, banyak praduga yang mengambang tak bisa diselesaikan meski dalam suatu mazhab yang sama. Namun, dalam wacana yang berkembang ini adalah bagian dari adu gagasan dan eksistensi antara ABI dan

IJABI, yang mana keduanya memiliki pengaruh yang cukup besar di tengah masyarakat Syiah, seperti apa yang disebutkan oleh Usep Abdul Matin dalam wawancara:

> Wacana Wilayat Al-Faqih semacam ada ide yang berterbangan yang belum bisa ditentukan kepastiannya, namun pemahaman yang bisa saya ambil itu, masing-masing ingin eksis tetapi ada kendala ada masalah relasi antara IJABI dengan ABI, kalau saya liat kemungkinan karena faktor keturunan, mungkin keturunan Arab, merasa dirinya masih punya darah Habib berdarah Ahlulbait lalu merasa lebih berhak untuk membawa organisasi yang punya label Ahlul Bait.

Lebih jauhnya Usep mengatakan bahwa boleh jadi adanya faktor pendanaan dari Iran, jika kita melihat statemen Muhsin Labib yang secara eksplisit mengadopsi Wilayat Al-Faqih, tentunya ada kepentingan Iran di situ, mungkin di Iran juga ada Syiah yang ingin menyebarkan Wilayatul Faqih seperti Amerika menyebarkan Demokrasi. Praduga ini seolah terkonfirmasi oleh pernyataan Musa Kazhim yang mengatakan:

> Statemen kontroversial Jalaluddin Rakhmat tentang penolakannya terhadap Wilayat Al-Faqih adalah karena distopnya pendanaan dari Iran ke IJABI. Namun, bukan berarti pendanaan itu masuk untuk membantu kepenting Iran di Indonesia, melainkan hanya untuk mengembangkan kepentingan dakwah dan kemanusiaan atas dasar solidaritas madzhab Ahlul Bait.

Melihat konflik kedua organisasi ini Nampak di permukaan tidak terlalu terlihat berkompetisi, dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui ketidakharmonisan kedua organisasi tersebut, terutama Pak Usep adalah salah satu tokoh yang dekat sekali dengan Pak Jalal dan pernah dekat juga dengan ABI, Pak Usep dalam wawancara mengatakan:

> Saya lihat konflik Pak Jalal dengan para Habib berujung kesitu, cenderung mengarah pada relasi yang pada akhirnya kesukuan juga muncul, sedangkan beliau mendobrak hal itu, apalagi misalnya antara Maula dengan Sayyid, selanjutnya

> mungkinkah bahwa seperti Pak Muhsin Labib dan Umar Shahab secara biologis punya *biological capital*, berbeda dengan Pak Jalal yang tidak punya darah keturunan Nabi, apakah ada superioritas untuk mersa lebih *Chauvanisme,* merasa lebih berhak, lebih tinggi dalam hal ke Ahlul Baitan, sedang Pak Jalal sangat menentang itu karena baginya orang itu tergantung ilmu dan amal, itu juga saya merasakan kalau ke ABI agak susah kalau ngobrol itu, kalau ke IJABI lebih mudah, karena sosok Pak Jalal terbuka, siap dikritik.

Tak berhenti di situ, Pak Usep (2018) melihat bahwa apa yang dibawa oleh Kang Jalal selama ini adalah perjalanan intelektual dan spiritual dirinya, bahkan Kang Jalal itu cenderung *talfiq* (mengambil hal-hal yang muda h dari agama yang dipahami oleh berbagai mazhab) tanpa menghilangkan keyakinannya terhadap Ahlul Bait Nabi dan Islam yang didakwahkan oleh Kang Jalal *adalah taqrib baina al-syi'i wa al-sunni* yaitu mendekatkan di antara kedua madzhab besar yaitu Syiah dan Sunni yang selalu dicitrakan di wajah masyarakat tak pernah damai. Jadi bagi Pak Usep, orang Syiah tanpa atau tidak dimulai dengan modal biologis namun dengan pemahaman, pencarian sendiri itu lebih kuat dalam artian lebih dewasa, lebih mudah berbaur daripada misalnya menjadi Syiah dengan mempertahankan Status Quo keturunan darah, dengan klaim kami lebih berhak karena kami keturunan Ahlul Bait itu menunjukan ketidak kuatan dalam presepektif pemikiran Syiah, karena lebih cenderung kepada keturunan, kalau dalam ilmu sosial itu *Ascribed Statue*, kalau Pak jalal *Achieve Statue.*

Terlepas dari semuanya itu, Wilayat Al-Faqih dalam pandangan ABI adalah hal yang tak bisa dikompromi dalam arti itu adalah hak paten yang wajib diimani oleh seorang Syiah, karena Wilayat Al-Faqih itu sendiri sebagai konsekuensi dari doktrin Imamah yang termaktub dalam hadits-hadits mutawatir tentang Ghadir Khum, dari hadits Ghadir Khum itu Imam Ali diangkat sebagai pemimpin politik

sekaligus pemimpin agama tidak ada pemisah di antara keduanya. Adapun Wilayat Al-Faqih bagi umat Syiah di Indonesia hanya mengikat secara konsultatif dalam Bahasa lain adalah *marja'iyyah* atau *maraaji'*/rujukan/referensi (ABI, 2014:335-337).

Dalam agama, kita mengenal istilah madzhab misal Sunni memiliki empat madzhab masyhur yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali begitu juga dengan Syi'ah memiliki madzhab atau marja' yang sudah selevel mujtahid, namun perbedaannya jika Sunni hanya terfokus pada empat madzhab tadi, meskipun banyak sampai saat ini ulama-ulama masyhur di kalangan Sunni sangat banyak dan bias dijadikan rujukan seperti Syaikh Wahbah Zuhaili, Syaikh Ramadhan Al-Buthi dan lain sebagainya, namun ulama-ulama Sunni kontemporer ini masih menyematkan aliran madzhabnya misalah Syafi'iyyah dan lain sebagainya, berbeda dengan Syiah yang mana seorang Imam yang dijadikan *marja' taqlid* adalah *aimmah* yang mengisi kekosongan Imam selama Al-Mahdi Al-Muntadzar atau Imam Zaman belum muncul dari masa *ghaybahnya*, dan untuk mengisi kekosongan *ghaybah al-kubra (major occultation)* itu ialah ditunjuknya para ulama yang memumpuni untuk memegang otoritas agama yang nantinya Ulama tersebut juga disebut dengan Imam atau Mullah.

Konsep Imam ini yang terus menjadi polemik di tengah masyarakat muslim Sunni di Indonesia, sehingga MUI di buku panduannya dalam Syiah Menurut Syiah (2014:103-04) menuduh Imamah adalah konsep yang lahir dan dibuat oleh Abdullah bin Saba. Namun, pernyataan ini juga dibantah oleh Tim ABI dalam bukunya, menurutnya konsep Imamah sudah ada pada masa Rasulullah dan itu

adalah konsep yang dibuat oleh Allah Swt seperti termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah, Ayat 124.

Pada tatanan Imamah, peneliti melihat semua ulama Syiah sepakat harus adanya Imamah, namun Imamah adalah ruang perdebatan antara Sunni dan Syiah atau Syiah dengan mazhab di luar Syiah, namun lain lagi dengan Wali Faqih atau sistem Wilayat Al-Faqih yang menjadi polemik dan berdebatan di internal Syiah. Bagi ABI seorang ulama tidak mungkin berpolitik apalagi mencampuri kepentingan politik praktis, dan adanya statemen yang ber-*wilayat al-faqih* adalah anti Pancasila itu adalah statemen politik, bukan statemen ilmian seperti apa yang dikatakan oleh Musa Kazhim dalam wawancara:

> Agamawan yang mengerti kedudukannya tidak akan masuk kesitu, itu disebut politik praktis, yang dimaksud *high politic* ialah kebijakan umum, Ulama bisa bicara disitu. Ulama dalam pandangan Syiah harus paham zaman dan tempat, kalau ada yang beranggapan berwali faqih adalah anti Pancasila itu adalah satemen politik, bukan statemen ilmiah, Wilayat Al-Faqih mestinya difahami sebagai wilayah atau teritori ke-ulama-an, kalau di Indonesia ke-kyai-an, figur Wali Faqih itu adalah figure Kyai, pemimpin kharismatik, tidak lebih dari itu.

Arti makna Wilayat Al-Faqih sebagai sebuah prinsip agama adalah perkara konsultasi kepada pakar atau mujtahid dari kalangan Syiah, dan Wali Faqih sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk diglobalisasikan, meski upaya itu mungkin saja ada. Untuk konteks Indonesia sendiri, penulis kira rasanya tidak mungkin Wilayat Al-Faqih itu bisa diterapkan dalam konteks Indonesia, namun jika spirit Wilayat Al-Faqih tentunya ada di diri setiap insan Syiah di Indonesia, penulis juga melihat secara kebangsaan mereka sangat Pancasilais, mereka boleh punya paham internom mereka, tapi ketika masuk ranah pubik, mestinya Pancasila.

Tim ABI (2014:338) menulis bahwa dalam Sunni, kepemimpinan dalam bentuk Khilafat itu bersifat administratif, seperti presiden mengurusi sebuah Negara. Sedangkan dalam Syiah, kepemimpinan dalam bentuk Imamah bukan mengurusi Negara tetapi penghubung Antara manusia kepada Nabi dalam menjelaskan agama yang mutlak itu. Dalam penjelasan ini juga, kita harus membedakan antara Rahbar dan Wilayat Al-Faqih, Syiah di Indonesia terkhusus ABI hanya taat kepada Wali Faqih bukan Rahbar, dalam arti makna di sini adalah ketaatan di bidang fiqih yang saat ini sebagian besar percaya dipegang oleh Sayyid Ali Khamene'i. Masyarakat Syiah Indonesia juga lebih memilih Islam sebagai sebuah system masyarakat atau social disbanding menjadikan Islam sebagai sistem politik.

Selanjutnya penulis pahami setidaknya ada empat point penting yang menjadi akar permasalahan konflik kedua Ormas Syiah tersebut, yaitu (a) konflik ideologi yaitu perbedaan pandangan terhadap Wilayat Al-Faqih (b) konflik entik antara Arab dan Non-Arab yang berpengaruh terhadap perebutan legitimasi label Ahlulbait (c) berebut "kuasa" atau pengaruh di tengah masyarakat dengan figur siapa yang paling kharismatik (d) kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh pihak luar dalam hal ini Iran. Kiranya itu poin penting yang penulis amati dari beberapa kasus yang sampai saat ini tak kunjung penyelesaiannya.

Namun, dari empat poin tersebut ada sebuah pandangan yang menarik dari salah satu muridnya Jalaluddin Rakhmat yang juga bagian dari anggota IJABI, Munfaizin Imamah (2018) dalam wawancara mengatakan bahwa ABI ini adalah organisasi atau kumpulan orang Syiah yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam teori

siklusnya sebagai generasi penikmat, ia hanya menikmati hasil jerih payah yang dilakukan oleh generasi pembangun (IJABI), Pak Umar Shahab itu kan dulu bareng Ustadz Jalal di Muthahhari, namun tiba-tiba Pak Umar dan kaum Syiah yang tidak masuk dalam IJABI membentuk organisasi baru bernama ABI dengan mengumpulkan lembaga-lembaga seperti yayasan dan pesantren Syiah yang tidak terafiliasi kepada IJABI. Dan konflik kedua organisasi ini telah diketahui oleh seluruh anggota ABI dan juga IJABI, tapi kami di IJABI mengekspresikan hal yang biasa saja terhadap perbedaan ini.

Penulis melihat, gesekan antara ABI dan IJABI sudah bukan menjadi rahasia elit kedua organisasi Syiah tersebut, melainkan sudah menjadi konsumsi wacana tersendiri bagi para kader, anggota, dan simpatisannya. Terlepas dari konflik ini, penulis melihat bahwa ABI dan Wilayat Al-Faqih tidak bisa dipisahkan, sama halnya dengan Hizbullah dan Wilayat Al-Faqih, karena Wilayat Al-Faqih baginya adalah ruh organisasi yang selama ini memberi semangat perjuangan perlawanan terhadap kaum-kaum *mustakbirin* (orang-orang sombong yang punya kuasa), spirit itu lah yang diambil dari Wilayat Al-Faqih.

Jika ABI tidak bisa dipisahkan dengan Wilayat Al-Faqih lantas apakah ini menjadi sebuah kendala untuk masyarakat Syiah tunduk terhadap konstitusi Indonesia atau sebaliknya Indonesia dalam keadaan tidak aman ketika ada segelintir masyarakat yang memperjuangkan ideologi lain selain Pancasila? Barangkali pertanyaan ini yang mengawang-ngawang di benak pikiran kita.

Dalam konteks ABI penulis melihat ada sebuah transformasi organisasi secara formal-struktural, di mana awalnya adalah sebuah kumpulan komunitas masyarakat dari pelbagai elemen seperti yayasan dan pondok pesantren Syiah di Indonesia, mereka membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Ahlulbait Indonesia (ABI), bukan hanya itu saja ada juga yang memang sebelumnya sama-sama membesarkan IJABI bersama Jalaluddin Rakhmat seperti Umar Shahab dan Musa Kazhim, namun karena beberapa perbedaan pandangan akhirnya mereka berpisah dan membentuk organisasi tersendiri dengan menyematkan nama Ahlul Bait saja.

ABI bertransformasi menjadi sebuah organisasi masyarakat yang syarat tunduk terhadap konstitusi RI tanpa meninggalkan identitas aslinya sebagai Syiah yang berpatron kepada Iran dan Hizbullah. ABI berhasil mempertahankan identitas ideologisnya sebagai gerakan religio-kultural yang mengakar karena prinsip keagamaan yang berubah dari eksklusif ke inklusif yaitu mampu menaungi seluruh elemen masyarakat yang mencintai Ahlulbait Nabi baik dari kalangan Syiah atau non-Syiah, jadi ABI juga lebih cair dalam menghadapi tantangan dakwah di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Dakwah bagi ABI adalah elastisitas memaknai definisi jihad, seperti Hizbullah yang memiliki prinsip jihad yang awalnya adalah gerakan semi militer menjadi organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, budaya dan sosial, meski jati diri politik dalam Hizbullah tidak bisa dipisahkan. Sama halnya dengan ABI karena berada dalam posisi sosio-kultural yang berbeda dengan Iran yang homogen, Indonesia lebih heterogen maka ABI menyesuaikan dengan medan dakwahnya, dan juga ABI tidak

menghilangkan legitimasi religious Wilayat Al-Faqih yang diyakininya, berbeda dengan IJABI yang secara terang-terangan menolak terhadap Wilayat Al-Faqih dari Iran.

Wilayat Al-Faqih yang dipahami ABI bukan dalam konteks menjalankan kepentingan Iran di Asia Tenggara apalagi di Indonesia, Wilayat Al-Faqih bagi ABI hanya sebatas legitimasi religius yang bersifat konsultatif terhadap para ulama, imam, atau mullah di Iran. Sama halnya dengan orang Ahlussunnah yang meminta fatwa terhadap ulamanya di Mesir atau di Saudi Arabia.

Ada beberapa alasan kenapa IJABI dan ABI melakukan transformasi secara konsep dalam memahami Wilayat Al-Faqih, meski coraknya harus berbeda di antara keduanya. Pertama, IJABI dan ABI beralasan efek dari politis yang mengharuskan kedua ormas ini menerima konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena stigmatisasi yang berlaku di kalangan eksternal Syiah dalam makna ini adalah Sunni, bahwa Syiah anti NKRI. Kedua, faktor diskriminatif yaitu di mana banyak orang Syiah yang dibantai oleh kalangan Sunni di pelbagai daerah, hanya karena beberapa hal yang berbeda dalam ritual ibadahnya sehingga komunitas Syiah dalam hal ini meminta perlindungan kepada Negara sebagai hak warganya. Ketiga, minimnya peran Ulama Syiah di Indonesia dalam menentukan sikap keagamaan di dalam institusi pemerintahan seperti Kementrian Agama atau institusi keagamaan yang mencakup seluruh aspirasi umat Islam seperti MUI, karena beberapa kali Syiah sebagai golongan minoritas tidak pernah dilibatkan dalam membentuk sebuah keputusan hukum Islam di MUI. Keempat, sikapa IJABI dan ABI memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam memahami

Wilayat Al-Faqih, secara holistik Wilayat Al-Faqih di IJABI tidak terlalu dihiraukan karena itu hanya bagian dari sistem teodemokrasinya Iran, sedangkan bagi ABI Wilayat Al-Faqih adalah salah satu dari bagian konsep keimana yang tak bias dikompromi bagi orang Syiah.

# BAB IV

# Penutup

## A. Kesimpulan

Berdasar pada analisis peneliti, bahwa diskursus Wilayat Al-Faqih di tengah masyarakat Indonesia masih diwarnai dengan ketakutan-ketakutan adanya sebuah penentangan terhadap dasar Negara RI, bukan hanya di kalangan masyarakat awam, bahkan para intelektual dan akademisi kampus pun menanyakan ulang tentang itu. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua ormas Syiah di Indonesia yang telah mewakili sebagai representasi masyarakat Syiah Indonesia, sehingga kecurigaan itu akan tetap berlanjut dan terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Nah, apa yang telah disampaikan dengan analisis dari peneliti bahwa diskursus Wilayat Al-Faqih sampai saat ini belum selesai dalam arti tidak ada sebuah kesepakatan dalam memaknai Wilayat Al-Faqih antara ABI dan IJABI, peneliti juga melihat adanya jarak yang cukup memisahkan antara ABI dan IJABI. Namun, setidaknya peneliti melihat ada beberapa hal yang menjadi poin penting ketidakharmonisan kedua organisasi Syiah tersebut yaitu antara kepentingan politik dan ideologis; pertama, kepentingan politik dalam arti adalah kepentingan kuasa atau pengaruh kharismatik di tengah masyarakat Syiah di Indonesia, kedua kepentingan ideologis di mana ABI membawa ideologi Wilayat Al-Faqih yang diyakininya sebagai legitimasi religious dari Iran sebagai rujukan ulama-ulama mereka dalam memutuskan masalah agama, sedangkan IJABI melihat Wilayat Al-

Faqih dari Iran tidak terlalu penting karena ada unsur politik dan budaya yang memaksakan bagi masyarakat Syiah Indonesia, artinya membawa-bawa budaya Iran dan batas-batas agama yang harus disesuaikan dengan Iran padahal itu adalah bagian dari budaya, misal IJABI meyakini bahwa berbuka puasa itu harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena taat terhadap pemerintah yang ada adalah bagian dari agama, berbeda dengan ABI yang harus mengikuti apa yang ditetapkan batasannya oleh Ulama Syiah di Iran.

Secara lebih rinci, peneliti menguraikan hasil penelitian ini dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Transformasi Wilayat al-Faqih dalam konteks umat Syiah menerima sistem Pancasila memiliki perbedaan pandangan, IJABI melakukan transformasi ideologi dan social-religio di mana IJABI tidak lagi mengikuti Wilayat Al-Faqih Iran, IJABI memiliki ijtihad sendiri Wilayat Al-Faqih dalam pengertian IJABI juga terbagi dua yaitu *Wilayat Al-'Ammah* (Wilayah Politik) dan *Wilayat Al-Fiqhiyyah/Diniyyah* (Wilayah Agama), bagi IJABI Wilayat Al-Faqih dari Iran itu tidak bisa dipisahkan antara *Wilayat Al-'Ammah* dan *Wilayat Al-Fiqhiyyah* oleh karenanya IJABI menolak Wilayat Al-Faqih dalam pengertian Iran karena dengan mengikutinya adalah mengikuti kebijakan politik Iran yang suatu saat bisa jadi mempengaruhi kepentingan domestik Negara Indonesia. Bahkan secara jelas Jalaluddin Rakhmat mengatakan saya adalah orang yang pertama kali mengenalkan Wilayat Al-Faqih di Indonesia dan saya juga adalah orang yang pertama menolak Wilayat Al-Faqih di Indonesia, dan

orang Syiah yang ber*wilayat al-faqih* ke Iran mereka secara otomatis anti terhadap Pancasila. Transformasi yang dilakukan IJABI ini merupakan hasil dari kajian-kajian para Ijabiyyun dalam menyikapi Wilayat Al-Faqih. Berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat, Syiah ABI mengikuti dan meyakini Wilayat Al-Faqih, justeru baginya Wilayat Al-Faqih adalah sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan ideologi, karena ABI meyakini Wilayat Al-Faqih adalah bagian dari iman, dan ketika seorang beriman tentunya harus beramal, maka Wilayat Al-Faqih bagi ABI adalah iman dan mencintai berpancasila adalah amal, jadi sama sekali ber*wilayat al-faqih* itu tidak mendegradasi amal kita sebagai warga Negara Indonesia, bahkan tidak melunturkan rasa kecintaan jamaah ABI terhadap NKRI dan Pancasila. Justeru menurut ABI sebaliknya, orang yang tidak patuh dan iman terhadap Wilayat Al-Faqih adalah orang yang anti terhadap Pancasila. Sederhananya, Wilayat Al-Faqih bagi ABI layaknya seorang Kiai pada Santrinya. Penulis berkesimpulan bahwa transformasi yang dilakukan ABI adalah transformasi organisa sosio-kultural saja, tidak ada transformasi ideologi seperti yang dilakukan oleh IJABI. ABI memandang bahwa karakteristik Wilayat Al-Faqih tidak bisa dipisahkan dalam doktrin Syiah dan biarlah itu tetap menjadi tradisi kultural Syiah yang tetap mengakar. Sekiranya ada empat faktor yang membuat kenapa IJABI dan ABI harus melakukan transformasi konsep Wilayat Al-Faqih, (a) faktor politik; (b) faktor stigmatisasi terhadap komunitas Syiah; (3) faktor sedikitnya peran Ulama Syiah dalam penentuan sikap keberagamaan; (4)

untuk membedakan antara IJABI dan ABI sebagai dua komunitas Syiah terbesar yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami konsep Wilayat Al-Faqih.

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa transformasi ideologi Wilayat Al-Faqih ini memang ada di sebagian masyarakat Syiah, namun ada juga yang tidak melakukan transformasi ideologi, melainkan ia bertransformasi secara sosio-kulturalnya sehingga Wilayat Al-Faqih bisa difahami secara luas dalam arti mampu menerima ideologi Negaranya di mana masyarakat Syiah berkembang, sehingga tidak menghilangkan tradisi ideologisnya yang telah mengakar. Secara sosiologis, transformasi itu akan terus ada dalam setiap lembaga, seperti apa yang dilakukan IJABI dan ABI pada level organisasi sipil.

## B. Saran

Dengan mengacu pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar para peneliti selanjutnya mengembangkan diskursus Wilayat Al-Faqih di Indonesia, agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang fenomena diskursus ini, terkhusus untuk para ilmuan sosial atau politik yang ingin terjun di dunia pemikiran politik Islam. Isu Wilayat Al-Faqih akan terus menjadi isu seksi dan sensitif untuk terus dikaji, karena isu ini adalah bagian dari isu global yang berkaitan dengan Negara-negara super power di Timur Tengah terutama kekuatan Saudi yang berkoalisi dengan Israel telah menjadi super power baru di Timur Tengah, bahkan ada sebuah statemen dari Ahmadinejad bahwa Negara Islam (Iran) mampu mengalahkan Negara super power.

Untuk kedepannya, boleh jadi isu Wilayat Al-Faqih yang syarat Iranisme ini akan terus mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan sesuai dengan konteks zaman yang terus berkembang, tentunya menjadi penting untuk melihat pengaruh itu bagi masyarakat muslim Syiah di Indonesia yang ber*wilayat al-faqih* ke Iran. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh-pengaruh itu akan tetap ada.

Juga, tak kalah penting, sebuah penelitian dengan pisau analisis diskursus Foucault belum begitu popular di kalangan intelektual sosial di Indonesia, khususnya sosiologi. Analisis Foucault ini menawarkan cara pandang baru terhadap ruang lingkup ilmu social, di mana Foucault melihat sesuatu masalah dari hal yang berbeda atau yang sering disebut dengan pencarian terhadap akar dualism antara normal dan abnormal.

Oleh karena itu, terkhusus bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan pembacaan terhadap fenomena social dengan pisau analisis Foucault dalam disiplin ilmu sosiologi, dengan harapan agar disiplin ilmu sosiologi dapat semakin berkembang dan melahirkan kajian-kajian yang dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa, agama, dan Negara dengan berbagai problem-problem materinya.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal


Agusta, Ivanovich. 2012. *Diskursus, Kekuasaan dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Ahlulbait Indonesia, Tim. 2014. Syiah Menurut Syiah. Jakarta: Ahlulbait Indonesia

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia. 2000. Muktamar I IJABI di Lembang.

Anis, Muhammad. 2013. *Politik Syiah dan Demokrasi: Pengalaman Iran Pasca Revolusi Islam 1979.* Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Anis, Muhammad. 2015. "Pemikiran Politik Syiah: Perspektif Wilayah Al-Faqih". dalam Maarif 10(2):87.

An-Nahidl, Ahmad Nunu. 2014. IJABI dan Pendidikan Ahlul Bait: Studi Kasus Pada Yayasan Muthahhari Bandung. Jakarta Pusat: Puslitbang Kemenag. Jurnal Edukasi, Vol.12

Ashshiddiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Azra, Azyumardi. 2016. Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi. Ciputat: Kencana

Bertens, K. 1996. *Filsafat Barat Abad XX Jilid II Prancis*. Jakarta: Gramedia.

Carrette, Jeremy R. 2011. Agama, Seksualitas, dan Kebudayaan: Esai Kuliah dan Wawancara Terpilih Foucault. Yogyakarta: Jalasutra

Cutting, Gary. 2005. *Foucault: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Darmodiharjo, Darji., ed. 1991. *Santiaji Pancasila.* Surabaya: Usaha Nasional.

Denzin, et al. 1993. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications: Thousand Oaks.

Dreyfus, L. Hubert dan Rabinow, Paul. 1983. *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutic*. Chicago: The University of Chicago Press

Dwi R, Agnes, Akhol Firdaus, Apridon Zaini. 2012. Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2011. Jakarta:Pustaka Masyarakat Setara

Effendy, Bachtiar. 2009. Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Graha Paramadina

Eickelman, Dale. 1998. Ekspresi Politik Muslim. Mizan: Bandung.

Foucault, Michel. 1997. *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews.* Oxford: Basil Blackwell.

Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings* 1972-1977 (ed) Colin Gordon. New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas* . Jakarta: Gramedia.

Foucault, Michel. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Foucault, Michel. 1976. *Mental Ilnes and Psychology*. New York: Harper Torchbooks.

Gaban, Farid. 2006. *Apa dan Siapa Hizbullah dan Nashrallah?*. Jakarta: Misbah

Geertz, Hildred. 1981. Aneka Budaya dan Komunitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Hadar, Leon T. 1992. "The 'Green Peril': Creating the Islamic Fundamentalist Threat", *Cato Policy Analysis,* 177.

Hadiz, Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Hardiman, F, Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Haryatmoko. 2002. "Kekuasaan Melahirkan Anti-kekuasaan: Menelanjangai Mekanisme dann Teknik Kekuasaan Bersama Foucault," dalam Basis (Vol. 1, No. 1). Januari-Februari.

Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis.* Yogyakarta: Kanisius.

Hasjimy, A. 1993. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Hatta, Moch. 1998. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kebangsaan dan Kerakyatan.* Jakarta: LP3ES.

Hosen, Ibrahim. 1984. Rekomendasi Faham Syiah. Jakarta: MUI

Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century.* Norman: University of Oklahoma Press.

Imamulhaq, Ahmad Arif. 2000. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid dan Ayatullah Khomeini tentang Negara dan Demokrasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Teori Post-Modernisme.* Jakarta: Buku Obor.

Janet, Afari. dan Kevin, Anderson. 2005. *Foucault and The Iranian Revolution: Gender and The Seductions of Islamism.* Chicago: Chicago University Press.

Kaufmann, Walter. 1967. "Friedrich Nietzsche" dalam *The Encyclopedia of Philosophy.*. *London*: Collier Macmillan.

Kajian IKMAL, Tim. 2015. Syiah Antara Fitnah dan Fakta. TITISAN

Kazhim, Musa. 2013. Hizbullah Sebuah Gerakan Perlawanan atau Terorisme?. Jakarta: Penerbit Noura Books

Kendall, Gavin. dan Wickham, Gary. 1999. *Using Foucault's Methods*. London: Sage Publication.

Khumaini, Imam. 2010. *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*. Jakarta: Sadra Press.

Latif, Yudi. 2012. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20*. Jakarta: Democracy Project.

Lari, Sayid Mujtaba M. 2004. *Imam Penerus Nabi Muhammad Saw; Tinjauan Historis, Teologis, dan Filosofis*. Jakarta: Lentera.

Magnis Suseno, Franz. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius

Marvasti, Amit B. 2004. *Qualitative Research in Sociology: An Introduction.* New Delhi: SAGE Publications.

Masruci, Zainal Aris. 2002. Existensi Syi'ah di Indonesia: Wacana tentang Konstelasi Reaksi Sunni terhadap Faham Syi'ah di Indonesia sebagaimana Terefleksi dalam Buku Mengapa Kita Menolak Syi'ah. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga

McHoul, Alec & Wendy Grace. 2002. *A Foucault Primer: Discourse, Power and the Subject.* London: Routledge.

Mills, James H. 2003. *Cannabis Britanica: Empire, Trade, and Prohibition*. London: Oxford University Press.

Mills, Sara. 2003. *Michel Foucault.* New York: Routlegde.

Muthahhari, Murtadha. 2014. Imamah dan Khilafah Rekonstruksi Kepemimpinan Sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual. Yogyakarta: RausyanFikr Institute

Muzaffari, Mehdi. 1994. Kekuasaan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas

Natsir, Mohammad. 1973. *Capita Selecta. Jakarta*: Bulan Bintang

Nietzsche, Fredrich. 2002. *Beyond Good and Evil.* Cambridge: Cambridge University Press.

Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Appoaches.* Boston: Pearson Education.

Noorhidayati, Salamah. 2014. Hadis Gadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syiah (Telaah Ma'nawi al-Hadis), Laporan Penelitian Individual, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi/IAIN Tulungagung.

Oedijo, Soedaman, dan Jitno. 1963. *Doktrin Revolusi Indonesia*. Surabaya: Narsih

Prawiranegara, Sjafruddin. 1983. "Surat untuk Presiden Soeharto Perihal: Pancasila Sebagai Azas Tunggal". Jakarta

Penerangan, Departemen. 1947. Lahirnja Pantja-Sila Pidato Pertama Tentang Pantja Sila jang diucapkan pada tg.1 Djuni 1945 oleh Bungkarno. Djakarta: C.V. Brawo Niaga

Pinem, Milda Longgeita Br. 2014. *Diskursus Corporate Social Responsibility: Pengetahuan dan Kekuasaan.* Jogjakarta: Azzagrafika.

Porter, James. I,. 2006. "Nietzsche's Theory of the Will to Power", *dalam Keith Ansell Pearson (ed.), A Companion to Nietzsche.* London: Blackwell.

Qurtuby, Al, Sumanto. 2017. "Pluralitas Syiah dan Relasi Sunni-Syiah di Arab dan Timur Tengah." dalam Tashwirul Afkar (No. 36).

Rabinow, Paul. 1984. *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.

Rakhmat, Jalaluddin. 2016. *Afkar Penghantar Sekumpulan Pengantar*. Bandung: Penerbit Nuansa

Renita, Emilia AZ. 2009. *40 Masalah Syiah*. Bandung: IJABI

Rosidi, Achmad., ed. 2017. *Dinamika Syiah di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Rosyada, Dede., ed. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Rouse, Joseph. 2005. "Power/Knowledge" dalam *The Cambrigde Companion to Foucault (ed) Gary Gutting*. New York: Cambridge University Press.

Uri Rosset. 2011. "Hizballah and Wilayat al-Faqih," Herzliya Conference Working Paper

Saefullah, Hikmawan. 2015. "Ancaman Syiah, Persepsi, dan Wacana Kontra Revolusi." dalam Maarif 10(2):18-20.

Sahidin, Ahmad. 2015. "Memahami Sunni dan Syiah: Sejarah, Politik, dan Ikhtilaf." dalam Maarif 10(2): 31.

Salamuddin. dan Repantu, Candiki. 2015. *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam.* Medan: Perdana Publishing.

Santoso, Listiyono., ed. 2015. *Epistemologi Kiri.* Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Schumpeter, Joseph. 1994. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Routledge.

Shahab, Umar. 2006. *Khumaini dan Negara Syiah Modern.* Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

Sheridan, Alan. 1980. *Michel Foucault: The Will to Truth.* New York: Tavistock Publication

Shihab, Quraish. 2014. *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?.* Ciputat: Penerbit Lentera Hati

Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah.* Jakarta: Mizan.

Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Smart, Barry. 2002. *Michel Foucault.* New York: Routledge.

Subhani, J. 2013. Panorama Pemikiran Islam dari Definisi Agama hingga Konsep Wilayat Al-Faqih. Jakarta: Nur Al-Huda

Syari'ati, Ali. 2013. *Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: RausyanFikr.

Tibi, Bassam. 2016. Islam dan Islamisme. Bandung: Mizan

Vaezi, Ahmed. 2004. *Shia Political Thought. London*: Islamic Centre of England.

Vaezi, Ahmed. 2006. *Agama Politik: Nalar Politik Islam.* Jakarta: Citra.

Wahid, Abdurrahman. 1985. Islam, Negara, dan Pancasila. Majalah Aula

Wahid, Abdurrahman., ed. 1999. Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah

Wahyudin, Ahmad. 2013. *Sistem Demokrasi Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Yunus, M, Rafli. 1976. *The Necessity of Imamah According to Twelver Shi'ism; With Special Reference to Tajrid Al-I'tiqad of Nashiruddin Al-Thusi.* Montreal: McGill University

Zahroh, Abu, Ahmad. 1992. *Al-Madzhib Al-Islamiyah.* Bandung: Mulya Abadi.

Zulkifli. 2013. *The Struggle of The Shi'is in Indonesia*. Australia: ANU E Press.

Zulkifli. 2014. *Education, Identity, and Recognition: The Shi'i Islamic Education in Indonesia.* Studia Islamika: PPIM UIN Jakarta (Vol. 21, No. 1)

Zulkifli. 2016. Kesalehan 'Alawi dan Islam di Asia Tenggara. Studia Islamika: PPIM UIN Jakarta (Vol. 23, No. 3)

Zulkifli. 2017. *Shi'i Identity and Nationalism in Indonesia's Reformasi*. ICSPS: Jurnal Atlantis Press (Vol. 129).

Zulkifli. 2017. "Prolog" Dinamika Syiah di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

**Internet**

http://www.ijabi.or.id/, diakses tanggal 3 Januari 2018.

http://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/sejarah-ahlulbait-indonesia/, diakses tanggal 5 Januari 2018.

http://www.annasindonesia.com/profil/iftitah-dan-sejarah-aliansi-nasional-anti-syiah, diakses 5 Januari 2018.

https://nasional.tempo.co/read/427062/kisah-kang-jalal-soal-syiah-indonesia-bagian-1, diakses 10 Maret 2018.

https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad, diakses 10 Maret 2018

https://nasional.kompas.com/read/2009/04/18/06433927/hubungan.strategis.iran-hezbollah, diakses 20 Maret 2018

https://safinah-online.com/wawancara-seputar-komisi-bimbingan-dan-dakwah-dewan-syura-abi/ , diakses 27 Maret 2019

https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/visi-misi-ahlulbait-indonesia/ diakses 27 Maret 2019

**Wawancara**

Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, Ketua Dewan Syuro sekaligus pendiri Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesi (IJABI).

KH. Syamsuddin Baharuddin, Ketua Tanfidziyah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)

Dr. Muhsin Labib, MA, Ketua Komisi Bimbingan dan Dakwah Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia (ABI)

Dr. Umar Shahab, Tokoh Syiah segaligus Ketua Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia (ABI)

Dr. Dina Y. Sulaeman, Pengamat Geopolitik Timur Tengah sekaligus Anggota Ahlul Bait Indonesia (ABI)

Dr. Usep Abdul Matin, MA, Akademisi sekaligus penulis disertasi Activism, Conflict. And the Islamic Public Sphere in Indonesia: The Enlightment Project of Jalaluddin Rakhmat.

Musa Kazhim, Intelektual Syiah Indonesia, Editor Senior Mizan, sekaligus anggota Ahlul Bait Indonesia (ABI)

As'ad Said Ali, Tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN)

Zuhairi Misrawi, Pemerhati Timur Tengah, Direktur Muslim Moderate Society (MMS)

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar, Ulama dari kalangan 'Alawi non-Syiah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fachriah Tangerang

Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar, Rabithah Alawiyah

**LAMPIRAN I**

**TRANSKRIP WAWANCARA**

**Transkrip Wawancara I**

Informan : Dr. Dina Sulaeman

Lokasi : ICC Jakarta Selatan

Status : Anggota IJABI, Pengamat Timur Tengah

Tanggal : 25 Mei 2018

Waktu : 22:00 WIB

| No | Dialog | Komentar |
|---|---|---|
| 1 | P: Bagaimana tanggapan anda tentang konflik di Suriah dan Palestina? | |
| | I: Kalau konflik Suriah itu, kita tahu bahwa yang angkat senjata adalah kelompok-kelompok yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Jordania, dan Uni Emirate Arab. Nah, negara-negara ini membiayai kelompok-kelompok peberontak Suriah itu dengan tujuan ingin menggulingkan Bashar Assad. Nah, pertanyaannya kenapa Assad ingin mereka gulingkan? Karena, selama ini Assad itu tidak berdamai dengan Israel, jadi dianggap sebagai ancaman untuk Israel, dan kita tahu Amerika Serikat dalam setiap kebijakan luar negerinya, khususnya untuk Timur Tengah itu selalu mengedepankan kepentingan Israel, karena mereka punya doktrin ***"kepentingan Israel sama dengan kepentingan Amerika"*** gitu. Nah, jadi antara konflik Suriah dan konflik Palestina ini sebenarnya saling terkait dengan sangat erat, karena ada faktor Israelnya. Jadi kita lihat juga betapa setelah konflik suriah terjadi mulai tahun 2011 akhir sampai sekarang akibatnya apa? Perhatian dunia terhadap Palestina sangat berkurang, jadi media masa sangat sibuk memberitakan tentang Suriah, sehingga terabaikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel di Palestina. | |
| 2 | P: Tapi kenapa informasi di media, yang masuk ke Indonesia berbeda dengan tanggapan anda? Misal di beberapa media non mainstream di Indonesia sangat gencar mem-*blow up* kejahatan Assad? | |
| | I: Iya, karena memang informasi itu kan, orang banyak menerima informasi dari **** ini ya, artinya gini sebenarnya yang saya sampaikan itu ada di media-media massa mainstream, jadi bahwa misalnya yang memberikan senjata untuk kelompok pemberontak Suriah itu Amerika, Jordan, Turki tuh ada, saya tidak membuat-buat, itu ada dan bisa dibaca di media mainstream bahkan itu, video-videonya juga ada misalnya pernyataan anggota perlemen, pernyataan tokoh-tokoh Amerika kayak gitu kan, bahwa mereka mengkritik mengecam pemerintahnya kenapa membiayai, mendanai kelompok teror yang jelas berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda, tapi kenapa orang Indonesia tidak mendengar itu, terutama karena akses informasi mereka mungkin, mereka hanya menerima informasi dari medi-media | |

| | | |
|---|---|---|
| | online yang memang berafiliasi denga kelompok-kelompok teror itu, kita tahu misalnya ISIS, Al-Qaeda atau kelompok-kelompok misalnya Jaisy Al-Islam di Suriah itu, itu kan di belakangnya adalah Ikhwanul Muslimin, nah Ikhwanul Muslimin itu kan punya cabang di Indonesia, ustadz-ustadz di Indonesia itu banyak yang berideologi Ikhwanul Muslimin dan mereka sumber informasi untuk orang-orang di Indonesia yang ikut pengajian misalnya dan ada ustadz-ustadz selebriti juga yang sering masuk Tv, nah itu berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini gitu, makanya informasinya juga berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi | |
| 3 | P: Apa peran Iran dalam kancah politik global, dalam menangani konflik di Suriah dan Palestina ? | |
| | I: Iya, Iran itu menjaga kepentingannya sendiri, artinya dia terancam dengan keberadaan ISIS, Al-Qaeda, seandainya Suriah tumbang itu kekuatan ISIS dan Al-Qaeda dengan mudah akan menyebar masuk ke Iran, jadi Iran itu menjaga agar itu nggak berkembang, jadi diputus ininya, kekuatannya sampai di Suriah saja, makanya Iran atas permintaan resmi dari pemerintah Suriah masuk ke dalam medan perang untuk melawan ISIS, melawan Al-Qaeda dan afiliasinya karena ada ratusan nama di sana kan tapi ideologinya sama. | |
| 4 | P: Nah, kemarin itu Jendral Qassem Sulaimani Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), secara resmi mengumumkan dimulainya perang gerilya melawan pasukan AS di Suriah dan Irak. Qassem Sulaimani di bantu dengan milisi Hizbullah dari Lebanon, sebenarnya hubungan Iran dan Hizbullah Syed Hassan Nashrallah di Lebanon itu seperti apa? | |
| | I: Kalau hubungannya jelas itu hubungan ideologis ada ya, kemudian ketika awal berdirinya Hizbullah itu juga kan dibantu oleh Iran juga, tapi kalau saat ini Hizbullah itu adalah lembaga yang independen yang tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan Lebanon, karena Lebanon itu terancam terus, diinvasi atau diagresi oleh Israel dan juga keberadaan ISIS juga mengancam Hizbullah juga, seandainya ISIS dan Al-Qaeda dan afiliasinya yang berkuasa di Suriah itu dengan mudah Lebanon juga akan dilibas setelah itu, jadi ***Hizbullah itu menjaga negaranya saat ini dengan memerangi ISIS di Suriah sebenarnya menghalangi ISIS supaya tidak masuk ke Lebanon.*** | |
| 5 | P: Sebenarnya Hizbullah itu ormas sepert NU, Muhammadiyah, atau Partai Politik? | |
| | I: Partai Politik, ikut politik, jadi awalnya Ormas seperti NU, Muhammadiyah betul, tapi punya senjata jadi berperang juga, tapi dalam bidang sosial juga berperan, jadi bikin sekolah, bikin rumah sakit kayak gitu kan, terus juga melayani kepentingan masyarakata.ya seperti Ormas di Indonesia lah, tapi bedanya punya milisi bersenjata juga. Nah, kemudian akhirnya setelah aman,setelah Isarel berhasil diusir, kan tadinya Lebanon Selatan dididuki oleh Israel. Setelah Israel berhasil diusir tahun 2000, mereka pun bikin Partai Politik dan ikut serta dalam proses demokratisasi di Lebanon. | |
| 6 | P: Nah, Hizbullah itu kan mengikuti Wilayatul Faqih di Iran dan tunduk terhadapnya, mengimani dan mengamini kepemimpinan poltik di Iran. Apakah Muslim Syiah atau madzhab Ahlul Bayt di Indonesia | |

| | | |
|---|---|---|
| | juga harus mengikuti Wilayatul Faqih di Iran? | |
| | I: Kalau saya pikir itu sangat terkait dengan individu, itu urusan individu ya, artinya mungkin harus ditanyakan kepada Ormas Ahlul Bayt ya bukan ke saya, tapi setahu saya, hal-hal seperti itu, itu terkait sama urusan individu tidak secara politik, jadi Hizbullah, Syed Hassan Nashrallah misalnya sangat mematuhi Ayatullah Khamenei itu saya melihatnya dalam tataran individu, tapi secara politik dia kan independen, dia melakukan hal-hal yang dianggap tepat untuk Lebanon. | |
| 7 | P: Oke. Menurut anda, karena Wilayatul Faqih itu lahir dari konsep dan doktrin Imamah, dan ini mencakup doktrin teologi sebagai keyakinan. Bagaimana sebagai seorang mazhab Ahlul Bayt di Indonesia menyikapi Wilayatul Faqih, apakah harus bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Karena itu kan, sistem politik tapi menyangkut keyakinan. | |
| | I: Nah, itu saya gak bisa jawab ya, kurang tahu saya, tapi intinya gini, harusnya dilihat untuk mengetahui apakah hal seperti itu atau tidak, harusnya dilihat pernyataan-pernyataan resmi dari Ormas, dan Ormas Ahlul Bayt di Indonesia apa aja, dan pernyatan resminya seperti apa. Setahu saya selama ini mereka tetap mengkampanyekan Pancasila, jadi artinya ketaan itu hanya di bidang ibadah, bukan di bidang politik. | |
| 8 | P: Oke. Bagaimana pendapat anda tentang gerakan-gerakan anti Syiah di Indonesi, seperti ANAS (Aliansi Nasionalis Anti Syiah)? | |
| | I: ya, itu imbas dari konflik di Timur Tengah ya, imbas dari, bagaimana elit-elit di Timur Tengah yang berkepentingan untuk menggulingkan Suriah demi Israel, itu ingin mendapatkan dukungan, terutama dukungan dana dan dukungan petempur atau pasukan, nah dengan cara apa? Ya kalau di Indonesia dengan cara ini ya, menciptakan musuh ilusi atau imajiner yang dikatakan bahwa misalnya *"Di Suriah itu orang Syiah membantai orang Sunni"*, akhirnya muncullah kemarahan di publik dan kemudian teradikalisasi, bergabung bersama kelompok-kelompok radikal, pergi ke Suriah untuk berjihad. Jihad "tanda kutip". Nah, kemudian sebagian yang lain mengeluarkan uang dan itu jumlahnya sangat besar hanya dalam seminggu ada lembaga tertentu bisa dapat uang 11 M, kayak gitu kan untuk Suriah, dan ia terus menerus mengkampanyekan ada kejadian ini, itu, di Suriah dengan informasi yang salah, jadi yang bermain juga uang yang besar sekali di sini, jadi kita lihat, kalau saya melihatnya ini ada kepentingan uang juga dan kepentingan partron mereka,partron mereka siapa? Gitu kan. Kelompok-kelompok ini berpartronnya ke negara mana? Dan kita tahu juga Saudi terutama, Saudi yang berkepentingan perang di Suriah. | |

**Transkrip Wawancara II**

Informan : As'ad Said Ali

Lokasi : Rumah Pribadi

Status : Mantan Wakil Ketua BIN

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| No | Dialog | Komentar |
|---|---|---|
| 1 | P : Bagaimana pendapat anda tentang Syiah di Indonesia? | |
| | I : Maaf ya, saya tidak benci sama Syiah, ndak. Hanya karena konsep dia seperti itu, ada 5 juta aja sudah merusak itu, karena dapat dana dari Iran untuk menyebarkan Wilayatul Faqih itu. | |
| 2 | P : Memang saya sudah beberapa kali ketemu dengan Ahlul bait terutama tokoh-tokoh IJABI dan ABI, kedua kelompok ini ternyata punya konflik yang cukup signifikan, pertama permasalahan di Wilayatul Faqih, kelompok IJABI Kang Jalal menolak Wilayatul Faqih, karena berideologikan pancasila, sedangkan kelompok ABI sangat memegang prinsip dan konsep Wali Faqih, dalam sebuah berita online kompas.com yang saya baca, ada ancaman dari Lebanon terutama Hizbullah untuk menyerang Syiah yang menolak Wilayatul Faqih, komentar Pak Kiai tentang kelompok yang menolak Wilayatul Faqih ini seperti apa ? | |
| | I : Lebanon yang Hizbullah itu ABI, kalau yang IJABI itu Gerakan Amal *(Amal Movement)* pimpinannya Nabih Berri dari dulu itu sudah ada, Amal itu sekuler IJABI-nya kalau di Indonesia, dia tidak mendukung Negara Islam, tapi di antara keduanya kalau di politik itu satu, tapi pas masuk menjadi beda, sebenarnya dua-duanya satu kesatuan, di Lebanon sama kaya di Indonesia, konsep Teokrasinya tetep ada. Ya gimana, mereka punya hadits dan al-Qur'annya sendiri untuk memahami konsep Teokrasi itu. Mereka punya Quran sendiri kok, yang mashhaf Utsmani itu 1/3 Qur'an mereka, mereka menyimpan sebagian Qur'an mereka. Jadi dulu ada salah satu surat al-Qur'an yang palsu dari Syiah, tapi ketauan. Alasan mereka taqiyah itu mempunyai rahasia-rahasia di Internal mereka, yaitu keyakinan terhadap Imam-imam mereka, jelas kok di *al-Kafi al-Kulaini* itu. | |
| 3. | P : Berati ada ketakutan juga negara, jika jumlah masyarakat Syiah meningkat di Indonesia? | |
| | I : Ya harus takut, jika di Jakarta ada dua juta saja kita bisa kalah, dua juta, punya kuasa, bertaqiyyah, kemudian dibantu dengan duit, makanya bagus juga Saudi lawan dia pakai Wahhabi. Yang jadi persoalan kita menghadapi dua-duanya antara Wahabi dengan Syiah, jadi repot kita. Yang kita sayangkan, kita ini kan NU ya bagaimana pun Pak Said Aqil itu pimpinan NU, tapi dia lebih | |

| | | |
|---|---|---|
| | dekat dengan Syiah dan Iran, tapi Pak Said bukan Syiah. | |
| 4. | P: Jadi banyak statement orang NU yang dikutip oleh mereka, sehingga ini menguntungkan juga bagi mereka. Nah, selanjutnya Pak Asad kan mantan Wakabin, kira-kira pernah ada gak jumlah statistik warga Syiah di Indonesia yang dirilis oleh BIN? | |
| | I : Gak banyak lah, gak terlalu banyak, 2 jutaan lah, tapi kalau dipublish di umum katakan saja 5 sampai 10 juta, kira-kira begitu makanya menghadapi dia pagari dakwah kita, langkah lebih lanjut lewat tentara, orang banyak anggap sepele, kalau negara ada Syiahnya 5% aja pasti bisa kacau, Yaman itu kan kacau ada Syiahnya Houti itu Syiah Zaidiyah, lihat itu juga Syiria, konsep yang digunakan Wilayatul Faqih, itu kan konsep Negara Teokrasi, Demokrasi tapi Syiah seperti Irak, makanya ada Baqir Sadr nasionalis Irak, Syiah, tapi anti Wali Faqih Iran. Dulu juga ada lawan politiknya Khomeini namanya al-Khoei atau Abu al-Qasim al-Khoei yang menentang konsep Wali Faqih, dan diteruskan oleh Ali Sistani dari Irak. Sekarang begini orang muja-muja Hizbullah bisa lawan Israel, akibat dialah Yerusalem di tangan Israel, jadi kan gini,orang Syiria, orang Persi itu kan suku-suku Arya, pinter-pinter tapi, demi untuk demi menguasai dunia Arab, dulu kan ada perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel, ya intinya menginginkan berdirinya negara Palestina dan perdamaian Timur Tengah, syarat negara Palestina diakui ini harus menunjulkan Palestina ini benar-benar berdamai jangan pakai kekerasan, lalu apa yang terjadi sekarang bikin lah Hamas dibantu Hizbullah ini, lawanlah Intifada itu, Hamas itu dibantu Ikhwanul Muslimin juga. Sekarang, setiap ada kekerasan yang kalah pasti yang pake kekerasan, citranya kalah hingga jadi jelek, Hamas dikendalikan oleh Iran, termasuk PKS bantu Hamas, dari dulu Ikhwanul Muslimin dekat dengan Syiah | |
| 5. | P : Bapak dapat darimana pak kitab ini ? | |
| | I : Ini Kitab Al Kafi kok, ini kan Syiah, kalau kamu ke Qum Iran hanya Imam yang bisa megang kitab ini. Ini baru sedikit, hanya satu Surat al-Wilayah sisanya ada di Mashhaf Fathimah itu, ini gini dek, kaya Ahmadiyah itu gimana kita mengatasinya, padahal kalo kita memelihara yang sesat itu salah Negara harus bergerak, kalo begitu agama terus bertambah, lah ini Islam tapi ganggu sampean, ini perang kepercayaan, dan bisa membingungkan Umat, tapi you gabisa lawan Syiah, harus kita lokalisir. Houthi itu belum sampai Syiah, Syria malah tanpa Syiah, Basher Al Assad, disana dikenal Alawi. Alawi itu kebatinan Islam, kalau orang Syiah gak mau solat bareng kita kecuali dia imamnya, kita dianggap bodoh dan tak berlogika, orang NU tidak bisa dipercaya oleh Syiah, karena kita juga gak percaya dengan Syiah | |
| 6. | P : Lalu peran Gus Dur waktu itu membantu terselenggaranya pendirian IJABI dengan Kang Jalal itu seperti apa? | |
| | I : Kan Intelektual ya, Surat Al-Wilayah, itu coba baca itu, Syiah Indonesia gak bisa ngelak itu ada kok | |
| 7. | P : Berarti posisi Gus Dur ngehormati intelektual lah ya ? | |
| | I : Ya Gus Dur ngormati, Gus Dur kira kaya Syiah di Pasuruan, | |

| | | |
|---|---|---|
| | Pasuruan bukan Syiah Iran bahkan Sayid Jufri buat Panglima Syahid Husain, jadi jangan bikin dalil kalo Gus Dur telah ngomong, seperti dia pas ngelawan Soeharto aja dia selaku intelektual | |
| 8. | P : Jadi memang mereka ada misi untuk menyebarkan Wali Faqih itu di Indonesia? | |
| | I : Sangat, sangat ada misi itu, itu hanya taktik aja. Pada akhirnya juga begitu, karena tekanan Amerika Irak akhirnya gak jadi, makannya ISIS kuat karena Sunni bantu ISIS, yang jadi permainan Iran ya Syiah ini, kita gak boleh ngebunuh orang Syiah, di Maroko kaya gitu Syiahnya dilindungi Negara tapi gak biarkan berkembang. Misalnya Syiah di Madura itu harus di lokalisir. | |
| 9. | P : Tapi saya baru tau kedekatan Ikhwanul muslimin dengan Iran | |
| | I : Politik, kan. Sama-sama anti mesir kan. Kalau Fatah Nasionalis, berjuang yang menghasilkan ya Fatah, Hamas justru merecoki, karena Hamas Syiah, satu-satunya negara Syiah di dunia Iran, jumlahnya sekitar 200 juta, yang besar ada di Iran, Lebanon, dan Irak, di Saudi juga ada sekitar dua juta. | |
| 10. | P : Kelompok Syiah memang aliran paling politis | |
| | I : Iya, makanya dia kan memang ingin menguasai negara. Kalau Ahlussunnah kan nggak, gak harus diwajibkan jadi presiden, selama negara ini negara aman. | |

**Transkrip Wawancara III**

Informan : Dr. Jalaluddin Rakhmat, MS.c

Lokasi : Rumah Pribadi

Status : Dewan Syuro IJABI

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| | | |
|---|---|---|
| 1 | P : Apa pandangan Kang Jalal tentang Syiah dan Wilayatul Faqih? | |
| | I : Ada beberapa pengantar untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama perkenalan kepada Islamisme, ada perbedaan utama antara Islam dan Islamisme jadi saya mulai dulu dengan ini, menceritakan sebuah peristiwa, jadi datang ke DPR, rombongan *Democratic Action Party* yang sekarang koalisi dengan Mahatir dan Partai Amanah memenangkan pemilihan umum di Malaysia, pimpinannya yang juga berkunjung pada saya, pada waktu itu menjadi menteri keuangan, dan teman saya di partai Amanah menjadi Menteri Pertahanan, mereka datang ke DPR khusus menemui saya dan mulai dari ketua sampai sekretaris dan bendahara semuanya satu tim lengkap berkunjung ke DPR. Mereka tanya, mengapa saya yang dahulunya aktivis Islam kok sekarang masuk Partai PDIP kenapa tidak masuk Partai Islam, saya bilang ada jawaban panjang dan pendek, jawaban pendeknya ialah dahulu saya berjuang untuk Islamisme sekarang saya berjuang untuk Islam, lalu apa bedanya Islam dengan Islamisme? Nah itu jawabannya panjang, jadi secara singkat Islam adalah sebuah agama, sebuah jalan hidup, sebuah rangkaian upacara-upacara, dan sebuah cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Islamisme adalah sebuah ideologi politik yang disandarkan pada ajaran-ajaran Islam atau dalam bahasa lain Islamisme adalah politisasi Islam, kalau itu terlalu abstrak, Al-Hamdulillah gerakan 212 memberikan contoh yang baik buat saya, shalat berjamaah subuh itu ajaran Islam itu merupakan ritus-ritus yang wajib kita jalankan sebagai orang Islam, tapi ketika shalat subuh berjamaah dijadikan cara untuk memobilisasi massa yang dilakukan oleh 212 itu islamisme, itu lagi yang dikhotbakhan setelah shalat subuh berjamaah itu bukan lagi khotbah Islam itu khotbah Islamisme, banyak orang berdebat apakah shalat jum'at di lapangan itu diperbolehkan atau tidak, sah atau tidak, kalau masjid-masjid masih belum terisi, wah terjadi perdebatan itu perdebatannya sekitar ajaran Islam yang kita sebut fiqih, tetapi ketika shalat jum'at itu dilakukan di Monas dengan tujuan-tujuan politik maka itu adalah Gerakan Islamisme, ini harus dibedakan antara Islam dan Islamisme, ada tiga golongan yang tidak mau membedakan Islam dan Islamisme, pertama kelompok Islamophobia, yang benci sama Islam di Barat, jadi kalau ada tindakan misalkan itu tuh kelompok Thaliban yang menindas perempuan sehingga Times telah memberitakan gambar seorang perempuan dipotong hidungnya karena tidak taat pada suaminya, atau Islamic State yang menjual perempuan menjadikannya budak, kata mereka, memang ajaran Islam begitu, memang Islam itu anti perempuan, memang Islam itu penuh dengan kekerasan, perbudakan, memang ada dalam Islam, itu memang | |

| | | |
|---|---|---|
| | ajaran Islam, untuk membuat orang benci kepada Islam, eh kalau kalian masuk Islam nanti kalian akan ditindas sebagai perempuan, eh kalau kalian mendirikan negara Islam kalian akan melanggar hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh ISIS, eh kalau kalian masuk Islam kalian akan jadi teroris, jadi mereka tidak mau membedakan Islam dengan Islamisme, kalau menurut saya Thaliban itu Islamis, penganut Islamisme kita sebut Islamis, kalau penganut Islam itu muslim, penganut Islamisme juga muslim tapi muslim plus, plus ideologi politik. | |
| 2 | P : Kalau Wilayatul Faqih sendiri itu bentuk Islamisme atau bukan? | |
| | I : Makanya sebelum kesana anda harus pahami dulu bedanya ini, karena nanti penjelasan saya tentang Wilayatul Faqih berkisar pada Islam dan Islamisme, tapi harus dipahami *deui*, pahami *heula* bahwa seorang Islamis itu muslim, PKS itu muslim, teroris itu muslim, karena mereka orang Islam, menjalankan Islam dan mengikuti agama Islam, sekali lagi agama Islam. Cuma bedanya dengan Islamis seorang Islam titik tidak mempolitisasi ajaran Islam, lalu dia gunakan Islam untuk tujuan merebut kekuasaan dia menjadi seorang Islamis, kalau dia merebut kekuasaan, tadi ada tiga orang yang tidak mau membedakan, pertama Islamophobia kedua Islamis sendiri, Islamis tidak mau membedakan itu, jadi ketika kami ini mengadakan gerakan 212 kami menamainya gerakan bela Islam, supaya semua orang Islam jadi ikut, kalau kamu merasa Islam harus ikut, harus masuk kepada Islam Kaffah. Jadi dalil-dalil saya menjadi Islamis itu tau, dan kita harus mendirikan negara Islam. Ayah saya itu seorang anggota DI/TII, pernah diutus ketemu Daud Beureuh, baru ketemu saya ketika saya mau nikah, dan dia tanamkan betul di hati anak-anaknya bahwa cita-cita seorang muslim itu ialah menegakkan *Li i'laa-i kalimaatillahi al-'Ulya* dan itu dibuktikannya dengan menegakkan negara Islam, jadi saya seorang Islamis dahulu, dulu saya berjuang untuk Islamisme sekarang saya berjuang untuk Islam, yang memebedakannya adalah saya tidak menggunakan ajaran Islam untuk kepentingn politik, kelompok Islamis ini tidak membedakan itu, jadi orang-orang Ciamis yang jalan kaki sampai sandalnya rusak, itu demi Islam, padahal menurut saya bukan demi Islam mereka tertipu, itu demi Islamisme, demi tujuan politik sekelompok orang yang menggunakan label-label Islam, cerita-cerita Islam, atau ajaran-ajaran Islam ya Shalat, karena sih kalau menyantuni fakir miskin itu tidak kelihatan Islam, karena orang lain juga ada yang menyantuni fakir miskin, Kristen juga banyak, tapi kalau Shalat, puasa itu kelihatan Islamnya. Kelompok Islamis biasanya menggunakan identitas Islam untuk tujuan politiknya, satu lagi adalah orang-orang, umumnya para intelektual atau politisi yang tidak mu membedakan Islam dengan Islamisme, karena mereka tidak mau mengkritik Islamisme karena nanti dituduh tidak Islami, mereka juga tidak berani menyalahkan orang yang mau mendirikan negara Islam, karena nanti ia takut dituduh Kafir, istilahnya kelompok tiga itu menjaga ***Political Correctness,*** supaya tidak dianggap ulama sesat, dia berusaha menunjukan keberpihakannya kepada Islam padahal dalam hati mereka tau Negara Islam itu ***The Impossibe State***, konsep yang tidak mungkin diwujudkan. Kemudian kedua, *Wilayatul Faqih* itu Islamisme itu ideologi yang ditegakkan di atas ajaran-ajaran Islam memperjuangkan satu sistem politik yang berdasarkan ajaran Islam seperti yang dipahami oleh Imam Ayatullah Khomeini, saya termasuk orang pertama yang | |

| | | |
|---|---|---|
| | mengenalkan Wilayatul Faqih di Indonesia, saya pernah menulis beberapa artikel tentang Wilayatul Faqih, ini ada hubungannya dengan Syiah di Indonesia. Tapi Wilayatul Faqih ini mengalami perkembangan pemikiran yang sangat signifikan, yang membedakan Wilayatul Faqih dari Islamisme yang lain dia Islamismenya agak unik, jadi ia menggunakan ajaran Islam untuk merebut atau menegakkan kekuasaan, tetapi pada awalnya Imam Khomeini tidak untuk merebut kekuasaan, dia ingin menentang kedzaliman, dan menentang kezaliman itu adalah ajaran Islam baik dia politis maupun tidak politis, kalau seorang pembantu dianiaya oleh majikannya terus kita bela itu bukan Islamisme, itu Islam karena memperjuangkan keadilan, jadi pada awanya Imam Khomaini itu memperjuangkan keadilan, itu tujuan utamanya. Sebagaimana Imam Ali merebut kekuasaan, karena dia dikasih dan Imam Ali juga, sampai ketika Imam Ali ditawari kekuasaan setelah terbunuhnya Utsman, Imam Ali juga mengatakan *"Ketahuilah oleh kalian! Bahwa kekuasan bagiku itu harganya tidak lebih dari tali sendalku atau lebih rendah dari tali sendalku tapi aku mau jadi pimpinan kalian kalau kalian mau memilih aku, aku tidak mau diangkat jadi pimpinan kalian* ***ghaira majbuuriin wa laa mukrahiin*** *aku tidak mau kamu itu memilih aku karena terpaksa"* jadi, prinsipnya menurut Imam Ali kita bisa jadi pimpinan, memegang kekuasaan, tapi kita harus dipilih tidak dengan keadaan terpaksa, tapi harus berdasarkan sukarela, itu yang kita sebut demokrasi sekarang ini berdasarkan pilihan, dan Imam Khomeini menawarkan ajaran Islam itu, apakah mau nggak diperintah berdasarkan Wilayatul Faqih, di pemilihan umumkan *(voting)* karena itu kelompok Islamis yang lain menganggap Republik Islam Iran itu bukan Republik Islam karena dasarnya demokrasi, karena kelompok Islamis itu dia hanya menerima pemilihan umum sampai memasukan suara dia, tapi setelah dia menang, dia tidak lagi menggunakan pemilihan umum, karena demokrasi itu kata mereka sistem Barat yang bertentangan dengan Islam, nah sementara Iran, apakah kita memilih Islam atau bukan Islam sebagai dasar sistem politik kita, mereka mengadakan referendum, dan 90% lebih memilih Islam, jadi itu pilihan rakyat, kalau kita mendirikan Negara Islam kita rebut kekuasaan dan siapa yang menentang kita kita bunuh, itu yang membedakan secara khas Wilayatul Faqih di Iran dengan kelompok Islamis lainnya terutama di kalangan Sunni, dan Wilayatul Faqih itu lahir dari konsep Imamah karena itu Ijtihad Imam Khomeini saja, banyak Ulama sampai sekarang yang tidak setuju Wilayatul Faqih di antaranya Ayatullah Sistani, ketika saya membahas Wilayatul Faqih di ICC , saya mengkritik Wilayatul Faqih, jadi Wilayatul Faqih di Iran juga mengalami perbaikan konsep terus menerus tapi pada intinya negara harus dipimpin oleh Ulama, dan dalam Wilyatul Faqih itu di bicarakan posisi Ulama, jadi Wilayatul Faqih itu tidak semua seperti yang di Iran, orang bisa menganut Wilayatul Faqih dari berbagai jenisnya, kesalahan kita orang Syiah di Indonesia ada yang menganut Wilayatul Faqih ada yang tidak, itu Wilayatul Faqih yang mana? Kalau bisa nanti mungkin minta rekaman tentang wilyatul fakih pada diskusi itu, semua ulama sepakat dengan Imam Khomeini sampai satu titik bahwa wilayah harus diberikan pada Allah, kepada Rasul, dan kepada Aimmah, itu semua sepakat Imam Khomeini memperinci, kekuasaan yang sejati itu hanya ada di tangan Allah Swt, semua Ulama setuju, bahkan bukan Syiah juga setuju. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Yang kedua untuk menjalankan kekuasaan Allah di bumi ditunjuklah para nabi, para Nabi itu membawa Risalah untuk menegakkan perintah-perintah Allah di muka bumi, itu juga sepakat. Sampai yang ketiga Aimmah, itu Sunni dan Syiah berpisah, walau pun dalam pelaksanaannya Sunni juaga tetap ikutnya sama Imam, karena siapa sih itu yang merumuskan apa yang kita sebut syariat islam, para ulama, para Imam lah, Syariat itu bikinan Ulama bukan bikinan Tuhan, karena itu terjadi perbedaan antara Abu Hanifah, Imam Syafii, dll, saya kasih contoh tentang wudlu dalam al-Qur'an hanya ada beberapa ayat, sedangkan dalam kitab fiqih itu Bab Thaharah itu ada satu jilid, itu siapa yang bikin? Itu Ulama, tafsiran atas teks. Itu dari Ulama dari Imam, jadi Sunni juga ikut Imam. Walhasil secara singkat itu yang disebut Hukum Tuhan juga mengikuti para Imam. Sepakat di situ ketiganya, Cuma Imam Khomeini melanjutkan bahwa setelah Imam Mahdi gaib maka yang memegang wilayah itu adalah para ulama dan Ulama itu harus ahli fiqih, karena definisi Ulam menurut Syiah adalah Ahli Fiqih, maka disebutlah Wilayatul Faqih, sampai disini Wilayatul Faqih juga para ulama sepakat, tapi Wilayatul Faqih yang mana? Imam Khomeini berpendapat seorang faqih itu memilik dua wilayah, satu wilayah dalam fatwa-fatwa fiqih yang harus diikuti itu disebut al-Wilayah al-Fiqhiyyah, dan kedua ulama juga harus memegang Wilayatul 'Ammah jadi yang mengatur negara, mendistribusikan kekayaan. Sampai kepada Wilayatul Fiqhiyyah itu semua Ulama Syiah sepakat Ayatullah Sistani sepakat dll, tetapi sampai Wilayatul Ammah terjadi perbedaan pendapat, ulama jangan dibebani oleh Wilayatul 'Ammah karena para Imam juga ternyata tidak memegang Wilayatul 'Ammah, kecuali kalau ada saat-saat tertentu seperti Imam Ali dan Imam Hasan, itu hanya pada beberapa periode saja Imam Ali juga memegang Wilayatul 'Ammah, bahkan kalau Imam Ali itu tugasnya ketika di Ghadir Khum harus memikul Wilayatul 'Ammah, harus jadi khalaifah, itu wasiat Nabi, dan *itu kepercayaan saya dulu ketika jadi Islamis*, tapi kemudian waktu itu Sunni berargumentasi kalau betullah isi Ghadir Khum itu ada, mungkin ada tafsiran lain, kalau benar ini wasiat Nabi tentu Imam Ali akan berjuang mati-matian kata Sunni, ini wasiat Nabi kok. Belakangan saya tahu yang diamanatkan oleh Rasulullah untuk dipegang teguh ialah Wilayah Diniyah/Fiqhiyyah, Rasulullah itu ingin ada pelanjut ajaran agamanya, karena ada kemungkinan umat ini terpecah-pecah karena perbedaan penafsiran, Rasulullah ingin menitipkan, seperti seorang guru yang mau meninggalkan kelas kata Ali Syari'ati, pasti Rasulullah menitipkan ilmunya kepada muridnya yang paling cerdas, untuk jadi guru. Dan amanah itu dijalankan oleh Imam Ali, pada zaman Abu Bakar dia jadi penasihat Abu Bakar, zaman Umar dan juga Utsman, dia berteriak-teriak dihadapan orang-orang *"Saluunii Qabla an Tafquduunii, tanyalah aku sebelum kau kehilangan aku"* bukan tanya masalah kekuasaan, udah jelas orang tau kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi berdasarkan itusebagian besar para Ulama tidak menerima Wilayatul 'Ammah, dan Imam Khomeini juga pada akhirnya tidak menerima Wilayatul 'Ammah kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada orang lain, dia sendiri hanya pemimpin spiritual aja sebelum meninggal dunianya itu, Cuma ia sangat dipatuhi nasihat-nasihatnya seperti waktu itu menyarankan Hashemi Rafsanjani untuk kepersidenan, untuk Majelis para Fuqaha pimpinannya | |

| | | |
|---|---|---|
| | waktu itu Ayatullah Miskini, dan di lembaga negara dibentuk semacam kumpulan para fuqaha yaitu Majelis Khubregan, tapi Imam Khomeini tidak ada di situ, dia tidak mengganggu kekuasaan, dia kembali ke sajadahnya, dan yang diikuti sekarang risalah fiqihnya saja. Suatu saat Ayatullah Sistani ditanya, tentang Wilayatul Faqih, kata Ayatullah Sistani Wilayatul Faqih itu Ijtihad Khomeini, kita gak sepakat masalah itu. Kalau wilayatul 'Ammah hanya satu bangsa aja yang menerima, seperti Wilayatul Faqih di Iran, dan ini tidak diterima di Irak, malah pemilu Irak yang menang dari partai Komunis. Gak bakal diterima juga oleh orang Indonesia, kalau orang Indonesia mikirnya rada bener, jadi saya dianggap orang yang pertama kali menolak Wilayatul Faqih, dan itu disebarkan oleh ABI, bahwa IJABI itu menolak Wilayatul Faqih, dan kemarin kita mengajak mereka diskusi, sayangnya Ustadz Umarnya tidak datang, posisi Wilayatul Faqih itu gimana buat Indonesia? Buat Indonesia Wilayatul Faqih yang kita setujui itu adalah Wilayatul Faqih yang disetujui oleh mayoritas Ulama Syiah, yaitu seorang Faqih hanya berkuasa pada Wilayah Fiqhiyyah atau Wilayah Diniyyah, untuk urusan politik, urusan kekuasaan, itu diserahkan kepada negara masing-masing, ***saya juga akan menerima Wilayatul Faqih dalam pengertian Imam Khomeini, kalau diterima secara demokratis oleh orang Indonesia.*** Tapi kembali lagi, saya berpegang kepada apa yang disepakati oleh seluruh ulama Syiah, yaitu bahwa seorang Faqih hanya mempunyai kewajiban Wilayah Fiqhiyyah saja, dia memimpin ummatnya untuk menjalankan agama, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para Imam, hingga Imam Mahdi Shahibuzzaman pun hanya memiliki kekuasaan pada wilayah fiqhiyyah saja, ada sebuah Hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Ali, bahwasannya nanti al-Mahdi akan menghakimi setiap individu dengan hukum agamanya masing-masing, Kristen dihukumi dengan Injil, Yahudi dengan hukum yang berlaku pada Taurat, dan menghakimi seluruh ummat beragama dengan kepercayaan yang mereka yakini, sedangkan kalau Imam Mahdi memiliki otoritas di Wilayatul 'Ammah sudah pasti semua manusia dihukumi dengan hukum Islam, bahkan Rasulullah juga tidak, konstitusi Madinah yang ditulis itu isinya sangat pluralis, itu negeri pluralis yang pertama. Nabi pernah ditegur oleh Allah, Allah SWT berkata kenapa mereka menjadikan kamu sebagai hakim padahal mereka punya taurat padahal itu merupakan hukum Allah dan kemudian mereka berpaling, Allah Swt mengatakan telah menurunkan Taurat, Taurat juga hukum Allah, tapi kata Islamis, Taurat kan sudah diubah maknanya, sama saja Al-Quran sekarang juga telah dirubah-rubah maknanya. | |
| 3 | P : Iya, sebetulnya bukan hanya Mashhaf Utsmani tapi banyak juga Mashhaf-mashhaf yang lain yang mungkin secara teks pun berbeda, bukan hanya makna saja, contok ada Mushhaf Ibn Abbas. | |
| | I : betul, dulu ada madzhab ath-Thabari, al-Tsauri, bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal ketika bertanya masalah fiqih pasti bertanya kepada Sufyan al-Tsauri, yang sekarang hilang madzhabnya. Kembali lagi, Rasulullah tidak memegang Wilayatul 'Ammah, jadi saya lihat dalil-dalil Ayatullah Sistani sangat kuat dan dalil-dalil yang menolak Wilyatul Faqih, jika ditanya saya ikut Wilayatul Faqih atau tidak, iya ikut dalam urusan Wilayatul Fiqhiyyah, dan ada dalil dari nabi ketika nabi awal-awal dakwah. Saya menulis buku Islam dan Islamisme, ya sebelumnya pernah ditulis oleh | |

| | | |
|---|---|---|
| | Bassam Tibbi, kebanyakan mereka yang masuk Islam itu cara prakteknya Islamisme, buku yang saya buat mau untuk masyarakat awam bukan para akademisi. Saya bercerita tentang kisah nabi sendiri, bab pertama Rasulullah tidak ingin merebut kekuasaan ia hanya ingin menyebarkan nilai-nilai yang akhlak. Sekarang untuk mendirikan agama orang hadirkan akhlak . Imam Ali melihat umat Islam itu seperti bayi yang diperebutkan oleh dua orang ibu dan meminta keadilan kepada Sayyidina Ali, Imam Ali mengeluarkan pedang, saya potong anak ini, lalu si Ibu yang satu berteriak, "jangan wahai Amiral Mu'minin, serahkan saja pada dia (Ibu yang satunya)", Imam Ali langsung memutuskan, "kamu adalah Ibu sejati, kamu tidak rela anakmu dibelah dibagi dua" nah Imam Ali melihat Umat Islam itu seperti Bayi, ia adalah Ibu ummat yang sesungguhnya, dari pada ummat terpecah belah. Nabi ditanya oleh Jibril, *"Hey Muhammad, engkau ingin jadi Malikan Nabiyya atau 'Abdan Nabiyya" doesn't want any kingdom, ha as slave,* Rasulullah hanya ingin menjadi pelayan bagi umatnya. Diantara ulul azmi yang memegang wilyatul amma hanya Nabi Musa. Mungkin Islmaisme diperlukan suatu saat karena terjadi kedzaliman tetapi tidak untuk merebut kekuasaan yang tidak ada contoh semisal ada contoh mungkin yang buruk yaitu dinasti Utsmaniyah, banyak budak belian, kemewahan para raja dalam istana dan sebagainya, seperti Saudi sekarang. Itulah pendirian IJABI, kita hanya menolak Wilayatul Faqih yang dirumuskan oleh Khomeini, kami sangat menerima Pancasila, dan itu tidak bertentangan dengan keyakinan saya, tapi ***kalau kamu tanya orang ABI, Pancasila itu bertentangan dengan Wilayatul Faqih.*** | |
| 4 | P : Saya kan masuk Grup ICC, banyak yang kritik Ustadz Jalal, pasca seminar menolak Wilayatul Faqih itu, saya jadi bingung itu? | |
| | I : Maka dari itu, kita lihat, kalau yang masih tetap berpegang pada Wilayatul Faqih dan ujungnya anti Pancasila, itu implikasinya kalau Wilayatul Faqih itu berarti tidak menerima Pancasila, karena harus Wilayatul Faqih itu yang menjadi ideologi negara tadi, itu bohong dan gak masuk logika, "saya ini menerima Wilayatul Faqih tapi menerima Pancasila", itu impossible seperti saya menerima ini segi tiga dalam bentuk lingkaran, itu menolak gagasan Pancasila. Jadi memang kritiknya tidak ada yang masuk kepada saya, orang Iran juga sepakat Saya. Di Iran ada Gerakan kebangkitan Islam dan ada yayasannya dan itu dari berbagai madzhab. Ya saya dan IJABI pernah dilaporkan ke Iran gara-gara menolak Wilayatul Faqih itu, sama orang ABI. Ya, ABI ini mirip-mirip HTI lah. | |
| 5 | P : Yang ABI tadi gimana Kang? | |
| | I : Kalau ada yang mengatakan bahwa ABI itu menerima Wilayatul Faqih dan sekaligus juga menerima Pancasila itu logikanya bisa ditanyakan kepada mereka apa, itu saya gak paham, karena kalau kita menerima Pancasila harus menanggalkan dari Wilayatul Faqih itu Wilayah 'Ammah, dan hanya pada urusan fiqhiyyah saja, dan di Indonesia Syiah Marja'nya tidak hanya kepada Sayyid Ali Khamene'i, ada juga yang dari Irak Marja'nya Ayatullah Sistani, di kedutaan Iran juga banyak yang Ayatullah Sistani, di Iran sendiri banyak yang ikut Ayatullah Sistani tapi bukan berarti memusui Wilayatul Faqih. Yang harus kita pikirkan itu, menerima Ayatullah Sistani bukan berarti memusuhi Wilayatul Faqih, ia cuma tidak menerima Wilayatul 'Ammah aja. Yang jadi permaslahan oleh orang-orang ABI itu, tidak setuju dengan Wilayatul Faqih berarti memusuhi | |

| | | |
|---|---|---|
| | Wilayatul Faqih, implikasinya memusuhi para Imam berarti memusuhi Nabi, memusuhi Nabi berarti memusuhi Allah Swt. Saya mengikuti Sayyid Husein Fadlullah. Jadi orang memilih Marja' Taqlid mah boleh siapa aja, tapi menurut ABI semua harus mengikuti Sayyid Ali Khamene'i, makanya IJABI mengikuti keputusan pemerintah untuk memulai puasa, kalau ABI tidak, mereka mengikuti keputusan Pemerintahan Iran. Baha'i sebetulnya pecahan Syiah dan dari Iran. Tidak pernah Islam datang dalam keadaan Vakum, selalu ada pengaruh kebudayaan setempat. Dan saya ingin Syiah di Indonesia tradisi-tradisi Iran itu jangan diambil, Iran itu tidak sama dengan Syiah seluruhnya, harus ada Syiah Indonesia juga lah, Miftah pernah menyajikan pemaparan tentang Syiah Indonesia di Iran, IJABI ingin mengembangkan Syiah di Indonesia yang ditegakkan di atas nilai-nilai Indonesia, kalau di Sunda saya ingin buat Syiah Sunda | |
| 6 | P : Tapi memang yang saya baca sampai saat ini, di tatar Sunda itu penuh dengan kisah Ahlul Baitnya, bahkan beberapa bahasa Parsi diserap di madrasah-madrasah Diniyah? | |
| | I : Ya, ada pengaruh Ahlul Bait yang sangat besar, dan saya ingin menghidupkan kembali, itu ada cerita Kiansantang yang berguru pada Imam Ali,namun dalam penelitian sejarah termutakhir nama Kiansantang itu merupakan gelar yang sezaman dengan era Ali, tapi bagi saya legenda-legenda seperti itu ingatan kolektif yang disimpan oleh masyarakat dalam tradisi oral mereka. | |
| 7 | P : Kemarin saya baca di Kompas Online, Hizbullah akan memerangi kelompok-kelompok yang tidak menjalankan Wilayatul Faqih? Apa pandangan Akang? | |
| | I : Agak keliru kayanya itu, karena Hizbullah pun tidak menjalankan konsep kepemimpinan Wilayatul Fakih, artinya pemerintahan di Lebanon kekuasannya di serahkan pada Konstitusi Lebanon tidak ada Hizbullah misalnya mereka milih partai, kalau tidak salah Hizbullah belum menjadi partai, mereka tidak berniat untuk mejadi Wali Faqih jadi gak mungkin memerangi apalagi Hizbullah cinta perdamaian. | |
| 8 | P : Kalau jumlah kuantitas masyarakat Syiah di Indonesia kira-kira ada berapa Kang? | |
| | I : Gak tau saya tapi kalo penelitian di luar misalnya melalui Badan Intelejen Negara, juga ada peneliti dari Belanda yang menurut saya tidak akurat katanya ada 3 kelompok besar di Indonesia dengan urutan IJABI, ABI, dan juga OASE, penelitian belanda itu OASE dianggap satu kelompok lagi. jadi dulu saya punya istri kedua yang kemudian saya cerai, aktivis lalu saya dirikanlah Organisasi Sosial misal membagi-bagikan susu dan buka kepada orang Miskin dan kemudian di beri nama OASE kepanjangan dari Organization of Ahlul Bait Sport and Education, jadi itu Emilia ternyata dia pernah datang kelompok Syirazi atai Syiah London ke saya yang memecah belah Sunni-Syiah, dan mereka tiap hari ngomongnya itu Laknatullah ila Abu Bakr wa Umar. Setelah saya menceraikan dan tidak lagi dengan saya mungkin sekarang tinggal 6-7 orang dari OASE Cuma penggemarnya banyak di Facebook, namun dalam catatan peneliti masuk dianggap satu kelompok mungkin karena pahamnya sendiri, lebih besar Yayasan Muthahhari. Tetapi populasi secara spesifik untuk Syiah saja di Indonesia ada 3 perkiraan Syiah, itu jumlahnya membengkak katanya sampai 5 Juta Syiah hampir sama itu dengan penduduk Jerman itu | |

| | | |
|---|---|---|
| | Over Estimated. Catatan dari Badan Intelijen Negara cuma sekitar 500 Ribu orang dan itu yang dimasukan semuanya anggota IJABI, jadi ABI gak Ada dalam data intelejen. | |

**Transkrip Wawancara IV**

Informan : Zuhairi Misrawi, MS.i

Lokasi : Rumah Pribadi

Status : Tokoh NU

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| | | |
|---|---|---|
| 1 | P : Mulai aja mas, sampean kan Direktur Muslim Moderat Society, tentunya mengikuti wacana yang berkembang, kondisi saat ini tidak lepas dari dunia global, yang jadi masalah, sekarang Syiah, sebenarnya ada gak misi Wilayatul Faqih untuk di globalkan, misalkan Hizbullah dan gerakan Garda Revolusi Iran, itu bagaimana? | |
| | I : ehm, pertama Wilayatul Faqih itu identik dengan konsep Syiah Imamah 12, jadi konsep ini lahir dari konteks perjuangan politik Syiah Imamah atau Syiah 12, yang kedua tergantung sejauh mana Iran memastikan bahwa sistem Wilayatul Faqih itu dapat mempertahankan demokrasi, terutama hasil pemikiran manusia, dalam konteks demokrasi saya pikir Iran telah teruji, melakukan demokrasi presiden mereka, eksekutifnya itu bisa dipilih sejak revolusi 1979, terlihat pemilihan Presiden bisa dipilih, Iran satu-satunya di Timur Tengah Negara yang mampu melakukan pemilihan pemimpin secara demokratis hampir lebih tiga dekade, negara Timur Tengah yang lain selalu ada revolusi atau otoritarianisme, yang kedua masalah HAM yang dihadapi oleh Iran, HAM itu terkait mereka yang menentang sistem Wilayatul Faqih, maka Iran banyak dikritik tentang hukuman mati di Iran dll. Jadi globalisasi Wilayatul Faqih, tergantung pada Wilayatul Faqih itu menjadi alternatif bagi dunia Islam, terutama. Dalam konteks demokrasi, memang Wilayatul Faqih memberi ruang untuk demokrasi, walau pun tidak berbasis pada partai politik. Jadi globalisasi ke Indonesia menurut saya masih jauh karena konteks kultur keagamaan dan demokrasi dan HAM di Indonesia, tetapi bahwa ulama punya peran di mata masyarakat itu jelas, Wilayatul Faqih itu kepemimpinan ulama atau agama jelas, kalau dilihat secara jujur MUI sudah menjadi Wilayatul Faqih juga karena pendapatnya dianggap final, dan menjadi pendapat publik. | |
| 2 | P : Mas Zuhair sendiri pernah ke Iran gak? | |
| | I : Saya sering ke Iran, maka dari itu saya tau kelebihan dan kelemahan Iran, oleh karena itu catatan yang paling banyak soal Iran ialah soal mengahargai perbedaan HAM, dalam konteks HAM jelas tantangan bagi Wilayatul Faqih, pertanyaannya sistem Wilayatul Faqih sampai kapan dapat bertahan di Iran dan terus menjadi sistem yang mapan, itu akan diuji | |

| | | |
|---|---|---|
| | oleh sejarah, kekuatan Wilayatul Faqih terletak pada etika dan moral, kenapa masih bisa bertahan karena kepemimpinan Ulama merepresentasikan dari kehendak publik, bisa dilihat juga Ulama di Iran sangat sederhana, Masjid-Masjid jarang pakai marmer, kalau di Indonesia ulama gayanya mewah pakai Alphard, Mobil dsb. Ulama di Iran tidak berpolitik, mereka betul-betul menjaga umat, mereka menjai simbol dari perjuangan moral, hidupnya asketis. Jadi untuk melihat Wilyatul Faqih diglobalkan itu konteksnya sangat berbeda. | |
| 3 | P : Tapi wacana yang berkembang, ada sebuah ketakutan juga dari berbagai kalangan bahwa Syiah di Indonesia mempromosikan sistem Wilayatul Faqih, terutama dampak revolusi Iran 1979 | |
| | I : Saya kira terlalu jauh, tapi bahwa pemikiran Wilayatul Faqih sebagai sesuatu kajian Politik Islam itu bagus, karena bagai mana pun sistem Wilayatul Faqih ini adalah gambaran solusi bagi masyaraakat Islam. Yang menjadikan Iran menjadi negara berdaulat dan ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, itu menjadi inspirasi bagi kita. Dalam konteks lain misalkan di NU kalau Rais ‘Aam PBNU sudah berfatwa misalkan, kita tentunya harus mengikutinya itu sama saja dengan kepemimpinan Ulama. Yang satu kepemimpinannya pada wilayah Politik, Wilayatul Faqih tapi yang satu pada ranah kultural, itu aja bedanya, tapi keduanya sama. | |
| 4 | P : Kira-kira di NU fatwa tentang Syiah gak? | |
| | I : Gak ada, fatwa tentang Syiah itu gak ada. Yang paling populer pernyataan dari Gus Dur, bahwa NU itu Islam plus Imamah, NU sama-sama mencintai Ahlul Bait, tetapi dalam konteks kepemimpinan politik berbeda, kita tidak mengakui konsep Imamah | |
| 5 | P : Selanjutnya, Mas. Dalam survey Setara Institute, bahwa Masyarakat Syiah paling banyak mendapatkan perilaku persekusi dari Masyarakat Sunni, menurut anda dampak dari apakah in? | |
| | I : Politik global, ini dampak politik global, adanya Wahhabi Saudi yang terus memerangi Iran misalkan. Sebenarnya kita tidak punya sejarah buruk dengan Syiah, Sejarah Islam di Indonesia jelas sejarah Syiah juga sebenarnya, misalkan pujian kepada Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husein dalam tarian Aceh atau Tabuik di Sumatera misalanya, dalam tahlil NU kita membaca ayat *Innama Yuriidullah Liyudzhiba ‘Ankum al-Rijsa Ahlal Baiti wa Yuthahhirukum Tathhiiran*, apa yang terjadi belakangan kebencian terhadap Syiah merupakan dampak geopolitik dari Timur Tengah, bahkan penumuan Wikileaks mengkonfirmasi Fatwa sesat Syiah yang dikeluarkan oleh MUI itu sebenarnya didanai oleh Arab Saudi, saya lebih meyakini ada pihak luar terutama dari Arab Saudi mmeyebarluaskan | |

| | | |
|---|---|---|
| | konflik Sunni dan Syiah, jadi lebih pada kepentingan politik global. Toh di Indonesia kita bisa hidup berdampingan antara Sunni-Syiah. | |
| 6 | P : Gini Mas, kalau misalkan sekteraninisme itu lahir dari internal mereka sendiri, contoh ABI dan IJABI, kudua ormas ini kan mempunya ketegangan konflik yang cukup keras juga? | |
| | I : ya, karena begini, kelompok ABI dan IJABI ini lebih kepada penguatan internal mereka tidak ada upaya ekspansi ke luar, peran yang dilakukan IJABI dan ABI itu peran biasa untuk menguatkan solidaritas dan konsolidasi antar mereka, banyaknya Syiah di Indonesia lebih dinikmati oleh kelas menengah kaum terpelajar, atau kaum urban, bahwa tradisi Ahlul Bait yang bagi mereka sangat proper untuk memahami keislaman. Syiah juga diuntungkanjuga oleh dunia modern, digital, internet utamanya, dengan tersedianya literatur Syiah di internet, semua orang bisa beajar Syiah secara otodidak, itu yang membuat orang Islam punya banyak peluang untuk mempelajarinya, argumen Teologis Ahlul Bait sangat kuat, pun juga dengan fikih, dengan banyaknya buku di Syiah membuat Syiah semakin dikenal, menurut Grand Syeikh Cairo, Sunni dan Syiah itu seperti dua sayap dan gerakannya paralel, harus berdampingan. Maka bagi orang yang tumbuh dalam tradisi rasional, dan dia membaca buku-buku Syiah, maka dia merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad, dan argumennya sangat diterima oleh akal sehat. | |
| 7 | P : Kalau Alawiyyin misalakan, yang dari Iran dan Yaman itu bagaimana hubungannya? | |
| | I : Mereka memang punya hubungan dengan Habib Yaman, tapi tidak semuanya Ahlul Bait, semisal Habib Lutfi tidak mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait Syiah, namun sebenarnya hubungan nya baik sekali, terutama yang dari Yaman kecenderungannya Habib Sunni, tapi dari Iran jelas Syiah, kelebihannya mereka sangat ramah terhadap Syiah, Habib Rizieq pun, mereka mengetahui tentang Syiah, dan mereka sangat menghargai keluarga Nabi, Syiah sangat dibantu dengan Habib-Habib Sunni, saya hampir tidak menemukan Habib Sunni menyerang Syiah. Jadi kalau yang dari Yaman ia tetap Ahlul Bait tapi dalam arti bukan Syiah, hanya sebatas turunan saja, andai saja ia Syiah kemungkinan Zaidiyyah. | |
| 8 | P : Kemunculan ANAS (Aliansi Nasionalis Anti Syiah) juga apakah permainan politik global juga? | |
| | I : Ya jelas disitu ada Amerkia, Israel, Saudi, kita pahamlah bagaimana mereka memainkan issu ini, mereka selalu berupaya membenturkan antara Sunni-Syiah, tapi di Indonesia itu mereka gagal, ya itu karena pengaruh Yaman, juga karena pengaruh orang-orang sunni yang baca tentang Syiah, | |

| | | |
|---|---|---|
| | jadi kita telah sadar bahwa membenturkan Sunni Syiah itu tidak inheren dalam tradisi Islam terutama Sunni di Indonesia. Isarel misalkan mengelola issu ini supaya ia menikmati hasilkonflik itu. | |
| 9 | P : Anda kan sering mengisi di forum-forum Ahlul Bait, baik ABI atau IJABI, sebenarnya wacana yang mereka bangun itu seperti apa? | |
| | I :Sangat menarik, sebenarnya ABI dan IJABI, punya ciri khas dalam konteks agama, dalam Forum Internom mereka punya gaya berpikir ala Syiah, namun secara kebangsaan mereka sangat Pancasilais, mereka boleh punya paham internom mereka, tapi ketika masuk ranah pubik, mestinya Pancasila, maka dari itu kita menentang HTI, karena ia ingin mengganti Ideologi Pancasila, itu yang kemudian kita tentang dari mereka. | |
| 10 | P : Yang saya temui, kalau ABI itu, tunduk terhadap Wilayatul Faqih. Dan menurut IJABI kalau yang tunduk Wilayatul Faqih itu tidak Pancasilalis? | |
| | I : Kalau kata Muhsin Labib, Indonesia tidak mungkin menjadi Wilayatul Faqih, mungkin spiritnya, saya sudah mendengar itu dari mereka, dan saya harap mereka menghargai konsensus para pendiri bangsa, dan saya belum melihat upaya impor ideologi itu di Indonesia. | |
| 11 | P : Apakah yang tidak mengikuti Wali Faqih itu tidak menentang Imam Ali sebagai estafet kepemimpinan setelah Nabi Muhammad? | |
| | I : Begini, konsep Imamah itu memang khas dari Syiah karena itu pilar dari mereka, tapi bagi kita kalanan Sunni kita tidak yakin dengan konsep Imamah, yang penting dimusyawarahkan, bedanya adalah apakah ulama menjadi faktor penentu utama dari seluruh kebijakan, konsep Ahlul Bait ialah khas konsep Syiah yang tidak mungkin diterapkan di Sunni, karena paradigma ideologisnya berbeda. | |
| 12 | P : Langkah-langkah apa yang dilakukan Muslim Moderat Society dalam wacana keberagaman ? | |
| | I : Ya, Mempelajari sebanyak mungkin tradisi dan teori dalam khazanah Islam, baik itu Syiah, Ahmadiyah, Bahai agar kita bisa menghormati dan berkerjasama dengan mereka, dan membangun saling pengertian. Karena, konflik itu selain karena faktor politik, ya faktor ketidak tahuan, Islam moderat itu kita menjadi penengah, membangun dialog, titik temu. Kata Bung Karno ketuhanan yang berkeadaban, beragama secara beradab, kelompok moderat tidak akan mengkafirkan orang lain, kelompok tidak akan membenci kelompok lain, kelompok moderat belajar dan bekerjasama dengan kelompok lain. | |
| 13 | P : Tapi kalau ada yang mengancam ideologi negara? | |
| | I : Ya, ada domain negara, negara harus mengambil langkah-langkah | |

| | | |
|---|---|---|
| | hukum yang terkait dengannya, namun secara personal kami dekat, saya sering diundang ke kantor HTI, namun kita tetap menyampaikan sikap kita, menyampaikan argumen-argumen kita, dengan wahhabi pun kita berdialog, hanya argumen-argumen wahhabi yang tak masuk akal dibanding argumen-argumen Syiah, Wahhabi ini cenderung lebih banyak memecah belah. | |
| 14 | P : Wahabi bisa dikatakan kritis gak sih mas ? | |
| | I : Wahabi ini konsep pemahaman yang otoriter dan tidak otoritatif, dia mencoba menjadi hakim terhadap paham-paham lain, cenderung dipaksakan, karena argumen yang digunakan itu tidak mempunyai landasan filosofis yang kuat, landasan sosiologis yang kuat, landasan teologis yang kuat, berbeda dengan argumen-argumen Ahlul Bayt, argumen Ahlul Bayt kita dapat menerima kekokohan, bahkan Imam Syafii mengatakan kalau Imam Ali berfatwa saya akan ikut fatwa Imam Ali, andai saja Imam Ali disebut Rafidhi Syiah maka saya adalah Syiah, apalagi kalau kita baca kitab Imam Ja'far ash-Shadiq, itu sangat kental dan lekat dengan Nabi. Atau kita membaca khazanah Siti Fatimah, itu menjadi penting bagi kita, Ahlul Bayt ini menarik, mengingatkan kita untuk mengenal lebih jauh Siti Fatimah. | |
| 15 | P : Kalau kata Ustadz Jalal, lebih banyak nama Fatimah dibanding Aisyah dan lebih banyak nama Ali dibanding Abu Hurairah di Indonesia | |
| | I : Hahahaha, kita tidak bisa menutup mata harus megakui bahwa Imam Ali merupakan salah satu tokoh penting kalo kita belajar sejarah islam, kita kalangan sunni mengakui itu, kita harus mengakui juga *anaa madiinatul 'ilmi wa 'aliyyu baabuhaa.* Imam Ali itu sangat Istimewa | |

**Transkrip Wawancara V**

Informan : Dr. Muhsin Labib

Lokasi : Rumah Pribadi

Status : Tokoh ABI

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| | | |
|---|---|---|
| 1 | P : Apa sebenarnya yang dimaksud Syiah? | |
| | I : Syiah tidak bisa kita definisikan dalam satu entitas tertentu, Syiah itu ada di mana-mana? | |
| 2 | P : Maksudnya Syiah ada di mana-mana? | |
| | I : Ya kan pemikiran, siapa pun itu. Syiah itu kan, anda bisa lihat sebagai person, bisa dilihat gagasan dan pemikiran, gagasannya kan ada di mana-mana, apa indikasinya? Berfikiran logis, inklusif, jika anda tidak menyesatkan Syiah berarti anda Syiah, anda tidak mengkafirkan Syiah, anda Syiah, tidak harus mendeklirkan Syiah. | |
| 3 | P : Pak Muhsin ini kan Tokoh ABI, secara organisasi? Apa posisi anda di ABI? | |
| | I : Ya, secara organisatoris saya anggota dewan syuro, namun secara wacana, pemikiran dan gagasan saya bisa lah, tapi secara organisatoris saya tidak merepresentasi. | |
| 4 | P : Tentang Wilayatul Faqih, jadi banyak yang beranggapan bahwa, Syiah disebut anti-NKRI karena memiliki doktrin yang melahirkan konsep tersebut dan harus mengikuti keputuan politik Iran apakah ini tidak bertentangan dengan Pancasila ? | |
| | I : Justru karena Wilayatul Faqih, kita harus mendukung demokrasi, mendukung kebhinekaan, mendukung Pancasila, jadi yang tidak ber-Wilayatul Faqih dia tidak mendukung demokrasi, Pancasila, NKRI, dan keragaman. Justeru karena konsep Wilayatul Faqih kami menolak agama sebagai dasar negara, karena konsep itu kami menolak agama sebagai dasar negara. Cukup ekstrim ya? | |
| 5 | P : Bukankah Wilayatul Faqih itu sendiri lahir dari agama? | |
| | I : Karena kita menganut Wilayatul Faqih, justru kita mendukung negara yang dibangun berdasarkan konstitusinya, karena konstitusi merepresentasi kehendak publik, itu yang disebut dengan legitimasi dan ada yang disebut | |

| | | |
|---|---|---|
| | dengan akseptabilitas, Nabi Nuh memiliki legitimasi tapi tidak punya akseptabilitas, elektabilitasnya rendah, sekedar legitimasi tidak cukup, artinya keabsahannya ditentukan dua pilar itu. Anda kira Revolusi Iran seperti 212, Revolusi Iran ada konstitusinya, ada Referendum yang jelas memiliki kontrak sosial, meskipun Khomeini memiliki otoritas yang kuat, namun rakyat yang menentukan, intinya Republik Islam Iran berdiri karena 2 hal, legitimasi dan akseptabilitas publik, yaitu kontrak sosial (referendum), ketika Referendum menjadi pilihan dan Islam menjadi spiritnya, maka Undang-Undang berlaku bagi seluruh penduduk Iran. Harus bedakan antara Undang-Undang dengan produknya, konstitusi Iran merupakan hasil dari legislasi parlemen yang dipilih oleh rakyat, Islamnya di mana? Lha, semua yang tidak bertentangan dengan Islam itu Islam, tak perlu ada kitabnya. Apapun yang tidak bertentangan dengan dasar dasar nilai Islam itu adalah Islam dan juga pandangan Syiah, Walaupun tidak ada kitabnya. Yang dimaksud dengan Negara Islam ialah yang tidak bertentangan dengan Islam, yang menentukan ialah Mahkamah Konstitusi. Wilayatul Faqih itu lembaga keulamaan, artinya yang memiliki wewenang ialah Allah yang punya hak primer, Nabi Imam Ulama dan dibawahnya adalah mata rantai, tidak punya hak secara primer, tidak ada yang punya hak terhadap sesama kecuali Allah, cara memperlakukan ulama Sunni dan Syiah sama, sudah jelas kita taat kepada konstitusi RI. Wilayatul Faqih itu Ulama, persis orang Indonesia minta fatwa ke Mesir atau ke Saudi. | |
| 6 | P : Apakah doktrin Wali Faqih tidak mengikat seluruh komunitas Syiah di dunia ? | |
| | I : Sudah jelas tadi saya sampaikan, apa yang nampak telah menjadi Common mistake, jadi Imam itu adalah penghubung kita dengan Nabi, keterikatan orang Indonesia dengan Syiah Iran dengan Wilayatul Faqih itu sederhana, kita sendiri mendukung pemimpin non muslim, Hizbulloh itu mendukung Michel Aoun Kristen Maronit, jika ada yang bicara seperti itu ada sekterianisme, justru yang bicara anti-Syiah justru pelaku anti demokrasi, tidak ada itu seluruh dunia menjadi negara muslim yang satu, justeru yang tidak percaya imamah dia anti Pancasila dan pro Khilafah. | |
| 7 | P : Ada beberapa Tokoh IJABI yang saya datangi, menurut mereka tidak mungkin orang yang meyakini kepemimpinan Wali Faqih atau menganut Wilayatul Faqih itu Pancasialais, logikanya di mana? | |
| | I : Saya adalah orang paling representatif dari Syiah, ukurannya ialah kompetensi, kenapa Pak Zulkifli menyuruh menghubungi saya, supaya anda bisa melihat representasi Syiah, setiap level ada ukurannya, Jalal itu tidak merepresentasikan Syiah, anda jangan mengambil informan jalanan seenaknya. Syiah di Iran cenderung lebih homogen, Lebanon heterogen, Wilayatul Faqih selalu mendorong untuk mendukung konstitusi di | |

| | | |
|---|---|---|
| | negaranya masing-masing, Syiah sendiri tidak menyukai negara Islam, negara Islam itu milik ISIS, kita Republik Islam. Justeru kita mendukung konstitusi NKRI, aufuu bil ‘uquud, terikat kontrak di negara. Disebut Islam suatu negara karena du prosesnya dan produknya undang-undang. | |
| 8 | P : Tanggapan Pak Muhsin terhadap kelompok-kelompok yang anti-syiah ? | |
| | I : Justru itu yang membuat Syiah hidup, kita menjaga hak untuk meyakini sesuatu namun kita juga meyakini hak orang lain untuk meyakini kepercayaannya, kelompok-kelompok itu tak perlu ditanggapi, toh telah masuk daftar, kebencian ada dua, pertama sektarian akibat ideologis, kedua karena politik atau kekuasaan, perebutan peran untuk menguasai ummat, kebencian pragmatis, kapan televisi mengajak berdebat kelompok Syiah, kita tertawa saja geli melihatnya. Kita ini jadi Syiah rela untuk menjadi gembel, miskin, tapi saya menikmati. IJABI itu tidak merepresentasikan Syiah, level keagamaannya berbeda dengan kita. Tapi pada akhirnya semua manusia punya keyakinannya masing-masing, tapi ada hierarki, ada struktur, dll. | |
| 9 | P : Menurut Pak Muhsin perbedaan antara Sunni dengan Syiah terletak dimananya ? | |
| | I : : Perbedaan terletak di konsep, penerjemahan teks, ujung-ujungnya itu, kita meyakini akal dahulu baru teks, jadi yang benar-benar sunni itu sulit diidentifikasi | |
| 10 | P : Kira-kira jumlah statistik masyarakat Syiah di Indonesia kira-kira berapa? | |
| | I : Syiah bukan organisasi tidak ada jumlah pastinya, punya levelnya masing-masing, bisa jadi anda juga Syiah. | |
| 11 | P : Kapan Syiah masuk ke Indonesia secara utuh dalambentuk Madzhab? | |
| | I : Tentunya dengan kedatangan manusianya dahulu, Syiah sebagai pemikiran, Syiah sebagai budaya, telah menjadi jatidiri bangsa ini, konsep Wahdatul wujud juga diyakini oleh Syiah. Manunggaling Kawula Gusti, jadi kalo ingin dilihat sebagai budaya ya sudah lama, Islam Indonesia proses akulturasi dari Gujarat, Persia, China, malah yang terakhir dari Arab justru terakhir, istilah Nahkoda, Bakhtiar, Bandara, Korma, Anggur, Syah, Pasar dan sebagainya lahir dari Syiah, jika dilihat dari kata kita lebih dahulu, kata itu penanda budaya paling nampak ya bahasa Mas, pernah denger haram jaddah, jaddah itu jodeh anak, itu budaya bangsa, kalau budaya ritual lebih banyak lagi di Jawa, Sunda Padang Ambon Serang, sekarang ada Syiah Kuala, kalau masuk sebagai madzhab artinya | |

| | | |
|---|---|---|
| | sebagai ideologi kita belum memiliki data, masuk sebagai ideologi yang rapih mungkin pada masa, kalau pastinya setelah Revolusi Islam Iran, saya yakin Islam pertama masuk ke Indonesia itu Syiah, bentuknya Esoterisme, mistik, kalo Sunni asli dari Hijaz atau Yaman, priode keduanya Saudi, Islam Hadir pertama kali lewat esoterisme sehingga diterima dengan nyaman di Indonesia, lewat pernikahan, kemudian datanglah orang-orang arab dari Hijaz membawa Islam, Islamnya bukan Islam esotersi lagi melainkan madzhab, Sunni indonesia dengan Arab beda, sunni tapi ya jaddal husein Sunni namun memberi penghormatan terhadap Ahlul Bait, Sunni Indonesia identik dengan Mesir, tasawuf tampak, Syiah tanpa fikih menjadi tasawuf, masuknya Syiah lewat tasawuf sehingga diterima karena punya kesamaan esoterisme, lama kelamaan Sunni identik dengan Islam Arab, Syiah identik dengan Islam Persia. Nah, Periode kedua dari Yaman, ya dia sudah enak hanya tinggal menerima penghormatan gelar Habaib, mereka yang merasakan privillege, saya seharusnya yang menikmati itu, yang ketiga adalah Islam yang datang setelah Saudi terbentuk, ini yang paling Sunni alias Wahhabi, kalau yang Sunni dari Hijaz dan Yaman atau NU itu Sunni yang sudah campur-campur, dan ia lebih cocok di Indonesia jadi kesimpulannya tentang Wilayatul Faqih gimana Mas, coba saya mau ngereview ? | |
| 12 | P : Jadi seluruh yang tidak bertentangan dengan Islam ialah Islam itulah Wilayatul Faqih | |
| | I : | |

**Transkrip Wawancara VI**

Informan : Dr. Usep Abdul Matin

Lokasi : Kantor Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

Status : Peneliti/Pakar

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| | | |
|---|---|---|
| 1 | P : Bagaimana pendapat Pak Usep tentang ABI dan IJABI? Bagaimana relasi mereka sebagai ormas yang berhaluan Syiah? | |
| | I : Saya belum mengkaji mendalam mengenai perbedaan Abi dan Ijabi, kalau tidak salah pernah saya liat Pak Umar Shihab merupakan pengurus harian Mutahhari, namun perlu dicek lagi, dulu ada jurnal di Mutahari dan Pak Umar Shihab itu juga termasuk salah satu penulis yang penting, setelah tahun 2000-an saya tidak melihat lagi jurnal itu, yang saya amati tidak ada koordinasi antara Abi dan Ijabi dalam beberapa hal, saya kurang melihat adanya kerjasama atau koordinasi, saya tidak tau mengapa, tapi kalo anda melihat, bagaimana ada konflik ideologi atau apa ? | |
| 2 | P : Sebenarnya kalau yang saya lihat pertama konflik etnis antara Arab dan Non-Arab dan kemudian ideologi juga, saya ketemu Kang Jalal dan diskusi lama, kata Kang Jalal, itu gak mungkin orang ABI itu Pancasilais, orang dia mengimani Wilayatul Faqih, kalau IJABI tegas mengaku Pancasilais dan moenolak Wilayatul Faqih. | |
| | I : Kalau di websitenya memang itu juga beberapa Ijabi tapi bukan Ijabi sebenarnya, dia tidak termasuk IJABI, tetapi beberapa murid dari simpatisan Pak Jalal, mengkritik hal yang sama, kalau saya lihat di website ABI, Pancasila biasa, mesti ditanyakan apa mungkin itu ideologinya Wilayatul Faqih | |
| 3 | P : Setelah saya tanya ke Pak Muhsin, kata Pak Muhsin, Justru karena saya mengimani Wilayatul Faqih maka saya menghormati Pancasila dan konstitusi negara ini. | |
| | I : Itu yang perlu dikaji lebih mendalam, dengan mengimani Wilayatul Faqih apakah suatu tantangan buat Pancasila, karena itu juga yang ditanyakan Pak Komaruddin Hidayat, ditanyakan para pembesar oleh beberapa bagi pejabat tinggi yang mengkhawatirkan Indonesia akan sama seperti Syria, mengasosiasikan Syria sebagai Syiah, saya gak tau Syiah Wilayatul Faqih atau bukan, semacam ada ide yang berterbangan yang belum bisa ditentukan kepastiannya, namun pemahaman yang bisa saya | |

| | | |
|---|---|---|
| | ambil itu, masing-masing ingin eksis tetapi ada kendala ada masalah relasi antara misalnya IJABI dengan ABI, apakah relasinya karena pak Umar Shihab sebagai pimpinan ABI, dulunya sebenarnya belajar dari Muthahhari yang dipimpin bukan dari keturunan Arab, saya juga tidak tau kenapa beliau keluar dari Muthahhari kemudian tidak mau bergabung dengan IJABI, kalau saya liat kemungkinan karena faktor keturunan, mungkin keturunan Arab, merasakan dirinya masih punya darah Habib lalu ke ahlul bait lalu merasa lebih berhak untuk membawa organisasi yang punya label Ahlul Bait | |
| 4 | P : Sebenarnya yang merepresentasikan Ahlul Bait itu siapa Jalal atau saya (Muhsin Labib)? Gitu kata Pak Muhsin | |
| | I : Mungkin ini ada karena faktor lain , mungkin kalau kita hubungkan dengan faktor keuangan, rasanya kalu Muthahhari tidak mendapatkan dana dari Iran, apakah dengan Ahlul Bait Indonesia itu bahkan bersih keras mengadopsi Ideologi Wilayatul Faqih, tapi itu juga saya belum liat, ada gak akta Wilayatul Fakih, kalau IJABI gak ada, kalau Abi saya gak tau, tapi dengan pernyataan Pak Muhsin Labib, jelas secara eksplisit mengadopsi Wilayatul Faqih, apakah dengan mengadopsi itu ada kepentingan tersendiri dengan pendanaan | |
| 5 | P : : IJABI pernah digugat oleh Abi, dilaporkan ke Iran karena IJABI tidak merepresenatsikan ideologi Iran. | |
| | I : Itu saya juga heran, bagaimana orang sepintar Umar Shahab bisa begitu, itu juga saya lihat konflik Pak Jalal dengan Habib berujung kesitu, cenderung mengarah pada relasi yang pada akhirnya kesukuan juga muncul, sedangkan beliau mendobrak hal itu, apalagi misalnya antara Maula dengan Sayyid, selanjutnya mungkinkah bahwa seperti Pak Muhsin Labib dan Umar Shahab secara biologis punya biological capital, berbeda dengan Pak Jalal yang tidak punya darah keturunan Nabi, apakah ada superioritas untuk mersa lebih Chauvanisme, merasa lebih berhak, lebih tinggi dalam hal ke Ahlul Baitan, sedang Pak Jalal sangat ditentang karena orang tuh tergantung ilmu dan amal , itu juga saya merasa kalau ke ABI agak susah kalau ngobrol itu, kalau ke IJABI lebih mudah, karena sosok Pak Jalal terbuka, siap dikritik. | |
| 6 | P :Kalau riset Pak Usep tentang Kang Jalal gimana tuh? | |
| | I : Kalau saya melihatnya, itu ada konflik antara perbedaan sikap Pak Jalal tentang Ahlul Bait yang menyebabkan konflik pak Jalal dengan Habaib, kemungkinan sangat berimplikasi pada konflik ABI sekarang yang menunjukan sikap Antipati pada IJABI yang dibawa Pak Jalal, dan di Dewan Syuronya kan putranya Pak Jalal, Ustadz Miftah yang bukan dari | |

| | | |
|---|---|---|
| | keturunan Arab. Keterbukaan pikiran IJABI lebih terbuka dengan konsep ilmu sosialnya, dengan Marx, Freud, dan sebagainya | |
| 7 | P : Ketika saya berbicara dengan Muhsin Labib atau Umar Shahab mereka itu tekstualis dengan teks Iran beda dengan Kang Jalal, lebih komprehensif | |
| | I : Jadi, Kang Jalal itu ke- Indonesiannya ada, Fiqih-fiqihnya juga membahas tentang salat misalnya itu masih menghubungkan dengan tahiyatnya orang Sunni itu begini, ini begitu, dan Pak Jalal itu Talfiq kalo dalam Ilmu Fiqih itu, mengambil yang mudah kemudian dengan keilmuan ditambahakan, jadi dan juga kalau Pak Jalal itu lebih kepada Taqrib sebenarnya, jadi bagaiman Madzhab Syiah dan Sunni titik temunya dimana, karena mungkin tadi tidak pada Wilayatul Faqih, tapi secara esensial lebih mengakui pada Wilayah Sayyidina Ali, bahwa Ali memang man kuntu maula fahadza Ali maula, tapi itupun tidak dipaksakan untuk berbeda jadi keyakinan privat yang tidak usah untuk dipaksakan ke orang lain harus seperti itu, itu kan toleransinya disitu, sehingga Pak Jalal bisa buka bersama dengan Sunni dan bisa buka pada jam Sunni buka (Puasa Ramadhan), tidak usah nunggu sampai Ghurubusysyamsi ilaa shufil Qamar, matahari kuning atau merah , Pak Jalal itu akomomdatif dengan budaya Sunni tanpa menghilangkan keyakinan dia terhadap ajaran Ahlul Bait dengan lebur seperti itu, apalagi misalnya dengan alasan keturunan, semakin menjadi alas am kurang jelasnya Pak Jalal terhadap Ahlul Baitnya, yang diutamakan Pak Jalal ialah keilmuan dan praktek amal sehari-hari, kalau orang jadi Syiah tanpa atau tidak dimulai dengan modal biologis namun dengan pemahaman, pencarian sendiri itu lebih kuat dalam artian lebih dewasa, lebih mudah berbaur daripada misalnya menjadi Syiah dengan mempertahankan Status Quo keturunan darah, dengan klaim kami lebih berhak karena kami keturunan Ahlul Bait itu menunjukan ketidak kuatan dalam presepektif pemikiran Syiah, karena lebih cenderung kepada keturunan, kalau dalam ilmu sosial itu Ascribed Statue, kalau Pak jalal Achieve Statue, Pak Jalal memegang ajaran Ahlul Bait dengan cara pencarian, itu menurut saya konflik dengan Habaib, sehingga mungkin orang-orang di ABI yang Ahlul bait yang punya keturunan punya darah itu terusik, apalagi melihat misalnya di IJABI berapa orang yang Habibnya, bisa jadi defensive. | |
| 8 | P : Yang Pak Usep teliti itu kan Khutbah-khutbah Pak Jalal, itu dari tahun berapa Pak? | |
| | I : Itu dari tahun 80 | |
| 9 | P : Ada perubahan-perubahan gak? | |
| | I : Kalau saya lihat, cukup stabil, artinya beliau tidak mau menampakan | |

| | | |
|---|---|---|
| | memaksakan perbedaan, bukan memaksakan keyakinan, tetapi tahun 2012-2013 itu ada sedikit Pak Jalal lebih berani menampakkan sedikit perbedaanya, tapi itu juga sedikit, ia ingin menujukkan persamaan, kemungkinan menunjukkan perbedaan dengan Sunni, karena mungkin masih menikah dengan istri kedua, Emilia, yang memang beliau ingin kalau kita Syiah dab berada di Sunni harus ditujukkan berbeda kita, tetapi sekarang lebih kepada Taqrib ingin menunjukkan persamaan, kalau dia diserang tidak mau melawan, tapi kalau diserang ajaran Ahlul Baitnya, nah dia baru memberikan alasan tentang Syiah dan poin-poin yang diserang, tetapi tu masih dengan argumen, dalil, dari 80an sampe sekarang sikap yang sama itu, beliau itu dalam berdebat menampakkan argumentasi referensi yang kuat meski tahun 2010, 2011, 2012, 2013, itu lebih memperlihatkan ke Ahlul Baitannya, sikap menjaga diri dari menampakkan sesuatu yang layak dari keilmuan beliau tetap jaga, itu yang saya liat. Beliau banyak argumentasinya rujukannya ada, dengan bahasa yang keluar dari seorang ilmuan, karena mungkin beliau pakar komunikasi, bahasa kita diskusi gimana lah. | |
| 10 | P : Kemarin saya tanya ke Kang Jalal tentang Syiah di Indonesia ada berapa aslinya, ada 3 katanya, ABI, IJABI, Syiah OASE. | |
| | I : Kang Jalal tidak pas dengan sikap Syiah OASE, namun ternyata setelah saya selesai kuliah ternyata saya bener, Pak Jalal inginnya baca banyak, argumentasinya banyak, literatur Barat dan Timur diadopsi, bukan hanya literatur dari Syekh, dan itu ditopang dari Kang jalal yang kemampuan bahasanya luar biasa, membaca Aufklarung, di ABI apakah gitu juga saya gak tau, jadi dengan dunia kampus di UIN juga pas untuk Pak Jalal. | |
| 11 | P : Seperti yang saya rasakan ABI kurang terbuka daripada IJABI. | |
| | I : Saya juga gak tau impactnya terhadap donatur-donatur IJABI, akhirnya berkurang karena ada ABI, tapi pasti ada impact-impact lain, jadi kelilmuannya selama Pak Jalal di IJABI menonjol keilmuannya. Tapi setahu saya Pak Zul itu dekatnya dengan ABI ya daripada IJABI. | |

**Transkrip Wawancara VII**

Informan : Musa Kazhim

Lokasi : Rumah Pribadi

Status : Tokoh ABI

Tanggal : 27 Mei 2018

Waktu : 14:00 WIB

| | | |
|---|---|---|
| 1 | P : Wilayatul Faqih secara konsep waktu itu sudah ada? | |
| | I : Konsep Wilayatul Fakih sudah lama seperti yang dipraktekan di Iran tetapi belum dalam bentuk formal, nah jadi begitu, buku-buku itu saran saya dibaca walaupun sekilas, jadi supaya legal bisa memiliki alasan dahulu, karena Wilayatul Fakih bukan persoalan yang sederhana lagi, kalau dulu masih teori dan jadi fenomena hingga muncul beberapa tafsir , ini semua pembahasan rumit menurut saya, saran saya dibaca dahulu bukan sekedar wawancara, kalau ada telegram nanti saya kirim, orang yang menulis Wilyatul Fakih datang dari latar belakang yang bermacam-macam ada Filsafat, Politik, Tinjauan sejarah | |
| 2 | P : Adakah keterkaitan Antara Wilayatul Faqih dan keimanan seseorang? | |
| | I : Itu pemikiran madzhab, jadi pemegang otoritas dalam semua masyarakat, masyarakat keagamaan pun memiliki kepemimpinan, dan dipraktekan manusia berakal dalam kerjanya di ruang sosial, sederhananya seperti itu, gak ekslusif seperti yang di gambarkan media, bahkan sejarah Syiah terpinggirkan oleh kekuasaan sehingga digambarkan berbahaya, menyimpang, distabilisasi masyarakat. Yang diyakini ialah Imamah , dianggap meyimpang karena meyerahkan otoritas kepada imam. Padahal seluruh masyarakat menyerahkan otoritasnya, pasien menyerahkan otortasnya kepada dokter, seperti itulah Wilayatul Faqih | |
| 3 | P : Seberapa jauh pengaruhnya bagi masyarakat Syiah di Indonesia | |
| | I : Masyarakat manapun percaya kepada Ulamanya , itu fakta dalam suatu masyarakat. Secara praktek telah diperlihatkan masyarakat NU, ketundukkannya pada Kyai , orang NU bahkan lebih parah, nanti ada bisa selidiki sendiri, KH Maruf Amin memfatwa Ahok , dan Akademisi NU tak berani menentang fatwa, bahkan ketika Maruf Amin dihina oleh seorang intelektual semua rame-rame membela Pak Maruf, wah itu Wilayatul Fakih, Bonnie Hargens ketika mengkritik Maruf Amin, rame-rame mendukung KH Maruf Amin, tetapi kenapa Syiah di zoom in soal Wilayatul Fakih, yang melakukan ialah yang menganggap anacaman bagi | |

| | | |
|---|---|---|
| | negara dan demokrasi, padahal itu praktek di kehidupan masyarakat kita, artinya memberikan sakralitas , penggambaran mengerikan diberikan oleh musuh-mush Iran, itu yang harus dipahami | |
| 4 | P : Kebijakan politik Iran berpengaruh gak? | |
| | I : Saya bedakan Politik dan Ad-Din, din yang perintah datangnya dari Allah, unsur politik tidak boleh ada ulama yang masuk. Allah bilang pilihlah pemimpin yang terbaik, Ali Khomeini tidak pernah menetukan untuk memilih Ahmadinejd, apalagi urusan Negara orang, dia menjaga urusan Agama dengan Politik. Politik itu penetuan orang, bukan dalam tema besarnya , sudah masuk Case. Agamawan yang mengerti kedudukannya tidak akan masuk kesitu, itu disebut politik praktis, yang dimaskusd high politic ialah kebijakan umum, Ulama bisa bicara disitu. Ulama dalam pandangan Syiah harus paham Zaman dan Tempat | |
| 5 | P : Tak pernah ada fatwa Individu? | |
| | I : Islam mengenal proses pengadlan, ketika menantu Khomeini terkena kasus hukum, tetap menggunakan jalur pengadilan, boleh ada pembela, hukum dijatuhkan dengan pengadilan | |
| 6 | P : Bisakah Wilayat Al-Faqih disebut system Politik? | |
| | I : Sistem keterikatan beragama dengan agamnaya, tidak sedikitpun ke Kyaian dengan Wilayatul Fakih merupakan hal yang sama, tidak ada Wilayatul Fakih lebih dihormati seperti di Indonesia, proyek menakut-nakuti Wilayatul Fakih ialah proyek asing, Kyai di Indonesia juga keluarganya dihormati, coba anda pergi ke Pondok Pesantren, bahwa Kyai disini lebih dihormati dengan di Iran, kenapa tidak ada yang menakut-nakuti ke Kyaian di Indonesia, karena Indonesia dianggap netral | |
| 7 | P : Menurut sebagian orang Syiah di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa yang berwali faqih itu anti Pancasila? | |
| | I : Ya pendapat beliau, sah-sah aja, tetapi ketaatan orang Syiah di dunia tidak seperti ketaatan orang NU pada Kyai, mati hidup dengan Kyai, Problemnya pendapat seperti itu karena kekhawatiran, bahkan zaman dahulu, kebetulan saya suka belajar sejarah Indonesia, kebanyakan Guru ulama Indonesia dari Mekkah, apa berani Ulama Indonesia kurang Nasionalis, bahkan banyak Ulama Indonesia pasca kemerdekaan dari Al-Azhar, pendekatan Ilmu pengetahuan Fenomenologis, karena pendekatan Fenomenologis lebih objektif, orang latar belakang NU pasti taat dengan Kyai, pak Jalal latar belakang Muhammadiyah tidak ada Kyai yang dihormati, atau kurang menghormati Ulama, saya inget Pesantren di Jawa yang namanya pembantu Kyai ga pernah dibayar, tapi setau saya kantor | |

| | | |
|---|---|---|
| | ulama di Iran semuanya digaji para pegawainya, pernyataan bahwa Wilayatul Fakih anti Pancasila itu pernyataan politik, itu bukan pernyataan ilmiah, orang modernis dimanapun berada menganggap bisa melebihi Ulama | |
| 8 | P : Tapi referensi itu dari Syaikh Ali Sistani, Irak. Benarkah Syaikh Ali Sistani menolak system Wilayat Al-Faqih? | |
| | I : Saya kira tidak akan pernah ada Ulama yangg menolak Wilayatul Fakih, harakiri namanya, dia sendiri menganulir dirinya, saya kira gak mungkin | |
| 9 | P : Masyarakat Syiah sendiri di Indonesia tidak ada Misi untuk menyebarkan dalam ruang politik? | |
| | I : Makanya politik itu apa, dia memerintahkan kita apa menjaga Negara, mencintai Negara, melawan penjajah, melawan Imperialisme Asing | |
| 10 | P : Bagaimana pendapat anda tentang Habib-Habib yang FPI? | |
| | I : Melenceng mereka! | |
| 11 | P : Mereka Ahlulbait bukan? | |
| | I : Ahlul Bait itu terbatas ada konsep agama dan politik, banyak politisasi agama karena dianggap berurusan dengan semua orang, akhirnya ajang kontestasi, jadi ajang perebutan, Ad Din itu harus dari allah untuk allah dan tidak ada yang bisa masuk wilayahnya selainnya, sekarang saya mau tanya, kalau keamanan Negara sempurna, berarti tidak ada yang dapat mengobok-ngobok Negara, tapi kalau sistemnya bocor dan acak-acakan asing, agen dan musuh Negara bermain disitu, berarti Negara itu tidak aman, berarti Sistemnya tidak bagus, semua orang tidak bisa menjadi Ahlul Bait | |
| 12 | P : Kalau secara garis keturunan? | |
| | I : Memang jadi apa kalau jadi keturunan, apa dalilnya, sistem agama sudah aman very secure bagi yang memahami sempurna dan tidak setengah-setengah, kerjaan penguasa zalim ingin banyak orang bodoh. Yang tidak memahami agama akan udah tertipu, menggunaan dalil-dalil sepenggal, oke kita clear ya | |

**LAMPIRAN II**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Habib Jindan bin Novel<br>*Dokumentasi Pribadi di PP. Al-Fachriyah Kediaman Habib Jindan | Dr. Dina Y. Sulaeman<br>*Dokumentasi Pribadi di Islamic Cultural Center |
|  |  |
| Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc<br>*Dokumentasi Pribadi di Kediaman Pribadi Ustadz Jalal | Zuhairi Misrawi<br>*Dokumentasi Pribadi di Kantor islamramah.co dekat kediaman Zuhairi Misrawi |
|  |  |
| KH. As'ad Said Ali<br>*Dokumentasi Pribadi di Kediaman Kiai As'ad | Musa Kazhim<br>*Dokumentasi Pribadi di Kediaman Musa Kazhim |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Habib Ahmad bin Noven bin Salim bin Jindan<br>*Dokumentasi Pribadi di Komplek PP. Al-Fachriyah Tangerang | Habib Dr. Muhsin Labib<br>*Dokumentasi Pribadi di Kediaman Muhsin Labib |



Dr. Usep Abdul Matin
*Dokumentasi Pribadi di Kantor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah